

ANALISIS CSIS

Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua: Perspektif Internasional

- Perkembangan Politik dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua: Perspektif Internasional
- Dialektika Paradigma Hubungan Internasional: Aliansi Atlantik dan Kawasan Pasifik
- Peran Kawasan Pasifik dalam Ekonomi Politik Internasional
- Eropa 1992 dan Dampaknya Terhadap Kerjasama di Kawasan Pasifik
- Kerjasama Ekonomi Pasifik dan Indonesia
- Arah Politik Luar Negeri RRC Pasca Tian An Men: Prakiraan Dekade 1990-an
- Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN



Analisis CSIS

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai jurnal berkala untuk menyajikan tulisan-tulisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional. ANALISIS adalah suatu forum terutama untuk para staf peneliti CSIS sendiri. Tetapi sumbangan tulisan dari luar CSIS akan dipertimbangkan untuk dimuat sesuai dengan kebutuhan. Isi tulisan-tulisan yang dimuat dalam ANALISIS sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi penulis masing-masing.

Logo CSIS



Mulai tahun 1989 CSIS menggunakan logo baru: *Nalar Ajar Terusan Budi*. Logo berbentuk sebuah piringan cekung berukiran bola dunia yang melatarbelakangi gambaran orang tanpa busana duduk memangku buku terbuka beralaskan kain lampin. Tangan kiri menunjuk ke buku dan tangan kanan menunjuk ke atas menggambarkan orang yang sedang menguraikan pengetahuan yang ditimba dari buku. Ketelanjangan gambar orang di tengah piringan melambangkan keterbukaan budi -- tiadanya sikap a priori -- pada warga CSIS, seperti pada para analis umumnya, dalam kegiatan studinya. Gambar ini menunjukkan kegiatan belajar dan mengajar atau menguraikan pikiran, sebagaimana para analis CSIS melakukan studi dan menguraikan pikiran mereka kepada siapa saja yang membutuhkannya. Sedangkan bola dunia melambangkan alam jagad raya yang menjadi cakrawala dan lingkup CSIS berada dan berkarya. Kalimat *Nalar Ajar Terusan Budi* yang tertera pada lingkaran piringan adalah *surya sengkala*: cara merangkai kata dalam tradisi Jawa untuk menandai suatu tahun penting menurut peredaran matahari dan sekaligus mengemukakan makna yang terkandung dalam peristiwa yang tahunnya ditandai itu. *Nalar* menurut tradisi Jawa itu berwatak 1, *Ajar* berwatak 7, *Terusan* berwatak 9, dan *Budi* berwatak 1. Sebagaimana lazimnya sengkala dibaca dalam urutan terbalik: 1971, tahun CSIS berdiri. *Nalar Ajar Terusan Budi* juga menggambarkan alam pikiran, dan hakikat kegiatan CSIS. CSIS sebagai lembaga profesi keilmuan, yang didukung oleh kreativitas individu, pada hakikatnya mempunyai kegiatan intelektual yang bukan hanya menganalisa kebenaran tetapi juga terpanggil untuk menunaikan kewajiban sosialnya. Makna *Nalar Ajar Terusan Budi* adalah bahwa bagi CSIS, bernalar, belajar serta menguraikan pikiran adalah kelanjutan wajar dari budi yang arif. Logo ini dituangkan dalam wujud piringan perunggu oleh G. Sidharta.

Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab

Rufinus LAHUR

Dewan Redaksi

Daoed JOESÖEF, A.M.W. PRANARKA, J. Soedjati DJIWANDONO,
M. Hadi SOEASTRO, Harry TJAN SILALAH, Jusuf WANANDI,
Clara JOEWONO, Djisman S. SIMANDJUNTAK, Onny S. PRIJONO

Redaksi Pelaksana

Bambang WALGITO, Sunarto NDARU MURSITO, Medelina K. HENDYTIO

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

ANALISIS CSIS

TAHUN XIX, NO. 4, JULI-AGUSTUS 1990

Daftar Isi

- Pengantar Redaksi 308
- Perkembangan Politik dalam Pembangunan
Jangka Panjang 25 Tahun Kedua; Perspektif
Internasional
Juwono SUDARSONO 310
- Peran Kawasan Pasifik dalam
Ekonomi Politik Internasional
Hadi SOESASTRO 320
- Kerjasama Ekonomi Pasifik dan Indonesia
Suhadi MANGKUSUWONO 335
- Dialektika Paradigma Hubungan Internasional:
Aliansi Atlantik dan Kawasan Pasifik
Bantarto BANDORO 344
- Eropa 1992 dan Dampaknya Terhadap
Kerjasama di Kawasan Pasifik
C.P.F. LUHULIMA 358
- Arah Politik Luar Negeri RRC
Pasca Tian An Men: Prakiraan Dekade 1990-an
Rizal SUKMA 369
- Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN
SUDIBYO, Yoyok ARIESSUSANTO & F. ANDREA 382

Pengantar Redaksi

PERSPEKTIF internasional 25 tahun kedua pembangunan Indonesia menurut *Juwono Sudarsono* adalah memasuki situasi globalisasi bercirikan persaingan keras di bidang ilmu, teknologi, ekonomi, politik, bahkan ideologi dan tarikan primordial. Sistem internasional beralih dari dominasi dua pusat kekuatan menjadi lebih banyak pusat pengaruh politik menuju demokratisasi hubungan internasional. Menghadapi ini, maka ideologi nasional kita harus dikonkretkan ke dalam pelebagaan sosial-politik, sehingga dapat diikhtiarkan kebijakan umum yang mampu menumbuhkan daya saing bangsa kita. Di samping itu diperlukan pengembangan kemampuan fungsional warga negara, agar aneka ragam sektor dan jabatan dikuasai demi meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia Indonesia.

Hadi Soesastro mengemukakan bahwa akhir-akhir ini orang lebih memperhatikan implikasi-implikasi global dari pembangunan ekonomi yang spektakuler di kawasan Pasifik. Akan tetapi bersamaan dengan itu banyak informasi menunjukkan adanya pergeseran titik pusat dunia dari Atlantik ke Pasifik, bahkan munculnya "Abad Pasifik." Hal ini tidak saja memperluas cakrawala pembahasan tentang kawasan tersebut, tetapi mungkin juga mengungkapkan adanya pengaruh yang berarti pada ekonomi politik internasional di kawasan itu sendiri.

Kalau di bagian dunia lain perekonomian mengalami pertumbuhan rendah atau stagnasi, maka di kawasan Asia-Pasifik justru berlangsung pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sebab pokoknya menurut *Suhadi Mangkusuwondo* adalah kebijakan pemerintah-pemerintahnya yang mengembangkan perindustrian berorientasi ekspor, terutama ke pasaran Amerika Utara. Peningkatan ekspor Asia-Pasifik berakibat menumbuhkan impornya juga, sehingga mengembangkan dan menyeimbangkan perniagaan di antara negara-negara Pasifik. Keadaan ini mendorong konsentrasi perdagangan di kawasan Pasifik. Hal mana menyebabkan kerawanan, seandainya ada gejolak politik atau ekonomi, tidak mudah beralih ke pasaran alternatif. Kepentingan Asia-Pasifik menghendaki bagian-bagian dunia yang lain juga berkembang perekonomiannya. Maka tidak diinginkan pembentukan blok dagang Pasifik melainkan diperjuangkan perdagangan yang bersifat multilateral. Demikian pula perkembangan Eropa Timur menuju ekonomi pasar pun disambut baik karena memperluas pasar dunia.

Dengan konsep penangkal yang diperluas dan liberalisme internasional Amerika Serikat berhasil menciptakan sistem internasional yang relatif stabil. Atas dasar konsep itu Amerika

Serikat membangun paradigmanya sendiri, yaitu paradigma Atlantik. Dalam paradigma itu ekonomi dunia mengalami kemajuan tetapi menurun pada kuartal terakhir abad ini. Seiring dengan itu ekonomi beberapa negara kawasan Pasifik terutama Asia Timur naik secara relatif. Negara yang paling menonjol di antara negara-negara yang berprestasi adalah Jepang. Peranan Jepang sebagai pemicu pembangunan negara-negara di kawasan Pasifik (Asia Timur) telah menyumbang pada terbentuknya keistimewaan-keistimewaan kawasan Pasifik. Melalui visi merkantilisme internasional dan penangkal terbatas, Jepang dan negara-negara Asia Timur lainnya membentuk paradigma Pasifik yang merupakan saingan dari paradigma Atlantik yang dibentuk Amerika Serikat. Tulisan dari *Bantarto Bando* bermaksud mengamati dasar-dasar yang membentuk paradigma Atlantik dan Pasifik serta interaksi antara kedua paradigma itu.

Pasar Tunggal Eropa Barat menurut *C.P.F. Luhulima* dibuat untuk meningkatkan daya saing ekonomi ME terhadap kekuatan ekonomi bagian dunia lain. Bersamaan dengan terjadinya perubahan begitu pesat di Eropa Timur menuju ekonomi pasar menjelang terbentuknya ME 1992, kemungkinan terciptanya suatu pasar Eropa yang membentang dari Atlantik sampai ke Ural adalah cukup besar. Perekonomian Eropa yang terintegrasi ini dapat menjadi pendorong utama atau justru rintangan utama untuk perkembangan perdagangan dunia. Menghadapi ini negara-negara di kawasan Pasifik mengusahakan pengembangan perimbangan. Pertumbuhan dan interdependensi dijadikan struktur regional perekonomian Pasifik yang komplementer. Untuk itu Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) berperan sebagai suatu mekanisme yang dapat menjawab tantangan yang datang dari Eropa 1992.

Perubahan-perubahan di dalam negeri dan tekanan internasional berupa sanksi ekonomi yang diprakarsai Amerika Serikat menyusul Tragedi Tian An Men bulan Juni 1989 telah mendorong RRC untuk menilai kembali (*reassessment*) politik luar negerinya. Melalui perspektif kalkulasi segitiga strategis (*strategic triangle*) AS-RRC-US dan pertimbangan kondisi ekonomi dalam negeri, maka *Rizal Sukma* menelaah arah politik luar negeri RRC memasuki dekade 1990-an khususnya di kawasan Asia-Pasifik.

Ringkasan Peristiwa kegiatan ASEAN bulan Juni dan Juli 1990 mengetengahkan beberapa bentuk kerjasama ASEAN. Salah satu yang menonjol ialah Sidang Para Menlu ASEAN ke-23 yang berlangsung di Jakarta tanggal 24 dan 25 Juli 1990. Dalam komunikasi bersama antara lain menyebutkan bahwa negara-negara ASEAN mendesak semua pihak yang bertikai di Kamboja agar mencari kesepakatan mengenai pembentukan Dewan Nasional Tertinggi (*Supreme National Council- SNC*); di samping itu keputusan AS untuk menarik pengakuan CGDK di PBB yang dikemukakan oleh Menlu AS, James Baker III, di Paris tanggal 18 Juli 1990 mengundang beberapa tanggapan, pro maupun kontra yang dapat anda ikuti dalam penerbitan ini. Ringkasan peristiwa ini disusun oleh *Yoyok Ariessusanto, F. Andrea* dan *Sudibyo* sebagai editornya.

Perkembangan Politik dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua: Perspektif Internasional*

Juwono SUDARSONO

Kerangka Acuan

TELAAH ini dimulai dengan kecenderungan politik internasional pada tingkat internasional dan regional, dilanjutkan dengan perkiraan dampaknya terhadap perkembangan politik nasional.

Sekalian telaah yang dikemukakan didasarkan pada asumsi bahwa apa yang disebut sebagai *globalisasi* kehidupan politik, ekonomi dan keamanan internasional pada satu sisi mengandung peluang dan harapan; pada sisi lain, ia juga mengundang tantangan, kendala dan ancaman. Dalam dunia yang semakin bercirikan persaingan keras di bidang ilmu, teknologi dan ekonomi, faktor-faktor politik tidak akan surut. Bahkan dalam jangka waktu 5-10 tahun mendatang, diperkirakan bandul ke arah mengerasnya per-

saingan politik dan ideologi justru akan tampil kembali.

Menghadapi itu semua, persatuan dan kesatuan nasional Indonesia merupakan kerja yang terus-menerus antar generasi dan sekali-sekali tidak boleh dipandang sebagai hal yang sudah mantap atau selesai.

Perkembangan Internasional 25 Tahun Mendatang

Kecenderungan yang berlangsung sejak 5 tahun yang lalu diperkirakan akan terus berjalan selama 5-10 tahun mendatang. Untuk jangka waktu tersebut, Amerika Serikat maupun Uni Soviet tetap akan melakukan perubahan-perubahan struktural dalam perekonomiannya masing-masing dengan antara lain mengurangi anggaran belanja pertahanan keamanan. Kedua adidaya diperkirakan akan melanjutkan usahanya masing-masing maupun usaha-usaha bersama untuk mengurangi persenjataan nuklir strategis, persenjataan dan kekuatan personil konvensional dan mengukuhkan suatu perumusan

*Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ilmu-ilmu Sosial 1990 dan Kongres VI Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIS), tanggal 16-21 Juli 1990 di Yogyakarta.

tentang Eropa yang bersatu, damai dan stabil.

Fungsi Masyarakat Eropa, Pakta Pertahanan NATO dan Pakta Warsawa serta forum pembinaan saling mempercayai di daratan Eropa akan terus disesuaikan dalam usaha menangani perubahan iklim politik dari perang dingin (atau Perang Dingin II 1981-1985) ke arah persaingan damai berkelanjutan menuju kerjasama yang langgeng. Bahasa politik dari generasi yang akan datang beralih dari *cold war/containment* dan *regional conflict* menjadi *peaceful sustained competition* menuju *enduring cooperation*.

Dalam jangka waktu 5-10 tahun mendatang, kekuatan-kekuatan yang selang 15 tahun terakhir telah berangsur-angsur meningkat, yakni Jerman dan Jepang, bukan saja akan keluar dari perlindungan ekonomi Amerika Serikat secara penuh, melainkan juga mengukuhkan dirinya masing-masing sebagai pusat-pusat pengaruh politik. Kawasan Pasifik dan Eropa selama 5-10 tahun mendatang akan semakin dihadapi dengan peran politik Jerman bersatu dan Jepang yang semakin menegaskan diri sebagai kutub dunia yang diperhitungkan. Perdebatan selama Perang Dunia II tentang mana yang lebih penting (Eropa atau Pasifik) muncul kembali dalam lingkup dan corak yang baru. Peran baru Jepang dan Jerman itu besar kemungkinan harus tercermin dalam *restrukturisasi* Perserikatan Bangsa-Bangsa, di dalam mana kedua negara harus memainkan peran formal yang lebih nyata daripada yang selama ini dimainkan masing-masing. Di dalam PBB yang dirombak itu, ada peluang-peluang untuk negara-negara sedang berkembang untuk mengikhtiarkan agar PBB yang diperbarui itu mencerminkan usaha konkret ke arah demokratisasi hubungan internasional.

Baik Jepang maupun Jerman sudah lama mempersiapkan para diplomatnya agar peran politik kedua negara pada masa-masa mendatang sungguh-sungguh dapat diperjuangkan secara trampil oleh wakil-wakilnya di bidang diplomasi. Bersamaan dengan itu diperkirakan bahwa selama 5-10 tahun mendatang, diplomasi kebudayaan Jepang dan Jerman (melalui pameran buku, pertukaran budaya, program olahraga, pertunjukan film; dan lain sebagainya) akan mengalami kebangkitan. Kemajuan teknologi dan perekonomian kedua negara mau tidak mau dibarengi dengan penyebaran isi budaya, termasuk budaya populer melalui media massa.

Sejauh kebudayaan merupakan ujung tombak dari kekuatan politik dalam artian pengaruh, maka tatanan internasional di masa-masa mendatang tidak lagi didominasi oleh budaya ekonomi dan budaya manajemen perusahaan Amerika. Kesepadanan antara ketrampilan diplomasi dengan kekuatan ekonomi merupakan salah satu perkembangan politik internasional yang perlu dikaji, khususnya yang menyangkut peran Jepang dan Jerman.

Apabila kebangkitan Jepang dan Jerman menjadi kekuatan ekonomi dan politik merupakan kecenderungan jangka panjang yang mewarnai situasi internasional, maka corak dari pengaruh kebangkitan kedua negara itu masih belum tampak. Apabila Inggris pada abad ke-19 memperkenalkan kepada dunia konsep *industrialisasi* dan Amerika Serikat memperkenalkan konsep *kebebasan*, dapatkah Jepang dan Jerman menunjukkan kepada dunia suatu konsep yang utuh tentang kelangsungan hidup di bumi?

Penyatuan kembali Jerman telah mengubah peta politik Eropa, bahkan peta politik seluruh dunia. Terpulang pada anggota ma-

syarakat internasional lainnya, apakah Jerman dapat berangsur-angsur diajak untuk menjadi salah satu dari beberapa negara besar dunia yang sanggup mengelola proses politik internasional yang lebih mantap.

Makin meningkatnya peran Jepang dalam percaturan politik dan ekonomi internasional untuk sebagian telah menggeser peran Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Bahkan sifat dan corak perekonomian Jepang telah berkembang sedemikian rupa sehingga seluruh tubuh politik Amerika Serikat makin merasakan gigitannya: defisit anggaran belanja dan perdagangan, peningkatan investasi Jepang di Amerika Serikat, keterkaitan erat proses produksi dan distribusi beberapa barang konsumen penting.

Oleh karena itu, selama 10-15 tahun mendatang, sebagian besar "aturan permainan" internasional yang selama ini dipancarkan oleh Amerika Serikat - Inggris sejak 1944 akan semakin luas dan longgar. Pengelompokan seperti G-7 dan forum-forum tandingan seperti G-15 dan G-77 boleh jadi akan tergantung dari acara peralihan generasi dan peralihan nilai-nilai yang dikembangkan pada angkatan muda Jepang dan Jerman sekarang ini. Secara pasti, bahasa Jepang dan bahasa Jerman akan lebih perlu dipelajari bagi bagian dunia lainnya.

Meningkatnya peran Jepang dan Jerman makin memaksa Amerika Serikat untuk mengembangkan konsep lama, yakni *trilateralisme* atau sistem *triad*. Menurut konsep ini, tiga kutub utama dunia adalah Amerika Utara, Eropa dan Jepang. Amerika Serikat diharapkan mengutamakan perkembangan di belahan Barat, terutama Amerika Latin; Eropa di bawah kepemimpinan Jerman akan diberi tugas pokok mengawasi perkembangan Asia Barat dan Afrika; sedangkan ka-

wasan Pasifik diserahkan pada kepemimpinan Jepang.

Akan tetapi, perkembangan di Uni Soviet perlu tetap diperhatikan dengan cermat. Benar bahwa dasawarsa 1990-an ini adalah masa-masa yang paling kritis dan menentukan bagi hari depan Uni Soviet (dan keamanan Eropa secara keseluruhan). Apabila perombakan yang diprakarsai Mikhail Gorbachev mulai tahun 1993-1995 menunjukkan hasil-hasil konkret (perbaikan persediaan barang-barang konsumen, peningkatan produktivitas ekonomi, kelancaran dalam sistem distribusi di seluruh wilayah Soviet) ada kemungkinan bahwa ideologi sosialisme akan mendapat angin kedua serta tampil sebagai model pembangunan yang menarik.

Gelombang deregulasi dan swastanisasi di seluruh penjuru dunia sejak awal dasawarsa 1980-an diperkirakan akan mengakibatkan *reaksi balik* pada akhir dasawarsa 1990-an ini. Apa yang sekarang didengungkan sebagai kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal sebenarnya bukanlah kemenangan yang berisi: cukup banyak masalah kemiskinan, kebodohan dan ketimpangan yang tersisa di Amerika Serikat, Jerman dan Jepang.

Bagi mereka yang disebut sebagai *underclass* dari kapitalisme dan *demokrasi liberal*, semboyan-semboyan tentang kemenangan kapitalisme atas komunisme adalah semboyan-semboyan kosong. Salah satu ilusi tentang *masyarakat informasi* di negara-negara maju adalah kenyataan pahit bahwa informasi hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki kemampuan sosial-ekonomi untuk memanfaatkan teknologi informasi itu.

Oleh karena itu, kalau pada tahun 1995 sampai tahun 2005 ikhtiar Mikhail Gorba-

chev membuahkan hasil konkret yang menyentuh bagian terbesar kelas menengah Soviet yang kini sedang tumbuh, besar kemungkinan bahwa ideologi tentang perlunya *tangan negara (interventionism)* akan mengalami kebangkitan. Kekhawatiran akan kemungkinan keberhasilan Gorbachev inilah yang menyebabkan perdebatan seru di Amerika Serikat dan Eropa Barat mengenai patut tidaknya Uni Soviet diberi bantuan keuangan dan ekonomi.

Bagaimanapun juga, kemungkinan bangkitnya "model Soviet" yang baru juga akan berpengaruh luas terhadap keinginan banyak negara-negara sedang berkembang untuk mempercayai peran tangan negara dalam perencanaan dan pembangunan nasional. Kemungkinan itu akan lebih relevan lagi, oleh karena pada dasarnya persaingan ideologi berpangkal pada masalah mengangkat derajat dan martabat manusia yang hidup dalam sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik yang dianut para pemimpinnya.

Kiranya lebih tepat untuk memperkirakan bahwa pada kurun waktu 25 tahun mendatang, persaingan ideologi dan politik akan terus berlanjut dengan penekanan-penekanan yang turun-naik sekitar produktivitas pemerataan dan keadilan sosial. Jika Amerika Serikat ingin menjadi percontohan bagi pembangunan dan keadilan sosial di Amerika Latin, maka ia pun akan harus memelopori keteladanan dalam mengatasi masalah kualitas hidup dan martabat warga negaranya, terutama yang keturunan Amerika Latin dan kulit hitam. Bila Jerman dan Jepang ingin menjadi percontohan bagi pembangunan dan keadilan sosial di Afrika dan Asia-Pasifik, maka Jerman dan Jepang pun harus memperlakukan *underclass* masing-masing secara lebih mantap.

Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang tengah kita saksikan di Amerika Serikat, Jepang, Jerman dan Uni Soviet hendaklah ditinjau pula dari segi pemanfaatan *sistem politik* yang bagaimanakah yang mampu menjawab pertanyaan klasik: menyediakan sarana dan prasarana yang layak dinikmati oleh bagian terbesar rakyatnya, sambil memberi peluang untuk mengembangkan kebebasan dan keadilan.

Di samping itu, ada satu pokok masalah yang kini makin harus dijawab oleh sistem politik apa pun, yakni bagaimanakah mengelola kehidupan sosial-politik masyarakat sedemikian rupa sehingga kegiatan-kegiatan-nya (termasuk yang melibat keputusan politik tertinggi) lebih menuju penyelamatan dan kelangsungan hidup bumi daripada sekedar mengolahnya untuk kejayaan internasional? Menjadi tanggung jawab kita di negara-negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia untuk ikut merumuskan secara internasional apa yang menurut kita adalah cara dan sarana terbaik untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup kita.

Transisi dari pola dua kutub (Amerika-Soviet) menuju pola kutub-ganda telah dimulai sejak 15 tahun lalu. Transisi itu makin kentara sejak akhir 1989 - awal tahun 1990-an. Memantau dan memahami apa yang akan berkembang 15-20 tahun mendatang adalah tugas bersama kita.

Di antara proses globalisasi yang terpenting menuju tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- Sekitar 80% dari semua jenis informasi yang tersimpan dalam 100 juta komputer adalah dalam bahasa Inggris. Bila bahasa Jepang dan bahasa Jerman mulai berperan dalam olah informasi global, diperkirakan bahwa dalam jangka waktu 15-20

tahun mendatang, pengaruh bahasa Inggris akan menurun secara proporsional.

- Bahasa dunia untuk jangka waktu 15 tahun mendatang masih didominasi oleh bahasa Inggris dan bahasa Inggris-Amerika; pada tahun 2000 sekitar 1,5 milyar manusia akan mahir dalam bahasa ini, sedangkan pada tahun 2020 akan meningkat menjadi 2 milyar orang. Hal ini menunjukkan bahwa untuk kurun waktu 15-20 tahun mendatang penguasaan bahasa Inggris merupakan salah satu segi akses politik (dalam arti pengaruh media, pendidikan, ilmu, teknologi, bisnis) yang mutlak dikuasai.
- Sejalan dengan proses "pembakuan" yang terjadi ke seluruh penjuru dunia, masalah tarikan-tarikan primordial akan tetap naik ke permukaan: agama, suku, bahasa, ke-daerahan, ras dan nasionalisme akan harus diperhitungkan oleh setiap negara dan bangsa besar yang "multinasional."
- Semakin pentingnya hak-hak asasi manusia oleh berbagai kelompok dan tokoh yang ingin menegaskan jati-diri masing-masing di tengah-tengah proses globalisasi dan pembakuan yang cenderung mengkerdilkan arti dan martabat manusia. Setiap sistem politik menghadapi tantangan berat ini.

Perkembangan Regional: Asia-Pasifik

Kekuatan politik yang terpenting dalam jangka waktu 15-20 tahun mendatang bukanlah Republik Rakyat Cina, Uni Soviet atau Amerika Serikat. Kekuatan politik Jepang mengikuti dan melengkapi kekuatan ekonomi yang tumbuh pesat sejak akhir tahun 1960-an.

Di seluruh kawasan Asia-Pasifik, bahasa Jepang akan semakin penting untuk mulai dipelajari sejak SMTP/SMTA, oleh karena keterkaitan perekonomian seluruh negara di kawasan ini mau tidak mau terpaut erat dengan hampir segala segi dari kegiatan ekonomi dan bisnis Jepang.

Selama dasawarsa 1990-an, di seluruh kawasan Asia-Pasifik akan ditandai oleh bangkitnya generasi baru Asia yang tidak mengenal masa pendudukan Jepang dan tidak terikat secara emosional dengan masa Perang Pasifik. Pada sisi lain, di Jepang sendiri sudah mulai timbul generasi pasca-Perang Dunia II yang lebih percaya diri, lebih matang dan diharapkan lebih kritis dalam memandang dunia sekelilingnya. Dengan kekayaan atas pemilikan asing sebesar US\$400 milyar dan dengan surplus perdagangan yang mencapai rata-rata US\$90 milyar setahun, Jepang tetap akan menjadi kekuatan yang utama di seluruh kawasan ini.

Akan tetapi, berbeda dengan Inggris pada abad ke-19 dan Amerika Serikat pada awal abad ke-20, Jepang tidak memiliki suatu visi ideologis tentang apa dan bagaimana peran politik Jepang menjelang abad ke-21. Landasan falsafah Jepang pada dasarnya adalah suatu pandangan yang merkantilis, dengan ciri-cirinya yang memandang seluruh dunia sebagai lahan usaha.

Sifat merkantilis yang dipadu dengan kebanggaan nasional tentang dirinya sebagai satu-satunya negara industri yang bukan Barat, besar kemungkinan akan memperuncing hubungan-hubungan politiknya dengan negara-negara Asia-Pasifik.

Perasaan bahwa Jepang belum "pantas" atau "matang" untuk menjadi kekuatan politik dunia selamanya akan membuat Jepang harus merumuskan kembali kerjasama poli-

itiknya dengan Republik Rakyat Cina, dengan Korea dan dengan negara-negara ASEAN.

Kebutuhannya akan sumber-sumber alam dari berbagai penjuru dunia, terutama dari kawasan Asia-Pasifik, selamanya akan memperkuat nalurnya untuk merebut pasaran atau menguasai sumber alam melalui berbagai cara yang menegaskan keunggulannya: penanaman modal, perdagangan, perbankan dan bantuan resmi. Suatu jaringan mata rantai yang mempersatukan kelangsungan hidup perekonomian Jepang dengan seluruh kawasan dunia yang potensial, merupakan ciri-ciri politik luar negerinya selama tahun-tahun 1990 dan awal tahun 2000. Pola hubungan internasional Asia-Pasifik selama kurun waktu 20 tahun mendatang akan didominasi oleh Jepang sedemikian rupa sehingga tak satu pun kebijaksanaan dalam dan luar negeri negara Pasifik yang tidak terpengaruh oleh perkembangan politik, sosial dan ekonomi di Jepang.

Karena itu, suatu studi yang mendalam dan berkelanjutan tentang seluruh seluk-beluk kehidupan Jepang sebagai negara, sebagai bangsa dan sebagai budaya adalah suatu keharusan bagi kegiatan ilmiah universitas-universitas di kawasan ini.

Pertanyaan yang segera timbul ialah apakah yang akan melandasi hubungan internasional Jepang dengan kawasan Asia-Pasifik? Selang 10-15 tahun terakhir ini, kesan kuat yang timbul di Asia Tenggara adalah Jepang sebagai kekuatan ekonomi yang haus akan sumber alam, yang rakus meraih lahan pemasaran dan yang pandai memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperkuat daya saing internasional.

Akan tetapi, perubahan-perubahan sosiologis dan demografis di Jepang selama

dasawarsa 1990-an diharapkan akan mengubah cara bangsa Jepang memandang dunia dan memandang diri mereka sendiri. Sekitar 8 juta orang Jepang setiap tahun berwisata ke luar negeri, bagian terbesar di antaranya adalah generasi muda usia (kelompok umur 25-35 tahun) yang lebih mengetahui keadaan dunia luar.

Generasi muda Jepang ini diperkirakan akan lebih santai dan lebih mementingkan kualitas kehidupan di negerinya sendiri. Lagipula, sekitar 30% dari penduduk Jepang menjelang tahun 2000 akan tergolong dalam kelompok usia di atas 65 tahun, sehingga meningkatkan peran dan pembiayaan pemerintah untuk menjamin hari tua mereka. Tangan negara di bidang jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan usia lanjut diharapkan akan menampilkan wajah Jepang yang lebih manusiawi. Suatu komisi yang dibentuk di bawah kantor perdana menteri Jepang pada akhir 1989 lalu diberi tugas untuk merumuskan peran internasional Jepang pada abad ke-21. Keberhasilan perumusan peran Jepang itu untuk sebagian tergantung dari kemauan politik negara-negara Asia-Pasifik lainnya.

Apabila Jepang harus merumuskan peran politiknya setelah meraih kedudukan di bidang ekonomi, maka Republik Rakyat Cina adalah negara kawasan Pasifik yang harus bergumul dengan persatuan politik dan pembangunan ekonomi. RRC sampai dengan pertengahan dasawarsa 1990-an akan dipimpin oleh "generasi Yenan," generasi yang sejak 1926 mengupayakan persatuan negeri Cina melalui peperangan, perang saudara dan pembendungan oleh negara-negara Barat.

Regenerasi di RRC akan terjadi pada tahun 1991-1992 sehingga negeri besar itu kelak untuk pertama kali akan dipimpin

oleh "generasi kedua" yang lebih teknokratis, serta lebih mementingkan keahlian daripada kemurnian ideologi. Dalam pada itu, persoalan dalam negeri RRC adalah demikian rumit, berat dan luas sehingga untuk kurun waktu 1990-2010 mendatang perhatian para pemimpinnya akan terpusat pada pembangunan dalam negeri.

RRC akan lebih sulit untuk menampilkan diri sebagai percontohan dari kisah pembangunan yang berhasil. Menjelang awal 1990-an, berbagai kemacetan di bidang industri, pembangunan prasarana pedesaan dan ketimpangan antara pusat industri dengan pedalaman yang terbelakang telah mengguncangkan sendi-sendi sosial-politik RRC. Tekanan kependudukan yang dialaminya dan luas wilayahnya mau tidak mau akan menyulitkan usaha-usaha pelebagaan yang diperlukannya di berbagai sektor kehidupan. Lepas dari pilihan ideologi, cara penanganan masyarakat Cina akan diwarnai oleh naluri sentralisme yang kuat. Korban-korban upaya pembangunan akan dengan lebih mudah dibenarkan atas nama persatuan dan kesatuan nasional.

Dampak dari meningkatnya kekuatan ekonomi dan politik Jepang serta bertahannya RRC sebagai salah satu pusat politik dan budaya di Asia akan makin dirasakan di Asia Tenggara, khususnya di ASEAN.

Pada tahun 1990-an dan awal 2000, ciri-ciri pengintegrasian kepentingan Jepang di seluruh Asia Tenggara semakin ditandai oleh pembagian kerja yang lebih terencana antara investasi, perdagangan dan bantuan luar negeri. Sedemikian kuatnya pengaruh politik Jepang di ASEAN sehingga proyek-proyek ASEAN yang berskala besar hanya mungkin terlaksana berkat adanya komitmen dana dari Jepang. Pada gilirannya, komitmen dana itu mencerminkan kepentingan dirinya sendiri sehingga ketegangan antara

"idealisme" dan "realisme" uluran tangan Jepang semakin dipersoalkan.

Lagi pula, kemajuan-kemajuan dalam bidang transaksi internasional dewasa ini telah melangkahi pentingnya konsep regionalisme. Besarnya bobot kehadiran teknologi dan modal Jepang telah mengakibatkan suatu proses "de-ASEANisasi," mengingat hubungan ekonomi dan perdagangan Jepang-ASEAN jauh lebih besar daripada hubungan intra-ASEAN.

Meskipun tidak dapat menyamai peran yang dimainkan Jepang, RRC tetap merupakan negara besar utama di kawasan Asia Tenggara. Sebagai pusat politik dan budaya, perkembangan di RRC cepat atau lambat mempengaruhi iklim politik di setiap negara ASEAN, istimewa yang memiliki masalah hubungan antara golongan pribumi dan non-pribumi.

Terhadap Jepang, RRC dapat merupakan mitra politik yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya untuk mengajukan dan memperoleh syarat-syarat kerjasama ekonomi yang lebih baik. Pada sisi lain, cara RRC memandang Asia Tenggara juga akan ditentukan oleh bagaimana masing-masing negara Asia Tenggara mengatasi dan memantapkan hubungan antara golongan pribumi dan non-pribumi. Kesepakatan untuk tidak ikut campur tangan ke dalam urusan negara-negara ASEAN adalah bukti bahwa kalau kepentingan nasional menuntut sikap tertentu, para pemimpin RRC cukup kenyal untuk mengalah.

Dampak terhadap Pembangunan Nasional Indonesia

Sekalian gambaran kecenderungan internasional dan regional selama 20-25 tahun

mendatang tadi akan menantang kita dengan sejumlah permasalahan pokok, khususnya yang melibat pengembangan kualitas hidup politik dan peningkatan martabat manusia Indonesia.

Pertama dan yang terpenting ialah tekad bahwa dalam dunia yang kompetitif, perhatian pada pemeliharaan persatuan dan kesatuan nasional kita harus tetap kuat. Daya tarik kebudayaan, teknologi dan gaya hidup dari negara-negara lain akan berdampak secara berbeda di masing-masing wilayah dan propinsi di seluruh penjuru Tanah Air.

Karena itu, adalah mutlak untuk mempelajari dengan seksama "tarikan-tarikan sosial-budaya" yang mengena pada beberapa wilayah perbatasan kita, istimewa di Irian Jaya-Papua Niu Gini, Sulawesi Utara-Filipina bagian selatan, Sumatera Utara/Aceh dengan Malaysia serta Timor Timur.

Ini berarti bahwa dalam pendidikan politik kita secara nasional menyeluruh, makin penting dikembangkan dua jenis kesadaran akan kehidupan politik nasional. Yang pertama ialah pemantapan identitas Indonesia sebagai konsep *geo-politik/teritorial*, yakni integrasi klasik yang mempersatukan seluruh wilayah tumpah darah sebagai bagian yang tak terpisahkan. Wawasan Nusantara adalah sikap dasar yang terus-menerus perlu dikonkretkan melalui rangkaian keberhasilan pelebagaan sosial-politik, terutama pelebagaan yang didasarkan pada sendi-sendi *keorganisasian* yang kuat.

Yang kedua ialah pemantapan kemampuan fungsional manusia Indonesia, yakni pengembangan pengetahuan, ilmu dan kiat manusia sebagai makhluk yang harus bertarung dalam dunia yang sarat dengan daya saing internasional. Profesionalisme di berbagai bidang usaha dan lapangan pekerjaan

menuntut dicapainya tingkat kemahiran dan kesiapan tertentu. Internasionalisasi dan transnasionalisasi aneka ragam sektor keahlian dan jabatan harus dikuasai oleh sebanyak mungkin tenaga-tenaga Indonesia, apabila tantangan dan peluang internasional ingin ditangani dengan baik.

Kedua jenis pemantapan selama 20-25 tahun mendatang ini adalah tugas dari sekalian jenjang pendidikan di seluruh pelosok Tanah Air kita. Dengan perkataan lain, kita semua dituntut untuk menumbuhkan diri kita sebagai *bangsa niaga* di samping memelihara kemampuan kita sebagai *bangsa siaga*. Kesadaran kita akan makna geo-politik/teritorial akan mempertegas komitmen kita semua untuk memelihara persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kesadaran dan pekerjaan kita menyiapkan manusia-manusia fungsional akan mempertegas komitmen kita bahwa syarat-syarat dan cara-cara memelihara persatuan dan kesatuan nasional itu tergantung dari seberapa cepat dan tanggap kita memberi kesempatan yang memadai bagi semua putra-putri Indonesia dari sebanyak mungkin wilayah teritorial Indonesia. Dengan demikian, orang Indonesia dari Irian Jaya yang bekerja di pertambangan tembaga akan tetap merasakan manfaat serta kepentingannya untuk mempertahankan ke-Indonesia-annya. Demikian pula putra-putri di Aceh akan merasakan bahwa lahan industri dan investasi di sekitar wilayahnya itu pun dimanfaatkan oleh sebesar jumlah rakyat Indonesia di seluruh penjuru Tanah Air.

Ikhtiar memelihara persatuan dan kesatuan nasional di tengah-tengah tarik-menarik internasional dan primordial boleh jadi akan semakin berat pada kurun waktu 1990-an ke atas. Sekarang pun sudah dirasakan bahwa "tangan negara" di berbagai pe-

losok Tanah Air perlu didefinisikan kembali: seberapa kendali pusat yang optimal guna menumbuhkan otonomi yang berbobot. Sebaliknya, tingkat otonomi yang seberapakah yang patut dilimpahkan agar daya-tarik budaya luar negeri tidak mengundang perpecahan bangsa dan negara?

Perhatian yang diarahkan pada perkembangan Indonesia Bagian Timur melibatkan ikhtiar-ikhtiar agar kualitas manusia Indonesia di seluruh pelosok Tanah Air ditingkatkan sedemikian rupa sehingga sekalian keahlian fungsional (akuntansi, manajemen, teknologi, sosial-budaya) dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga *rotasi* dan *sirkulasi* warga negara Indonesia dari satu ujung ke ujung lain dapat terlaksana dengan lancar. Wawasan nasional mempertegas identitas dan keterikatan nasional; wawasan internasional memperkuat pentingnya penguasaan ilmu, teknologi dan pengetahuan yang bersifat lintas-benua.

Generasi muda Indonesia yang mekar dan tumbuh selama jangka waktu 15-20

tahun mendatang selamanya harus dibekali dengan suatu pemetaan *geografik* maupun *fungsional* tentang kedudukan Indonesia di tengah-tengah perubahan dunia. Kepada mereka dituntut kemampuan untuk memahami bahwa persaingan politik internasional semakin ditandai oleh kesanggupan kita melakukan *brain-power planning* guna menunjang dan mendukung *manpower planning*.

Dalam pada itu, ikhtiar memantapkan kehidupan sosial-politik dalam negeri memerlukan persiapan, perencanaan dan penjabaran berfungsinya aneka jenis lembaga-lembaga yang memungkinkan sekalian tantangan perubahan itu diresapi dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang seprofesi atau sepenanggungan. Hanya dengan demikianlah kita dapat menjaring lapisan sosial-politik terendah yang memerlukan pertolongan tangan negara. Dan hanya dengan demikianlah kelompok pemimpin kita di atas, yang seharusnya mengikuti dan merencanakan kekenyalan dalam menetapkan kebijakan umum, akan mampu mempertahankan daya saing internasional kita.

DAFTAR PUSTAKA

Drucker, Peter. *The New Realities*. Harper & Row, 1989.

Naisbitt, John dan Aburdene, Patricia. *Megatrends 2000*. William Morrow, 1990.

Porter, Michael. *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press, 1990.

"Prospects for the 1990s," *South*, January 1990.

"Money Can't Buy You Wealth," *South*, June 1990.

"Managing the Environment," *Scientific American*, September 1989 (Special Issue).

Asia Yearbook 1990.

Atlas of the World. London: Economist, 1990.

Economist, double issue, 23 December 1989 - 4 January 1990.

Lampiran

DAFTAR PERINGKAT PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT UNDP
(Human Development Report 1990)

	Peringkat HDI A	PDB Per Kapita B	Perbedaan C
Jepang	130	126	naik 4
Swedia	129	125	naik 4
Finlandia	120	121	turun 5
Amerika Serikat	112	129	turun 17
Uni Soviet	105	101	naik 4
Singapura	96	110	turun 14
Malaysia	85	80	naik 5
Thailand	78	55	naik 23
Indonesia	54	41	naik 13
Benin	10	28	turun 18
Somalia	7	23	turun 16
Berkina Faso	3	13	turun 10

HDI = Human Development Index mencakup harapan usia hidup; akses pada pendidikan; kemungkinan mencapai taraf hidup yang layak bagi manusia. Ketiga unsur tadi dipadukan menjadi satu indeks menyeluruh.

PDB Per Kapita = pengukuran kemajuan konvensional.

Perbedaan = menunjukkan naik turunnya peringkat bila disusun atas dasar HDI daripada atas dasar PDB per kapita.

(Tidak dijelaskan apakah harapan mencapai usia lanjut dan sehat mencakup keselamatan fisik hidup dalam sistem politik tertentu. J.S.)

Peran Kawasan Pasifik dalam Ekonomi Politik Internasional*

Hadi SOESASTRO

Pengantar

SELAMA kurang lebih dua dekade terakhir, perhatian orang terhadap perkembangan di kawasan Pasifik makin terpusat ke satu arah tertentu. Pada awal mulanya, pusat perhatian adalah pada berbagai pengaruh perkembangan global terhadap negara-negara utama di kawasan Pasifik dan bagaimana mereka itu sebagai suatu kelompok mampu secara efektif menanggulangi aneka pengaruh dari luar itu. Kemudian, setelah melihat pembangunan ekonomi mereka yang spektakuler, perhatian orang pun lantas beralih ke dinamika internal yang ada di kawasan tersebut dan pada cara mereka sebagai suatu kelompok untuk mampu memanfaatkan perkembangan yang ada guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional demi keuntungan timbal balik sesama negara di kawasan itu.

*Dialihbahasakan oleh M. Bambang Walgito dari Hadi Soesastro, "The Role of the Pacific Basin in the International Political Economy," *Foreign Relations Journal* Vol. IV No. 2 (June 1989).

Akhir-akhir ini orang lebih memperhatikan implikasi-implikasi global dari pembangunan ekonomi yang spektakuler di kawasan Pasifik. Istilah "Abad Pasifik," yang semakin banyak dijumpai di aneka tulisan ilmiah, laporan media massa, maupun pidato-pidato menunjukkan adanya pergeseran titik berat pusat dunia dari Atlantik ke Pasifik. Fokus perhatian yang baru ini tidak hanya memperluas cakrawala pembahasan tentang kawasan tersebut, tetapi mungkin juga dapat membawa pengaruh yang berarti pada ekonomi politik internasional di kawasan Pasifik itu sendiri.

Sementara orang mendramatisir akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pergeseran geopolitik, maka mereka kurang memperhatikan proses dari pergeseran itu. Barangkali hal itu mencerminkan pola pemikiran yang dominan, yang menganggap bahwa pergeseran geopolitik itu memang merupakan suatu peristiwa sejarah yang harus terjadi. Dalam salah satu pidato radionya di tahun 1984, Perdana Menteri Jepang, Nakasone, secara jelas mendukung pemikiran tersebut. Dikatakannya bahwa "Era Pasifik merupa-

kan suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindarkan.”¹ Namun, jauh sebelum Nakasone mencetuskan ungkapan seperti itu, sudah ada keyakinan di Jepang bahwa abad ke-21 akan merupakan suatu abad Pasifik, ungkapan yang kerap kali telah dipakai oleh beberapa perdana menteri sebelumnya. Mereka itu mengacu pada teori Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris, dan pada teori Oswald Spengler, sejarawan Jerman. Teori Toynbee ini banyak dimanfaatkan oleh Jiro Tokuyama ketika ia mengajukan pendapat bahwa ”jatuh banggunya peradaban Barat dan Timur berlangsung silih berganti dalam kurun waktu 800 tahun-an,” dan bahwa ”siklus peradaban Eropa yang berawal dari -- abad 13 ini kini mulai menunjukkan penurunan -- dan abad 21 sampai dengan abad 28 akan melihat tumbuhnya peradaban Asia-Pasifik.”² Sesungguhnya beberapa cendekiawan Jepang secara dini telah mulai meneliti secara serius arti dari abad Pasifik tersebut bagi masa depan perekonomian Jepang.³

¹Staffan Burenstam Linder, *The Pacific Century: Economic and Political Consequences of Asian-Pacific Dynamism* (Stanford: Stanford University Press, 1986).

²Jiro Tokuyama, ”The Advantages of a Pacific Economic Basin,” *Far Eastern Economic Review*, 23 March 1979.

³Kiichi Saeki, ed., *International Environment and Japan Grand Strategy for the 21st Century*(Kamakura: Nomura Research Institute, 1977); Kiichi Saeki, ed., ”The Search for Japan’s Comprehensive Policy Guidelines in the Changing World: National Priorities for the 21st Century,” dikutip dalam Sir John Crawford dan Greg Seow, *Pacific Economic Cooperation: Suggestion for Action* (Singapore: Heinemann Educational Books, 1981), hal. 207-213; Perlu pula dilihat Jiro Tokuyama, *Taiheiyo no seiki: Nihon keiai no katsuro wo motomete* (Abad Pasifik: Usaha Mencari Pelajaran Bagi Perekonomian Jepang) (Tokyo: Diayamondosha, 1978), yang juga dijadikan acuan oleh James W. Morley dalam ”The Pacific Basin Movement and Japan,” Rountable Reports Number 7, East Asian Institute, Columbia University, New York, 1983.

Di Amerika Serikat sendiri pemikiran-pemikiran seperti itu juga telah lama ada. Presiden Roosevelt, seorang penganut mashab geopolitik yang berkembang di akhir abad ke-19, merupakan salah seorang yang berpandangan seperti itu. Konon di awal tahun 1898, pada saat Amerika Serikat menduduki Filipina, ia pernah mengatakan bahwa ”Era Atlantik ... akan segera kehabisan sumber dayanya” dan ”Era Pasifik, yang memang sudah ditakdirkan untuk menjadi yang terbesar, kini mulai timbul.”⁴ Pemikirannya ini diungkapkannya kembali di tahun 1905, di akhir perang antara Rusia dan Jepang, tatkala diucapkannya bahwa ”abad ke-20 akan merupakan abad Pasifik.”⁵ Konon dikatakan bahwa dua perang dunia serta revolusi-revolusi komunis merupakan peristiwa yang membuat sejarah telah menyimpang dari ramalan Roosevelt.”⁶

John M. Hay, Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan Roosevelt, juga diberitakan pernah meramalkan bahwa ”Atlantik yang merupakan Samudera Masa Kini,” di masa mendatang akan minggir dan menyerahkan tempatnya ke tangan Pasifik yang merupakan Samudera Masa Depan.”⁷ Sedangkan sebelum itu William H. Steward, Menteri Luar Negeri di zaman Abraham Lincoln, pernah pula mengungkapkan bahwa ”Samudera Pasifik ... akan menjadi

⁴Sebagaimana dikutip dalam Christopher Coker, ”The Myth or Reality of the Pacific Century,” *Washington Quarterly* (Summer 1988), hal. 6.

⁵Sebagaimana dikutip oleh Kumai Kaneko, ”A New Pacific Initiative: Strengthening the PECC Process,” *Japan Review of International Affairs* (Spring-Summer 1988), hal. 67.

⁶Ibid., hal. 67.

⁷Sebagaimana dikutip oleh Willy Kraus dan Wilfrid Luetkenhorst dalam *The Economic Development of the Pacific Basin* (New York: St. Martin’s Press, 1986), hal. 131.

panggung utama peristiwa dunia ... dan mulai saat ini tata perdagangan dan pemikiran Eropa serta jalinan antar sesama negara Eropa kendati tampak semakin erat namun akan memudar.”⁸ Di tahun-tahun belakangan ini baik Presiden Reagan maupun George Shultz, Menteri Luar Negerinya, juga telah mengutarakan pemikiran serupa.”⁹

Dari para penganut paham geopolitik itu sebenarnya belum pernah ada uraian yang jelas tentang sebab musabab terjadinya pergeseran geopolitik itu dan tentang mekanisme yang mendorong terciptanya pergeseran seperti itu. Mashab kedua yang akhir-akhir ini juga populer mencoba menerangkan perkembangan itu sebagai akibat dari bekerjanya kekuatan-kekuatan ekonomi. Aliran ini menjelaskan bahwa pergeseran titik berat ekonomi secara otomatis akan diikuti dengan pergeseran titik berat dalam kehidupan politik dunia. Kelompok futurolog atau kaum peramal masa depan yang tergabung dalam Institute Hudson di Amerika Serikat juga berpandangan serupa. Namun ramalan mereka lebih bertumpu pada penafsiran sejarah. Dalam salah satu studi yang paling awal di Amerika Serikat mengenai pergeseran titik berat dunia, yakni dari Atlantik ke Pasifik, William Overholt melihat kebangkitan kawasan Pasifik teristimewa dari sudut sejarah. Menurut pendapatnya, sepanjang sejarah telah ada kawasan-kawasan yang menjadi titik pusat dinamika ekonomi dunia; di zaman lampau Cina merupakan

titik pusat percaturan ekonomi dunia, kemudian diikuti dengan kawasan Timur Tengah menyusul kawasan Laut Tengah, yang kemudian diikuti oleh Inggris, kawasan Laut Utara dan Atlantik Utara. Akhir-akhir ini pusat dinamika itu beralih ke Jepang dan negara-negara tetangganya di kawasan Asia Timur. Dikatakannya pula bahwa ”dalam setiap kasus itu percepatan pembangunan ekonomi telah amat mempengaruhi jalannya sejarah politik dan budaya.”¹⁰

Dalam suatu laporan yang ditulis pada tahun 1975 dikatakan bahwa pergeseran titik berat dunia dari Atlantik ke Pasifik pada dasarnya hanya akan merupakan suatu pergeseran dalam bidang bisnis. Namun demikian dikatakan lebih lanjut bahwa ”di tahun-tahun awal abad Pasifik itu akan terjadi beberapa perubahan yang mengejutkan dalam tata cara kita menanggulangi aneka masalah baik secara politik, lingkungan, perdagangan, teknologi maupun budaya.”¹¹ Dengan kata lain, laporan itu memperkirakan akibat yang luas dari pergeseran ekonomi tersebut. Hal ini disebabkan oleh posisi sentral Jepang di bidang ekonomi, dan yang lebih penting lagi ialah karena adanya perbedaan antara Jepang dan dunia Barat dalam cara penanggulangan masalah politik, sosial ataupun ekonomi.

Sebenarnya laporan tersebut terutama ditujukan kepada masyarakat Eropa. Di situ diserukan pentingnya menanggapi secara tepat waktu aneka tantangan yang akan muncul ”sekiranya abad Amerika yang berlangsung antara 1875-1975, yang telah menggantikan abad Inggris yang berlangsung an-

⁸ Seperti dikutip oleh Joel Kotkin dan Yoriko Kishimoto, *The Third Century: America's Resurgence in the Asian Era* (New York: Crown Publishers, 1988), hal. 51.

⁹ Lihat misalnya, ”The Next Century will be the Century of the Pacific,” *U.S. Department of State Bulletin* 84:2082, January 1984.

¹⁰ William H. Overholt, ”The Rise of the Pacific Basin,” *Pacific Community*, July 1974, hal. 516.

¹¹ Norman Macrae, ”Pacific Century, 1975-2075?” *Economist*, 4 January, 1975, hal. 15.

tara 1775-1875, akan digantikan oleh abad Pasifik yang berlangsung mulai 1975 sampai 2075." Tanpa disertai suatu penjelasan khusus, dalam laporan itu hanya disebutkan bahwa Eropa barangkali tidak berada dalam kondisi yang baik yang memungkinkannya menjawab tantangan tersebut secara memadai mengingat Eropa "belum melatih generasi pasca perang untuk memahami dasar-dasar bisnis Jepang." Dikatakan pula bahwa orang-orang Eropa "cenderung untuk berlandung di balik generasi yang telah membuat mukjizat ekonomi. Sikap seperti ini jelas berbahaya untuk menghadapi para pemimpin industri yang kurang memiliki jiwa *noblesse oblige*." ¹²

Kendati fokus utamanya secara eksklusif tertuju ke Jepang, namun laporan tersebut tidak begitu saja menyamakan abad Pasifik dengan abad Jepang. Thesis yang diajukan adalah kebangkitan seluruh kawasan yang mencakup Pasifik bagian barat termasuk Cina dan Amerika Utara. Yang disebut terakhir ini sudah terlihat dari semakin pentingnya bagian barat Amerikat Serikat dan Kanada dibandingkan dengan bagian-bagian lain di belahan timurnya. Diutarakan pula di situ tentang potensi yang terkandung di kawasan Timur Jauh Soviet (yakni Siberia) yang akan tumbuh besar dibandingkan Rusia bagian Eropa. Namun yang paling utama dalam laporan tersebut ialah anggapan bahwa Amerika Serikat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fenomena Pasifik itu. Laporan itu juga mengutarakan pandangan bahwa kebangkitan abad Pasifik pada hakekatnya dilihat dalam kerangka kerjasama antara Jepang dan Amerika Serikat (Amerika Utara). ¹³

Tetapi suatu laporan yang ditulis belum lama berselang, yakni di tahun 1988, melihat

bahwa dunia kini berada di tengah pergeseran geopolitik yang mendalam sekali sebagai akibat dari tampilnya Jepang dan beberapa negara Asia Timur lainnya yang "tengah bergerak untuk mendominasi perekonomian dunia." ¹⁴ Abad Pasifik, demikian laporan tersebut, pada dasarnya merupakan suatu "era kebangkitan kekuatan Asia," yang menantang Amerika, seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan sangat menyesal diungkapkan pula bahwa banyak orang menganggap pergeseran titik berat ekonomi dunia ke Asia itu merupakan tanda kemerosotan Amerika. ¹⁵ Karena itu Amerika Serikat seringkali tidak dilihat sebagai bagian integral dari fenomena Pasifik.

Karenanya problema yang muncul bukanlah sekedar persoalan akademik semata, yakni tentang diikutsertakan atau tidaknya Amerika Serikat. Namun, persoalannya jauh lebih mendasar, yakni "sekiranya pergeseran tersebut bukan merupakan suatu fakta sejarah yang tidak dapat dielakkan dan juga bukan merupakan suatu pergeseran politik yang terjadi begitu saja karena adanya pergeseran titik berat ekonomi, maka muncul suatu kemungkinan ketiga, yakni pandangan bahwa pergeseran geopolitik itu akan sangat bergantung pada kebijakan yang akan dicanangkan Amerika Serikat.

Laporan yang ditulis tahun 1988 itu tampaknya amat dipengaruhi psikologi *declinisme* Amerika Serikat yang menurut pendapat Samuel Huntington telah mencapai titik puncaknya dalam gelombang kelima di tahun 1988." ¹⁶ Situasi seperti itu barangkali

¹⁴Lihat "The Pacific Century," A Special Report, *Newsweek*, 22 February, hal. 8.

¹⁵Kotkin dan Kishimoto, *The Third Century*, halaman depan.

¹⁶Samuel Huntington, "The U.S. - Decline or Renewal?" dalam *Foreign Affairs*, vol. 67 No. 22 (Winter 1988/1989), hal. 76-96.

¹²Ibid., hal. 34.

¹³Ibid., hal. 35.

hanyalah sementara dan tampaknya kini mulai terjadi suatu pembalikan arah. Seandainya demikian, maka persoalan yang ada sekarang ialah apakah kiranya ada faktor-faktor yang lebih permanen dan lebih struktural sifatnya yang akan mempunyai pengaruh lebih besar atas kebijakan yang akan dicanangkan Amerika berkenaan dengan kawasan Pasifik. Salah satu faktor-nya adalah geografi dan kenyataan bahwa mau tidak mau Amerika Serikat secara geografi berhadapan langsung dengan Atlantik maupun Pasifik.

Sampai saat ini suatu karya akademik terpenting yang meneliti akibat-akibat global dari apa yang oleh penulisnya sendiri disebut sebagai suatu "dinamika baru kawasan Pasifik" ditulis oleh seorang Eropa, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Swedia yang menjadi anggota Parlemen dan pernah menjadi menteri perdagangan, Staffan Burenstam Linder.¹⁷ Dijelaskannya di situ mengapa ia mempergunakan istilah "Ekonomi Kawasan Pasifik" yang mencakup bagian barat Amerika Utara. Namun dalam terminologi politik, seluruh Amerika Serikat dan Kanada seharusnya termasuk dalam fenomena Pasifik, jadi bukan sekedar bagian pantai baratnya saja. Linder juga menunjuk pada kekhususan posisi geografis Amerika Serikat. Berdasarkan posisi tersebut dikemukakannya lebih lanjut bahwa "Sekiranya pertumbuhan yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik itu mendesak Amerika untuk lebih memusatkan perhatiannya ke kawasan Pasifik, maka hal ini akan mempertegas aliansi baru ekonomi dunia walaupun ditinjau dari segi kepentingannya Amerika Serikat bukanlah merupakan bagian integral dari perekonomian kawasan Pasifik yang dinamis itu melainkan merupakan

suatu kesatuan terpisah yang memiliki hubungan khusus dengan masyarakat Asia-Pasifik."¹⁸

Lebih lanjut secara lebih rinci Linder mengemukakan bahwa titik berat perekonomian dunia telah beralih dari kawasan Atlantik ke Pasifik. Namun di situ ia hanya mau mengemukakan bahwa keberhasilan perekonomian Pasifik yang spektakuler itu akan menciptakan suatu pergeseran dalam titik berat politik dunia melalui mekanisme pembagian kembali pengaruh politik di antara aneka ragam kekuatan, kelompok ataupun blok.¹⁹

Terlalu picik kiranya bila kita beranggapan bahwa pembagian kembali pengaruh politik tersebut berlangsung secara otomatis. Proses semacam itu akan banyak dipengaruhi oleh negara yang secara politis mampu mempengaruhi negara lain. Di satu pihak, negara-negara di Pasifik Barat tidak dapat berbuat seperti itu mengingat di kalangan mereka sendiri kurang ada kerangka landasan yang kokoh untuk menjalin kerjasama di bidang politik maupun ekonomi. Di lain pihak haruslah diakui bahwa Amerika Serikat masih memiliki kekuatan politik yang menonjol dalam percaturan dunia. Oleh karena itu, apa yang akan dilakukan Amerika Serikat akan besar pengaruhnya pada jalan yang akan dilalui abad Pasifik.

Tiga Pilihan Bagi Amerika Serikat

Berbagai pandangan mengenai pertumbuhan kawasan Pasifik yang muncul sampai sekarang dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar. Masing-masing kelompok meli-

¹⁸Ibid., hal. 6.

¹⁹Ibid., hal. 1.

¹⁷Linder, *The Pacific Century*.

batkan satu pilihan kebijakan yang jelas bagi Amerika Serikat. Yang pertama, yaitu suatu pemikiran yang tampaknya semakin populer di Amerika Serikat, menitikberatkan pemikirannya pada adanya "ancaman baru" dari Pasifik. Seperti dinyatakan oleh pengamat lain, "perhatian Amerika Serikat terhadap Pasifik sekarang ini mencerminkan adanya keyakinan yang semakin kuat bahwa yang akan mengancam kedudukan Amerika Serikat selaku negara adidaya bukanlah Uni Soviet melainkan Jepang."²⁰

Hofheinz dan Calder rupanya tidak sependapat dengan pemikiran seperti itu, sebab mereka beranggapan bahwa masyarakat Amerika justru kurang menyadari akan datangnya bahaya yang muncul dari Asia. Menurut anggapan mereka kesalahan pandangan Amerika ini disebabkan karena ancaman yang ada saat ini pada dasarnya merupakan ancaman ekonomi.²¹ Lebih lanjut kedua tokoh tadi mengungkapkan pemikiran mereka bahwa Amerika Serikat "hampir selalu menempatkan kepentingan dan posisi strategisnya terutama dalam ruang lingkup militer," dan kurang "menyadari adanya perubahan ekonomi yang berlangsung diam-diam ... yang justru telah mengubah peta dunia secara lebih mendasar dibandingkan yang telah diubah oleh konflik Korea dan Vietnam ataupun barangkali malahan lebih besar dibandingkan akibat yang ditimbulkan oleh Perang Dunia II itu sendiri."²²

Walaupun mungkin begitu namun apa yang dianggap sebagai ancaman dari Asia

Timur itu kini tidak lagi dianggap sebagai ancaman yang melulu berasal dari Jepang, namun sudah meluas dan meliputi 'Jepang-Jepang kecil', yaitu dari negara-negara industri baru di Asia. Oleh karena itu kini sudah tidak ada lagi kesatuan pendapat mengenai apa yang sebenarnya merupakan ancaman. Ada yang berpendapat bahwa yang merupakan ancaman adalah berbagai kebijakan yang sengaja dibuat negara-negara industri baru Asia untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya, seperti menjaga agar kenaikan upah tetap berada di bawah laju pertumbuhan produktivitas atau dengan mengabaikan hak-hak kaum buruh.²³ Kebijakan semacam itu jelas tidak dapat diterapkan di masyarakat yang demokratis seperti Amerika Serikat sehingga dengan sendirinya masyarakat yang demokratis akan berada dalam posisi yang sulit untuk bersaing. Orang lain melihat ancaman itu muncul dari kebijakan merkantilis seperti yang dilaksanakan oleh Jepang dan dianggap lazim dipraktekkan di Asia Timur. Seperti yang diuraikan oleh Hofheinz dan Calder, keunggulan kompetitif Asia Timur ini "memiliki unsur-unsur budaya, psikologi dan yang paling mendasar, unsur struktural" yang tampaknya terdapat di seluruh kawasan tersebut dan amat berbeda dari unsur-unsur yang ada di Amerika Serikat.²⁴

Mengingat pengertian orang mengenai hakikat ancaman itu beraneka ragam, maka beraneka ragam pula jawaban kebijakan yang diusulkan. Yang paling kasar bentuknya adalah usulan yang mengandung unsur pembalasan (misalnya dengan mengenakan

²⁰Coker, *The Myth or Reality*.

²¹Roy Hofheinz, Jr. dan Kent E. Calder, *The East Asia Edge* (New York: Basic Books, Publishers, 1982), hal. 3.

²²*Ibid.*, hal. 5.

²³Lihat misalnya, The Cuomo Commission on Trade and Competitiveness, *The Cuomo Commission Report* (New York: Simon and Schuster, 1988).

²⁴Hofheinz and Calder, *The East Asia Edge*, hal. 17-26.

"countervailing duties"), pendekatan perdagangan yang diskriminatif dan aneka ragam tindakan proteksionis dengan dalih "safeguards." Tambahan lagi jenis ancaman seperti yang mereka pikirkan itu dilihat sebagai alasan sah bagi Amerika Serikat untuk membenarkan berbagai tindakan yang bersifat sepihak. Ada reaksi yang lebih canggih yang dilakukan Amerika Serikat, yaitu melalui usaha-usaha yang sistematis untuk memulihkan keunggulan kompetitifnya dengan meningkatkan teknologi. Ini berarti mencegah penyebarluasan teknologi canggih kepada mereka yang memiliki potensi untuk menjadi pesaingnya.²⁵

Menurut gambaran pandangan pertama, abad Pasifik akan ditandai dengan peningkatan antagonisme antara Amerika Serikat dan Asia Timur sebagai sasaran utamanya. Tampak jelas Amerika Serikat tidak begitu memperhatikan kenyataan bahwa proteksionisme yang dilakukan Eropa itu paling tidak juga merupakan ancaman yang sama besarnya. Sehubungan dengan ini timbul kesan bahwa "orang Amerika tidaklah menganggap orang Eropa saingan mereka." Hal itu disebabkan karena sebagian besar warganya berasal dari Eropa.²⁶ Secara umum dapat dikatakan bahwa pandangan pertama ini tampaknya sependapat dengan apa yang dicetuskan dalam Special Report yang diterbitkan *Newsweek* di tahun 1988 yang mengatakan bahwa dalam abad Pasifik ini dunia akan menjadi suatu tempat yang lebih mudah bergejolak. Hal itu bukan hanya disebabkan karena peningkatan persaingan dagang dan kebangkitan nasionalisme ekonomi di Amerika Serikat, melainkan pula karena hegemoni negara adidaya akan digantikan oleh dunia yang multipolar. Sesungguh-

nya telah diusulkan beberapa reaksi lain dalam ruang lingkup pemikiran yang lebih luas yakni untuk membentuk suatu tatanan dunia baru "pasca hegemoni." Misalnya, telah dipikirkan bahwa neo-merkantilisme barangkali merupakan satu-satunya jalan ke luar yang realistis dan yang secara politis dapat dilaksanakan serta mampu menjanjikan stabilitas yang lebih kokoh bagi perekonomian dunia. Sehubungan dengan itu diusulkan pula agar Amerika Serikat menganut kebijakan merkantilis yang *lembut*.²⁷

Pandangan kedua beranggapan bahwa abad Pasifik sudah ditakdirkan menjadi abad Jepang. Seperti yang diungkapkan oleh Clyde Prestowitz, "perkembangan besar yang terjadi di bagian akhir abad itu adalah tampilnya Jepang sebagai suatu negara adidaya yang besar."²⁸ Para penganut paham itu percaya bahwa kekuatan ekonomi Jepang akan terus tumbuh dan akan melampaui Amerika Serikat dalam waktu dekat ini. Andaikan ini terjadi, demikian katanya, Jepang seharusnya memikul tanggung jawab menjaga stabilitas rezim internasional. Lawrence Krause, misalnya, menyarankan agar seyogyanya Amerika Serikat mengalihkan hegemoninya ke Jepang. Menurut pemikirannya, adanya suatu rezim internasional yang dalam bidang ekonomi dipimpin Jepang akan jelas berbeda dengan rezim pimpinan Amerika. Namun perbedaan ini tidaklah begitu mengganggu perekonomian dunia dibandingkan dengan proses terjadinya perubahan itu.²⁹ Lebih lanjut dikatakannya bahwa "merupakan kepentingan setiap

²⁷Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations* (Princeton: Princeton University Press, 1987), hal. 406-408.

²⁸Clyde Prestowitz, *Time*, 4 July 1988, hal. 28.

²⁹Lawrence B. Krause, *U.S. Economic Policies and Their Impact Upon the Pacific Asian Region*, akan terbit.

²⁵Ibid., hal. 231.

²⁶"The Pacific Century," *Newsweek*, 22 February, hal. 14.

orang agar transisi tersebut berlangsung mulus."³⁰ Oleh karena usulan itu telah semakin dipertegas, semakin jelas terlihat betapa banyak kendala yang harus dihadapi Jepang. Sebagian kendala itu berasal dari luar dan sebagian lagi dari dalam Jepang sendiri dan kesemuanya itu menyulitkan Jepang untuk menjadi kandidat utama, sekiranya ekonomi politik dunia memang lagi mencari tokoh pemegang hegemoni baru. Banyak orang percaya bahwa Jepang adalah suatu "superstate" seperti yang diungkapkan oleh Herman Kahn beberapa tahun yang lampau, namun Jepang tidak akan menjadi sebuah negara adidaya.

Pendapat ketiga berakar pada beberapa pemikiran profetis seperti yang telah disebutkan di atas, namun barangkali pendapat tersebut sebaiknya lebih dilihat sebagai suatu reaksi atas kedua pendapat sebelumnya. Secara khusus pendapat tersebut menolak berbagai argumen yang dilontarkan mereka yang menganggap bahwa Amerika Serikat sedang mengalami kemerosotan. Fokus perhatiannya lebih dititikberatkan pada pembaruan Amerika Serikat dan bukan pada kemerosotannya. Pandangan tersebut menekankan pentingnya perkembangan yang terjadi di kawasan Pasifik dan juga tentang berbagai kesempatan yang dapat diraih Amerika Serikat berkat perkembangan tersebut demi masa depannya. Kotkin dan Kishimoto merupakan dua tokoh pencetus pendapat ketiga ini. Dengan gigih mereka mengungkapkan pemikirannya bahwa Amerika Serikat bahkan mampu mendominasi seluruh gelanggang Pasifik yang lagi tumbuh subur ini dengan memanfaatkan ketahanan sosialnya

serta industrinya yang didorong oleh semangat kewiraswastaannya. Dalam bukunya yang berjudul *The Third Century: America's Resurgence in the Asian Era*, kedua tokoh ini mengatakan bahwa pergeseran titik berat perekonomian memaksa Amerika untuk "menjabarkan kembali ikatan budaya, ekonomi maupun politiknya." Diutarakan pula berbagai cara yang ditempuh Amerika Serikat agar dapat memainkan peran kunci dan menang dalam era Pasifik.³¹ Namun karena mereka itu hanya secara eksklusif memusatkan perhatian mereka pada berbagai tantangan yang sedang dihadapi dunia bisnis, maka tampak betapa buku tersebut kurang mengulas satu hal yang juga tidak kurang pentingnya, yakni peran kebijakan pemerintahan Amerika Serikat dalam menjabarkan kembali pandangan-pandangannya.

Ketiga pendapat di atas masing-masing menuntut kebijakan yang berlainan tentang apa yang sebaiknya dilakukan Amerika Serikat. Namun pada akhirnya ketiga pendapat tersebut harus berhadapan dengan masalah lain yang lebih besar lagi yakni mengenai peran Amerika Serikat dalam ekonomi politik internasional. Harus diingat bahwa masalah utama yang dibicarakan ini adalah mengenai pergeseran geopolitik.

Ada yang memang bersikap skeptis. Sejumlah pengamat berpendapat bahwa apa yang dinamakan abad Pasifik agaknya tidak akan tiba. Christopher Coker mengatakan bahwa pandangan mengenai abad Pasifik itu hanyalah suatu "fiksi politik dan bukan suatu kenyataan, jadi hanya merupakan suatu deskripsi tentang suatu periode dalam sejarah dan bukan tentang suatu era."³² Lebih lanjut, menurut pendapatnya pemikiran

³⁰Kesaksian Lawrence Krause di depan Komisi Ekonomi Gabungan Konggres, 11 Desember 1988, sebagaimana dikutip dalam Kotkin dan Kishimoto, *The Third Century*, hal. 7.

³¹Ibid.

³²Coker, *The Myth or Reality*, hal. 14.

itu telah diciptakan dan dikembangkan oleh berbagai lobi dan kelompok kepentingan di Amerika Serikat, "khususnya pihak angkatan laut yang lebih terpusat pikirannya pada ancaman Soviet dan berbagai industri berteknologi tinggi di Pantai Barat."³³

Menurut pemikiran tersebut tidak mungkin terjadi pergeseran geopolitik mengingat adanya beberapa faktor berikut ini: (a) fokus strategis tidak akan bergeser dari Atlantik Tengah ke kawasan Pasifik, kendati kawasan Pasifik itu telah menjadi suatu kekuatan ekonomi yang menonjol; (b) Amerika Serikat tidak akan mengingkari akar Eropa yang ada dalam dirinya. Walaupun Coker tidak menekankan dikotomi antara Pasifik dan Atlantik dalam pembahasannya mengenai posisi Amerika Serikat, namun ia menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya era Atlantik ternyata tidak dijumpai di Pasifik sekarang ini. Selain dari itu dikemukakannya pula bahwa perbedaan-perbedaan budaya antara Amerika Serikat dan Asia Timur merupakan penghambat besar munculnya *masyarakat* Pasifik. Menurut pendapatnya abad Pasifik akan merupakan suatu ilusi seandainya orang tidak mampu menciptakan suatu masyarakat Pasifik.

Coker menganggap ancaman Soviet dan Perang Dingin merupakan faktor penentu dalam membentuk aliansi Atlantik dan sebaliknya ia pun berpendapat bahwa di kawasan Pasifik sekarang ini tidak ada suatu kerangka kerja apa pun yang dapat mendukung terciptanya kerjasama militer. Sebenarnya apa yang diamati oleh Calleo dan Rowland mendukung arti pentingnya realita militer dan keamanan secara geopolitik dalam bentuk masyarakat Atlantik.³⁴ Sekali-

pun demikian mereka ini berpendapat bahwa visi Amerika mengenai masyarakat Atlantik juga didasarkan atas "imajinasi politik." Visi semacam itu, demikian kata mereka, merupakan "gabungan dari perdagangan bebas dan federalisme ... yang mau tak mau akan disatukan dengan kemauan keras orang Amerika untuk menguasai dan menggurui."³⁵ Yang terakhir ini sebenarnya berakar pada visi geopolitik yang ada di akhir abad ke-19 yang terpusat pada tampilnya Amerika dan kemerosotan Inggris. Para penulis dan politisi yang menganut mashab geopolitik itu tidak hanya Alfred Mahan dan Brooks Adams melainkan pula Theodore Roosevelt yang pernah pula meramalkan akan munculnya Pasifik.

Seperti yang diungkapkan oleh Calleo dan Rowland, aliran geopolitik ini percaya bahwa kepentingan-kepentingan vital Amerika Serikat menuntut peran aktif di bidang militer dan politik baik di kawasan Eropa maupun Pasifik.³⁶ Tujuan utamanya untuk menjauhkan Amerika dari isolasi. Karena itu Theodore Roosevelt sungguh-sungguh menjadi arsitek penting terbentuknya *Pax Americana*. Sesungguhnya, lepas dari faktor-faktor budaya, perkembangan dalam panggung Eropa menjadi faktor penentu yang memungkinkan terbentuknya era Atlantik.

Tidak jelas sebenarnya mengapa untuk membentuk era Pasifik sekarang ini dibutuhkan faktor yang sama dengan faktor pendukung terbentuknya masyarakat Atlantik. Pernah pula dicatat bahwa abad Pasifik barangkali akan berlainan sama sekali dengan abad Atlantik. Sesungguhnya, Coker sendiri mengacu pada pandangan Richard Alstyne, seorang sejarawan Amerika Serikat yang merupakan tokoh penting yang ikut menen-

³³Ibid., hal. 15.

³⁴David P. Calleo dan Benjamin M. Rowland, *America and the World Political Economy* (Bloomington: Indiana University Press, 1973), hal. 44-66.

³⁵Ibid., hal. 17.

³⁶Ibid., hal. 47.

tukan sikap Amerika mengenai Pasifik. Paling tidak sudah tiga puluh tahun yang lalu pernah diungkapkannya bahwa abad Pasifik -- sekiranya akan muncul -- haruslah terutama bertumpu pada kerjasama dan bukan persaingan.³⁷ Dalam arti ini abad Pasifik akan berbeda sekali dengan abad Atlantik. Kotkin dan Kishimoto juga berpendapat bahwa faktor-faktor budaya barangkali tidak lagi memainkan peran penting seperti sebelumnya mengingat masyarakat Amerika sendiri kini lagi berubah dengan pesatnya menjadi "suatu bangsa dunia yang multi-rasial."³⁸

Sekarang ini baik di Amerika Serikat maupun di mana saja belum muncul aliran geopolitik baru. Akan tetapi belakangan ini muncul banyak tulisan yang mengungkapkan anggapan yang sama bahwa yang merangsang orang untuk menciptakan abad Pasifik adalah pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Yang juga dapat dianggap sebagai faktor geopolitik besar lainnya ialah kecenderungan demografis. Menarik memang untuk berspekulasi apakah "pudarnya Eropa" dalam artian demografis akan memberi dampak besar bagi perekonomian dan tatanan politik dunia. Sehubungan dengan persoalan tersebut ada seorang Perancis yang memberi komentar sebagai berikut:

"Hai orang-orang Amerika, mengapa kau tetap menempatkan pasukanmu di Eropa? Apa melulu karena nostalgia? Tidak tahukah kamu bahwa dalam waktu 10 tahun Eropa akan menghasilkan paling tidak 10 juta konsumen baru dalam suatu sistem pasca 1992 yang memungkinkan kau terdepak keluar? ... Dalam pada itu, kawasan Pasifik agaknya akan menciptakan 200 juta konsumen baru. Bukan kah di situ periuk nasimu?"³⁹

³⁷*Queens Quarterly* 65:3 (1958), hal. 623-636, dikutip dalam Coker, "The Myth or Reality," hal. 8.

³⁸Kotkin dan Kishimoto, *The Third Century*.

³⁹Dikutip dari David M. Smick, "An Entrepreneur's Guide to the Pacific Rim Phenomenon," *The Asian Wall Street Journal Weekly*, 12 December 1988.

Kalaupun nanti sungguh-sungguh tumbuh suatu mashab geopolitik baru, entah itu nantinya akan mengarah ke pembentukan abad Pasifik maka mashab tersebut barangkali akan berakar pada visi Jepang yang percaya bahwa kekuatan ekonomi dapat tumbuh berkembang tanpa disertai kekuatan militer. Selain itu, pembangunan yang ada di kawasan Pasifik sekarang ini menunjukkan pengaruh besar dari kekuatan ekonomi terhadap sikap pemerintah. Masalah ekonomi tidak hanya memaksa Cina dan Uni Soviet agar berupaya bekerja sama membangun wilayahnya namun juga memaksa mereka untuk bersama menata kembali masyarakat mereka sendiri. Pertimbangan ekonomi itu pulalah yang mendorong terjalannya kembali hubungan antara Cina dan Indonesia. Barangkali hal itu pula yang akan menjadi faktor penentu dalam memecahkan konflik di semenanjung Korea dan juga di Indocina.

Pada akhirnya mau tak mau Amerika akan mempertimbangkan mana yang lebih menarik, Pasifik ataukah Eropa. Di awal tahun 1989 *The Economist* telah melontarkan suatu pemikiran bahwa barangkali Amerika memang harus memilih di antara Pasifik dan Atlantik.⁴⁰

Namun laporan *The Economist* tersebut dengan gigih mempertahankan pendapat bahwa kebangkitan perekonomian Pasifik tersebut belum cukup mampu menggeser minat Amerika terhadap Atlantik mengingat "uang bukanlah segalanya." Diutarakannya pula bahwa jalinan ekonomi memang penting, namun jalinan-jalinan tersebut hanyalah merupakan suatu transaksi antar pihak swasta yang didasarkan atas motif swasta. Jadi masih diperlukan "hal lain" yang mampu mengubah transaksi ekonomi terse-

⁴⁰"America, Asia and Europe: The Pleasures of Three-part Harmony," *Economist*, 24 December 1988, hal. 29.

but menjadi suatu faktor yang mampu mempengaruhi minat seluruh masyarakat. Dengan mengemukakan kembali pemikiran Coker seperti yang telah dibahas di muka, dalam laporan tersebut disarankan agar "sesuatu lain" yang terpenting itu adalah pergeseran kepentingan keamanan dan politik Amerika Serikat dari Eropa ke Asia.

Lebih lanjut dilaporkan adanya beberapa perbedaan mendasar dalam bidang situasi keamanan militer antara Eropa dan Asia Timur Laut. Sambil tetap berpendapat bahwa Eropa masih merupakan kancah pusat pertarungan antara Timur dan Barat, laporan tersebut juga masih yakin akan sikap Amerika Serikat yang masih tetap lebih condong ke Eropa dalam perhitungan geopolitik. Tambahan pula, demikian kata laporan tersebut, Asia kini sedang mengarah ke suatu zaman yang lebih stabil dan penuh damai sedangkan di tahun 1990-an ini Eropa akan menghadapi suatu pergolakan. Oleh karena itu disimpulkan bahwa dalam waktu mendatang ini sikap Amerika Serikat tidak mungkin berubah.

Namun menurut beberapa pengamat lain arah perkembangan di bidang militer dan keamanan di Pasifik tidaklah jelas. Telah dikemukakan bahwa dilihat dari sudut Amerika Serikat tampaklah bahwa Amerika semakin menganggap penting masalah keamanan di kawasan tersebut karena Uni Soviet mengadakan langkah-langkah diplomatik yang mengarah ke kawasan tersebut. Mereka ini beranggapan bahwa Amerika harus tetap mempertahankan kekuatan militernya yang besar di kawasan Pasifik yang memasuki abad ke-21, sebab kalau tidak maka Uni Soviet akan berbuat seperti itu dan dengan sendirinya hal tersebut akan menghancurkan kepentingan Amerika Serikat sendiri."⁴¹

Kendati apa yang diungkapkan dalam *The Economist* tersebut lebih menekankan supremasi faktor keamanan, namun berbagai pertimbangan ekonomi tidak pula di-kesampingkan. Lebih lanjut dikatakan bahwa perubahan perhatian Amerika Serikat juga bergantung pada politik dalam negerinya. Ditunjukkannya pula dua perkembangan yang barangkali akan mengubah minat Amerika Serikat untuk berpaling dari Eropa dan lebih menaruh perhatian ke Pasifik, terutama barangkali karena dua hal itu mempunyai pengaruh yang kuat pada politik dalam negeri Amerika Serikat. Pertama, perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan Asia akan setara dengan perdagangan antara Amerika Serikat dan Kanada. Kedua, terciptanya suatu "benteng Eropa," yakni bila proyek Masyarakat Ekonomi Eropa untuk tahun 1992 berhasil diraih.⁴²

Relevansi Abad Pasifik

Untuk dapat menjelaskan ataupun meramalkan adanya suatu pergeseran diperlukan suatu analisa yang tidak hanya melihat pada satu faktor penentu. Pergeseran merupakan suatu proses yang dinamis dan akan banyak dipengaruhi oleh aneka ide, pelaku dan juga peristiwa.

Sejak tahun 1988 di Amerika Serikat mulai muncul kembali sejumlah usul kebijakan untuk memberi perhatian lebih besar pada kawasan Pasifik. Suatu gugus tugas yang telah dibentuk oleh Heritage Foundation untuk menangani proyek "Mandate III," telah mendesak pemerintah baru pimpinan Presiden Bush untuk mengalihkan perhatian utama dari Atlantik menuju ke Pasifik dalam menyongsong abad Pasi-

⁴¹ *Newsweek*, "The Pacific Century," hal. 14.

⁴² *Economist*, "America, Asia and Europe," hal. 30.

fik.”⁴³ Sasaran utamanya ialah ”meningkatkan demokrasi dan perdagangan bebas serta memperkuat komitmen Amerika Serikat terhadap keamanan kawasan.” Dalam laporannya, Satuan Gugus Tugas tersebut mengusulkan hendaknya pemerintah baru sekarang ini membentuk suatu forum antar negara Asia dan Amerika Serikat untuk bertemu muka secara teratur membicarakan berbagai masalah bilateral ataupun regional dengan rekan-rekan dan sekutunya di Asia sebagai pengakuan Amerika Serikat akan semakin pentingnya kawasan Asia tersebut bagi dirinya.

Menurut laporan tersebut kawasan Pasifik memiliki dua segi yang penting yakni segi ekonomi dan juga strategi. Dari segi ekonomi Amerika Serikat berjuang keras untuk meningkatkan dan menyeimbangkan perdagangannya dengan Asia. Dan kunci untuk mencapai tujuan ini adalah pengembangan perdagangan yang lebih bebas, khususnya perdagangan bebas bilateral di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Nilai strategis Asia dengan sendirinya meningkat sejalan dengan makin besarnya perhatian Soviet terhadap kawasan tersebut.

Masih perlu diamati lebih lanjut pengaruh usul tersebut terhadap kebijakan-kebijakan Amerika Serikat. Menurut pengakuan The Heritage Foundation kedua laporan yang telah ditulisnya telah berdampak besar pada pemerintahan Reagan.”⁴⁴ Sebelum meninggalkan jabatannya, mantan Menteri Keuangan James Baker konon telah mem-

bentuk suatu proyek rahasia guna menghimpun kelompok yang mengkoordinasikan berbagai kebijakan mengenai perekonomian Pasifik.⁴⁵ Maksudnya ialah untuk membentuk suatu lembaga ekonomi -- semacam G7 atau Kelompok 7 yang terdiri dari negara-negara industri. Kelompok itu nantinya akan terdiri dari Amerika Serikat, Jepang dan beberapa negara industri baru di Asia. Lembaga tersebut bertugas mengkoordinasikan secara lebih baik kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan perdagangan. Rencana ini dianggap sebagai usaha untuk merintis jalan bagi pembentukan pakta dagang antara Amerika Serikat dan Pasifik. Dengan tampilnya James Baker menjadi Menteri Luar Negeri kabinet Bush maka dapatlah dikatakan bahwa pihak eksekutif Amerika Serikat akan lebih memperhatikan kawasan Pasifik.

Pada kenyataannya dari pihak legislatifpun telah muncul berbagai usulan serupa. Pada akhir tahun 1988, Senator Bill Bradley, seorang Demokrat dari New Jersey, mengutarakan garis besar gagasannya mengenai suatu ”koalisi Pasifik.”⁴⁶ Dikemukakannya bahwa alasan utama membentuk koalisi semacam itu adalah adanya kebutuhan mendasak untuk merombak kembali sistem perdagangan multilateral. Menurut pendapatnya, usaha itu menuntut agar kemacetan dalam perundingan mengenai perdagangan didobrak guna mengurangi ketimpangan dalam neraca perdagangan, khususnya bagi Amerika Serikat serta dengan mempromosikan kerjasama yang lebih besar antara negara

⁴³Roger A. Brooks, ”Asia,” dalam *Mandate for Leadership III: Policy Strategies for the 1990s*, ed. Charles L. Heatherly dan Burton Yale Pines (Washington, D.C.: The Heritage Foundation, 1989), hal. 564-581.

⁴⁴Ibid., hal. 11.

⁴⁵Walter S. Mossberg dan Alan Murray, ”Departure of Treasury Secretary Baker would Bring Halt to Initiative in Asia,” *Wall Street Journal*, 3 Agustus 1988, hal. 22.

⁴⁶Pidato Senator Bill Bradley di Kelompok Ekonomi New York, 4 Desember 1988.

berkembang dan negara industri. Paling tidak ada 4 alasan yang dikemukakan Senator Bradley agar Amerika Serikat mulai memusatkan perhatiannya ke Pasifik. Pertama, sudah menjadi suatu kenyataan bahwa di kalangan negara Pasifik sendiri ada ketimpangan besar di bidang perdagangan. Ini berarti berbagai kebijakan yang telah mereka canangkan tampak kurang dikoordinasikan. Kedua, negara-negara di kawasan tersebut amat menggantungkan diri pada kekuatan dan kesehatan sistem multilateral dan karenanya perlu menjadikan mereka itu sekutu alami dalam setiap usaha untuk memperkuat kembali sistem perdagangan yang ada. Ketiga, Eropa akan semakin sibuk dengan proyek 1992-nya sehingga sebaiknya Amerika mencoba mencari usaha lain dengan menjalin hubungan ekonomi sementara Masyarakat Eropa menyusun aneka peraturan baru.

Alasan keempat, sesuai pengamatan Senator Bradley, adalah kenyataan bahwa Pasifik terdiri dari sekelompok negara yang berbeda satu dengan yang lainnya yang dapat pula dianggap sebagai mikrokosmos dunia. Sehubungan dengan itu, diusulkannya agar sebagai langkah awal koalisi tersebut hendaknya terdiri dari anggota GATT di Pasifik dan negara berkembang maupun negara industri dalam jumlah yang sama seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Australia, Meksiko, Korea Selatan, Indonesia dan juga Thailand. Ia percaya bahwa apa yang dinamakan PAC-8 akan merupakan suatu forum yang "mampu dikelola dengan mudah dan dapat menghasilkan suatu persetujuan yang substansial mengenai berbagai masalah ekonomi yang sangat sulit yang memecah belah bangsa-bangsa sekarang ini."

Lebih lanjut diuraikannya pula tugas khusus rangkap tiga dari koalisi tersebut.

Pertama dan yang terutama adalah memperkuat sistem multilateral itu sendiri. Senator Bradley percaya bahwa suatu usulan konsensus dari kelompok yang beraneka ragam ini mengenai perdagangan hasil-hasil pertanian akan semakin mengobarkan semangat Perundingan Uruguay. Kedua, mempererat integrasi ekonomi Pasifik. Pembentukan suatu mata uang Pasifik diharapkan mampu mengurangi kegesitan mata uang yen dan dolar dan dengan demikian akan menciptakan suatu situasi dagang yang lebih dapat dipantau. Ketiga, menciptakan suatu tata hubungan yang lebih erat antara negara berkembang dan negara maju. Termasuk pula antara lain secara kasus per kasus pengurangan hutang negara-negara Dunia Ketiga.

Sebagaimana diamati oleh Senator Bradley, koalisi Pasifik menawarkan suatu strategi untuk mengatasi aneka problem yang paling mendesak yang sedang dihadapi perekonomian dunia saat ini. Koalisi ini juga memberi jalan bagi negara-negara lain untuk ikut memasuki gelombang pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Pada akhir pidatonya, Senator inipun mengatakan: "Orang-orang Amerika selalu mencari peruntungan mereka dengan pergi ke Barat. Kini tibalah saatnya bagi kami untuk pergi ke suatu tempat di mana Barat dan Timur saling bertemu muka. Kini tibalah saatnya bagi kita untuk tidak mempergunakan senjata melainkan ide, tidak untuk mendikte melainkan untuk mendengar, tidak untuk mengalahkan melainkan untuk memimpin ..." Mustahil untuk diramalkan apakah kebijakan seperti itu akan mampu memberi landasan kokoh bagi terciptanya suatu visi geopolitik baru, yang akan mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat di tahun-tahun mendatang. Namun belakangan usulan Alstyne ini akan mempero-

leh dukungan yang lebih kuat sekarang ini dibanding tiga puluh tahun yang lalu.

The Economist meramalkan bahwa bukan suatu pergeseran geopolitik yang akan terjadi melainkan suatu perkembangan baru yakni terbentuknya suatu hubungan segitiga antara Amerika Serikat, Asia Timur dan Eropa. Maka agenda bagi dunia adalah usaha mengembangkan hubungan segitiga yang selaras dan serasi antar ketiga pusat kelompok tersebut. Laporan itu juga menentang gagasan mengenai multiporalitas, malahan menganjurkan Amerika Serikat untuk tetap menjadi pemimpin. Di bagian akhir ditulis hal yang mendua sekali sifatnya karena disebutkan: "Sekarang ini, syarat minimal tercapainya suatu tata tertib global ... bergantung pada kesediaan Amerika Serikat untuk mau melanjutkan apa yang telah dirintisnya sejak 1945."⁴⁷

Bahkan sekiranya skenario *The Economist* itu masuk akal, kiranya tetap relevan bagi Amerika Serikat untuk memberi fokus pada "Abad Pasifik" dalam rumusan kebijakannya. Fokus itu agaknya juga masih amat relevan bagi kawasan secara keseluruhan, khususnya selama dunia masih berupaya menemukan suatu tatanan ekonomi politik internasional yang baru. Fokus ini dan juga beberapa usaha untuk mengkoordinasikan kebijakan trans-Pasifik memang diperlukan untuk memperkokoh "kaki Pasifik" dalam hubungan segitiga global tersebut. Suatu koalisi Pasifik atau kerjasama Pasifik jenis apapun boleh jadi merupakan ungkapan adanya "pembagian beban" dan koordinasi kebijakan antara Amerika Serikat dan negara-negara Pasifik lainnya yang diperlukan untuk menciptakan suatu tatanan dunia baru.

⁴⁷*Economist*, "America, Asia and Europe," hal. 36.

Robert Gilpin melihat fenomena Pasifik itu sebagai suatu kekuatan besar yang akan membentuk suatu tatanan ekonomi internasional untuk beberapa dekade mendatang.⁴⁸ Linder percaya bahwa fenomena Pasifik ini kini sedang menggairahkan kembali seluruh dunia.⁴⁹ Agaknya tepat pula apa yang dikatakan Kiyoshi Kojima ketika beberapa tahun yang lampau mengatakan "orang menaruh harapan besar pada abad Pasifik sebagai landasan baru bagi perekonomian dunia."⁵⁰ Jika Amerika Serikat dapat mengambil dari pemberian fokus Pasifik ini dalam kebijakan luar negerinya, maka barangkali yang justru lebih berkepentingan terhadap fokus semacam itu adalah Jepang sendiri mengingat Jepang kini lagi berupaya memainkan peran yang lebih besar dalam dunia internasional sejalan dengan kekuatan ekonominya. Selama tahun-tahun silam Jepang tidak pernah kekurangan ide dan usul. Sesungguhnya hal-hal yang mendesak Jepang untuk berbuat demikian agaknya akan semakin membesar di tahun-tahun mendatang.

Sudah barang tentu fokus abad Pasifik ini berpengaruh pada perkembangan di kawasan itu sendiri. Ambisi yang lebih besar tidak dengan sendirinya akan menggairahkan kawasan ini. Ini juga tidak berarti bahwa Pasifik yang terdiri dari begitu banyak negara yang berbeda satu sama lain akan lebih mudah dapat diatur. Akan tetapi pengaruh itu dapat saja terjadi. Namun untuk menciptakan hasil-hasil positif, dinamika internal di kawasan itu sendiri secara politik, ekonomi dan barangkali juga keseja-

⁴⁸Gilpin, *The Political Economy*, hal 5-6.

⁴⁹Linder, *The Pacific Century*, hal. 3-4.

⁵⁰Kiyoshi Kojima, *Economic Cooperation in a Pacific Community* (Tokyo: Japan Institute of International Affairs, 1980), hal. 2.

jaran di bidang keamanan dan militer masih perlu diteliti dan dimengerti dengan lebih baik dan seksama.

Bagaimana sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya mengatur Pasifik, tidak semata bergantung pada misi global seperti anggapan orang melainkan pula bergantung pada kondisi masing-masing peserta itu sendiri. Selama kurun waktu hampir sepuluh tahun ini sudah beberapa usulan besar dilontarkan mengenai cara mengatur Pasifik. Namun apa yang diungkapkan oleh salah satu negara industri baru di Asia seperti dikutip berikut ini menunjukkan bahwa masih ada banyak hal yang perlu dibenahi. "Pada awal mulanya orang-orang Jepang melontarkan berbagai usul kepada kami, dan kini orang Amerika pun mulai bangkit. Akan tetapi mengapa sekarang ini belum ada orang menanyakan kami apakah kami memang berminat terhadap segala bimbingan mereka yang luar

biasa hebat ini?"⁵¹ Sudah barang tentu tidaklah tepat menganggap bahwa Jepang dan Amerika tidak mempertimbangkan pendapat orang lain. Masalahnya ialah orang-orang lain itu belum cukup menyuarakan pemikiran-pemikiran mereka dalam forum-forum regional yang ada sekarang ini. PECC (*Pacific Economic Cooperation Conference*) dan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) merupakan dua forum regional yang paling menonjol saat ini. Kedua forum tersebut mencakup sejumlah besar negara yang ada di kawasan Pasifik, dan merupakan landasan bagi pengorganisasian Pasifik dan pembentukan "koalisi Pasifik" yang dapat mengambil peran dalam ekonomi politik internasional dalam tahun 1990-an ini maupun di abad ke-21.

⁵¹Smick, "An Entrepreneur's."

Kerjasama Ekonomi Pasifik dan Indonesia*

Suhadi MANGKUSUWONDO

Pertumbuhan dan Saling Ketergantungan yang Makin Kuat

DASAWARSA 1980-an yang lalu membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat pada banyak negara Asia Timur dan Tenggara. Bahkan sebenarnya di bagian dunia ini pembangunan ekonomi berlangsung dalam beberapa gelombang yang berurutan semenjak berakhirnya Perang Dunia II. Gelombang pertama pertumbuhan ekonomi yang pesat dimulai oleh Jepang dalam dasawarsa 1950-an dan 1960-an, yang diikuti oleh gelombang kedua pada dasawarsa 1970-an dari pembangunan Negara-negara Industri Baru (NIB) Asia, dan disusul gelombang ketiga di pertengahan kedua dasawarsa 1980-an pembangunan

RRC dan ASEAN. Rakyat di negeri-negeri ini mungkin sekarang terbiasa menyaksikan tumbuhnya perekonomian mereka dari tahun ke tahun dan karenanya cenderung memandang perluasan ekonomi sebagai hal biasa.

Anggapan demikian jelas terlalu picik dan seenaknya, karena perekonomian yang mengalami pertumbuhan pesat untuk jangka waktu yang lama akhir-akhir ini hanya dapat ditemukan di sejumlah terbatas negara, terutama di Asia Timur dan Tenggara. Banyak negara berkembang di bagian dunia yang lain, khususnya di Afrika dan Amerika Latin, mengalami kesulitan besar untuk melepaskan diri dari keadaan tertekan selama lebih dari satu dasawarsa. Untuk sebagian besar rakyat di negeri-negeri itu keadaan stagnasi telah menjadi pengalaman sehari-hari, dan kebanyakan dari mereka harus menderita penurunan tingkat pendapatan yang terus-menerus.

Penampilan yang kontras antara perekonomian Asia di satu pihak dan perekonomi-

*Diterjemahkan oleh Sunarto Ndaru Mursito dari makalah Suhadi Mangkusuwondo "Pacific Economic Cooperation and Indonesia" yang disampaikan dalam suatu kuliah umum yang diselenggarakan oleh The International Development Center of Japan (IDCJ), Tokyo, 23 Maret 1990.

an Afrika dan Amerika Latin di lain pihak belakangan ini menarik banyak perhatian. Semakin banyak pengkajian dilakukan untuk memahami sebab-sebab yang mendasari pengalaman yang berbeda itu. Konsensus yang muncul di antara para ekonom tampaknya menyimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintahlah sebagai faktor terpenting yang menyebabkan berbedanya penampilan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang.

Negara-negara Asia Timur dan Tenggara berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi mereka melewati dasawarsa penuh gejolak 1970-an dan melewati resesi awal dasawarsa 1980-an, terutama karena mereka melakukan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk meraih manfaat maksimal dari keuntungan perdagangan internasional. Tatkala masa-masa sulit datang menjelang berakhirnya tahun 1970-an dan permulaan tahun 1980-an, negara-negara ini cepat menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan pada pembeli dalam negeri saja untuk menjadi tempat pemasaran yang memadai kalau mereka ingin meneruskan perkembangan sektor industri mereka yang baru tumbuh. Bagi perekonomian yang kecil seperti Singapura, Hongkong, dan Taiwan kesadaran ini timbul secara alamiah, tetapi bagi masyarakat ekonomi yang lebih besar seperti Thailand, Filipina, dan Indonesia ternyata kesadaran untuk menyesuaikan diri pun tidak membutuhkan waktu lama.

Negara-negara ini secara hampir bersamaan memutuskan bahwa penyesuaian-penyesuaian struktural dan pembaruan-pembaruan kebijakan harus dijalankan menghadapi resesi dan perubahan-perubahan struktur perdagangan internasional yang menyertainya. Yang terpenting di antara ke-

bijakan pembaruan adalah pembaruan dalam kebijakan perdagangan. Semua negara ini sebelumnya menjalankan kebijakan-kebijakan perdagangan protektif berorientasi ke dalam negeri, yang bertujuan mendorong berkembangnya industri manufaktur di dalam negeri. Sekarang, untuk menjamin pertumbuhan yang berkesinambungan mereka memutuskan untuk menembus pasaran internasional juga. Satu persyaratan untuk itu adalah peningkatan daya saing industri dalam negeri. Oleh karena itu, perubahan dalam kebijakan-kebijakan perdagangan dan industri adalah perlu untuk mendorong peningkatan masuknya modal, keahlian (ilmu) dan teknologi, dan meningkatkan efisiensi dengan memberi lebih banyak peluang persaingan dalam perekonomian nasional.

Jadi suksesnya perekonomian Asia Timur dan Tenggara dapat dikatakan akibat kebijakan perdagangan mereka yang berorientasi ke luar negeri dan kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengannya. Akan tetapi keberhasilan kebijakan-kebijakan itu dapat diragukan, kalau pasaran-pasaran utama di negara-negara industri maju tidak bertambah besar dan tidak menyerap peningkatan ekspor dari kawasan itu. Khususnya pasaran luas AS dan sedikit banyak pasaran Eropa Barat, merupakan penyerap penting untuk perkembangan ekspor Asia, terutama ekspor barang-barang manufaktur, selama masa-masa sulit tahun 1970-an dan 1980-an. Bahkan ketika timbul sentimen-sentimen proteksionis di AS dan Eropa Barat, ekspor dari Asia Timur dan Tenggara masih terus tumbuh mengesankan yang dengan demikian memungkinkan negara-negara di situ mempertahankan pertumbuhan mereka yang pesat.

Dengan mengakui pentingnya peranan pasaran negara-negara industri utama, khu-

susnya AS, orang harus juga mengakui bahwa sementara perekonomian mereka berkembang, negara-negara Asia Timur dan Tenggara ini sendiri juga meningkat impornya secara substansial, dan dengan demikian menciptakan pasaran-pasaran baru untuk volume perdagangan dunia yang semakin besar. Maka di saat kita memasuki dasawarsa 1990-an, perdagangan di antara negara-negara Asia Pasifik menjadi jauh lebih seimbang daripada satu dasawarsa sebelumnya. Peranan pasar AS, meskipun masih sangat penting, tidak lagi sedominan seperti sebelumnya.

Ini dapat diperlihatkan misalnya dengan kasus Indonesia. Selama bertahun-tahun Amerika merupakan pasar utama untuk ekspor Indonesia. Akan tetapi, sejak kira-kira 5 tahun yang lalu Jepang telah menjadi pasar yang terbesar. Bahkan kalau kita mengecualikan minyak dan gas bumi, sekarang Jepang adalah pasar terbesar untuk ekspor Indonesia. Pada tahun 1989 bagian Jepang dalam ekspor non-migas Indonesia adalah sekitar 26% dibanding bagian AS, pasar terbesar kedua, sebesar 15%. NIB Asia dan ASEAN juga telah muncul sebagai pasaran-pasaran yang besar. Ekspor ke negara-negara ini menunjukkan pertumbuhan mengesankan selama 5 tahun terakhir. Oleh karena itu, dalam tahun 1990-an negara-negara Asia Timur dan Tenggara, termasuk Jepang, akan menjadi mitra-mitra dagang Indonesia yang terpenting.

Apa artinya semua ini ialah bahwa perekonomian Asia Timur dan Tenggara telah berhasil mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi selama masa-masa yang sulit, oleh karena pertama, berkonsentrasi pada produk-produk manufaktur dan kedua, konsentrasi ekspor ke sejumlah negara Asia-Pasifik tertentu. Ini berarti terjadi pening-

katan saling ketergantungan di antara perekonomian negara-negara ini selama satu setengah dasawarsa terakhir. Perdagangan mereka telah menjadi lebih terkonsentrasi di dalam kawasan ini.

Angka-angka statistik, misalnya, menunjukkan bahwa perekonomian negara-negara PECC (*the Pacific Economic Cooperation Conference* yang meliputi 15 negara plus pulau-pulau di Pasifik) mengekspor 65,8% dari seluruh ekspor mereka pada 1988 ke kawasan ini, yaitu meningkat dari 54,4% pada 1970. Ekspor dunia ke negara-negara PECC meliputi sebesar 38,7% dari seluruh jumlah ekspor dunia, meningkat dari 31,4% pada 1970. Bagian ekspor Jepang ke kawasan PECC dari keseluruhan eksportnya meningkat dari 61,3% menjadi 66,8% (pada 1970 ke 1988), bagian Kanada meningkat dari 70,0% menjadi 82,2%, bagian AS dari 40,1% menjadi 50,6%, bagian Singapura dari 59,3% menjadi 72,7% dan bagian Indonesia dari 80,5% menjadi 83,2%.

Sebagaimana sudah disebutkan di atas, semakin berkonsentrasinya perdagangan ke dalam kawasan telah memungkinkan negara-negara Asia Timur dan Tenggara mempertahankan tingkat pertumbuhannya, tetapi dengan demikian juga meningkatkan kerawanan mereka. Itu berarti bahwa bila terjadi kegoncangan ekonomi atau politik yang tak terduga di kawasan, mereka tidak mudah beralih ke pasaran-pasaran alternatif di luar kawasan, ke Eropa Timur atau Barat, ke Amerika Latin atau Afrika, jikalau negara-negara lain ini tidak berhasil mempercepat tingkat pertumbuhan mereka secara substansial. Maka itu merupakan kepentingan jangka panjang negara-negara Asia, bahwa kawasan-kawasan dunia yang lain juga mengembangkan perekonomian mereka bersama dengan perekonomian Asia-Pasifik.

Kebutuhan untuk Kerjasama dalam Kawasan

Pertumbuhan yang pesat disertai oleh perubahan-perubahan cepat dalam struktur industri. Ini berimplikasi terus terjadinya perubahan keunggulan komparatif dari perekonomian Asia-Pasifik, yang menyebabkan terus terjadinya perubahan komposisi impor dan ekspor mereka. Maka pertumbuhan yang pesat selain diiringi oleh meningkatnya volume juga oleh terus berubahnya pola perdagangan.

Maka tidaklah mengherankan jikalau, ketika saling ketergantungan di antara ekonomi-ekonomi Asia-Pasifik meningkat, orang menjadi makin menyadari keperluan untuk menjamin kelancaran dan kontinuitas tukar-menukar barang, modal, keahlian, dan teknologi di antara negara-negara ini. Makin lama semakin banyak orang melihat adanya kebutuhan akan suatu mekanisme atau forum yang dapat menjadi saluran komunikasi yang teratur di antara pemerintah-pemerintah maupun di antara sektor-sektor swasta, untuk menjamin agar arus perdagangan, penanaman modal, dan alih teknologi di kawasan ini dapat berlangsung tanpa hambatan. Satu keprihatinan khusus adalah kembali munculnya proteksionisme dan meningkatnya usaha melakukan tindakan pembalasan dalam perdagangan.

Sejumlah prakarsa telah diambil, bermula sejak 1960-an, untuk menciptakan mekanisme kerjasama dalam bidang perdagangan, keuangan, dan bidang-bidang lain, oleh organisasi-organisasi swasta, pemerintah, maupun para akademisi. Yang terakhir, dan yang paling penting di antaranya, adalah pertemuan tingkat menteri dari 12 negara Asia-Pasifik yang diadakan di Canberra, Australia, pada 6 sampai 7 November 1989.

Pertemuan itu yang dikenal sebagai pertemuan para menteri APEC (*the Asia Pacific Economic Cooperation*) merupakan usaha serius yang pertama oleh pemerintah-pemerintah untuk memikirkan kemungkinan menciptakan suatu forum antar pemerintah guna konsultasi dan kerjasama dalam bidang-bidang yang menjadi kepentingan kawasan. Beberapa kesepakatan di antara para partisipan telah dicapai pada pertemuan di Canberra, yang terpenting adalah mengenai perundingan perdagangan multilateral yang sedang berlangsung (*the Uruguay Round*).

Dalam pernyataan mereka yang disiarkan di akhir pertemuan, para menteri menyatakan bahwa setiap negara yang diwakili pada pertemuan itu sangat mengandalkan ekonominya pada sistem perdagangan multilateral yang kuat dan terbuka, dan tak satu pun memikirkan agar Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) diarahkan untuk membentuk suatu blok perdagangan. Para menteri menyampaikan dukungan yang kuat untuk penyelesaian Uruguay Round yang berhasil dan tepat pada waktunya. Mereka berpendapat bahwa banyak yang masih harus dilakukan jika penutupan Desember 1990 yang sukses mau dicapai. Sebab itu, mereka sepakat agar para menteri yang mengurus kebijakan perdagangan hendaknya mengadakan pertemuan di awal September 1990 untuk mendiskusikan hasil-hasil yang telah dicapai dan memikirkan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang ada demi suatu hasil MTN (*Multilateral Trade Negotiations*) yang komprehensif dan ambisius. Maka mereka akan mengadakan pertemuan lagi di Brussel pada awal Desember menjelang sidang penutupan Uruguay Round. Sementara itu, para pejabat senior akan berkonsultasi secara teratur di Geneva untuk bertukar pandangan demi kemajuan MTN.

Bagi Indonesia, dan kebanyakan negara berkembang, kesepakatan yang dicapai di Canberra mengenai masalah perdagangan multilateral adalah sangat penting. Indonesia menilai bahwa pembentukan suatu blok perdagangan di Asia-Pasifik tidak akan menguntungkan kepentingan jangka panjangnya. Untuk menjamin agar pertumbuhan ekonominya dapat dipertahankan, Indonesia membutuhkan akses berkesinambungan tidak hanya memasuki pasaran AS, Jepang, dan NIB Asia melainkan juga memasuki pasaran Eropa Barat dan Timur, Amerika Latin, dan juga bagian-bagian dunia yang lain. Pembentukan suatu blok perdagangan regional mungkin akan mendorong blok-blok perdagangan yang lain melakukan tindakan-tindakan dagang yang diskriminatif. Indonesia tidak akan mendapat keuntungan dari suasana perdagangan demikian, dan perdagangan dunia pun akan menderita. Kesepakatan yang dicapai di Canberra untuk mengadakan usaha-usaha bersama mempertahankan dan memantapkan sistem perdagangan multilateral GATT, oleh karenanya, sangat sejalan dengan strategi perdagangan Indonesia.

Ini tidak berarti bahwa telah ada kesepakatan sepenuhnya di antara negara-negara Asia-Pasifik mengenai pemecahan segala masalah dalam agenda Uruguay Round mengenai MTN yang sedang berlangsung. Sejumlah persoalan perlu segera dipecahkan jika Uruguay Round mau ditutup dengan sukses pada akhir 1990. Satu persoalan yang penting bagi Indonesia adalah perniagaan tekstil. Karena Indonesia masih berada pada tahap awal industrialisasi, maka tekstil dan pakaian jadi memainkan peranan sangat penting dalam kegiatan ekspornya. Sebab itu, pembatasan-pembatasan yang sekarang ada pada tata niaga tekstil memasuki pasaran-pasaran utama di bawah pengatur-

an MFA (*Multifiber Arrangements*) perlu diperlonggar, dan tata perdagangan tekstil hendaknya dikembalikan ke dalam sistem GATT. Sangatlah penting bagi Indonesia bahwa dapat segera dicapai kesepakatan mengenai berapa lamanya dibutuhkan waktu untuk mengintegrasikan perdagangan tekstil ke dalam sistem GATT dan mengenai tata cara proses transisi itu.

Persoalan lain yang penting adalah mengenai komoditas pertanian. Pada dasarnya Indonesia dapat menyetujui gagasan supaya perdagangan komoditas pertanian juga secara bertahap dimasukkan dalam sistem GATT. Meskipun begitu, menyangkut bahan pangan pokok, seperti padi, Indonesia memberi prioritas tinggi dalam keseluruhan rencana pembudidayaannya demi menjamin pemasokannya yang memadai. Pemenuhan pasok bahan pangan ini menentukan stabilitas negara, di mana tanpa stabilitas politik maupun ekonomi tidaklah dimungkinkan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, harus dibenarkan adanya bantuan Pemerintah kepada sektor pertanian, termasuk subsidi-subsidi seperti subsidi pupuk atau kredit dengan syarat lunak bagi para petani, khususnya para petani padi.

Lagi persoalan lain adalah produk-produk tropis, termasuk buah-buahan tropis, kayu tropis, dan minyak atau lemak tropis. Karena produk-produk tropis kebanyakan dihasilkan oleh negara-negara yang sedang berkembang, seharusnya negara-negara yang telah maju dapat menyetujui menghapuskan semua hambatan tarif dan non-tarif atas impor mereka pada produk-produk ini, termasuk bahan yang telah diolah atau setengah diolah.

Persoalan-persoalan lain yang menjadi kepentingan kebanyakan negara industri

maju meliputi hak-hak milik intelektual (IPR - *Intellectual Property Right*) dan perdagangan jasa-jasa. Berkenaan dengan perlindungan IPR, kebanyakan negara yang sedang berkembang berkepentingan dengan berlanjutnya akses pada teknologi, dan ingin agar perlindungan IPR tidak akan menjadi sarana untuk membatasi alih teknologi kepada negara-negara ini. Menyangkut perdagangan jasa-jasa, beberapa sektor jasa mempunyai kepentingan strategis untuk pembangunan mereka, dan bahkan esensial untuk keamanan nasional mereka. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa kebanyakan negara yang sedang berkembang enggan untuk memberi kebebasan penuh kepada perusahaan-perusahaan asing mendirikan industri-industri jasa di negara mereka.

Itulah beberapa persoalan yang menonjol pada MTN sekarang ini. Sebagaimana telah dinyatakan, adalah menggembirakan bahwa Pertemuan APEC di Canberra telah bersepakat untuk melakukan usaha-usaha bersama agar MTN sekarang ini menuju suatu penutupan yang sukses. Seyogianya semua pihak yang berkepentingan mendukung usaha yang penting ini.

ASEAN dan Kerjasama Ekonomi Pasifik

Kesepakatan mengenai pendirian bersama tentang MTN GATT merupakan prestasi penting dari Pertemuan APEC di Canberra. Namun pertemuan ini tak berhasil memecahkan masalah bagaimana melembagakan APEC. Satu kesukarannya berasal dari kekhawatiran ASEAN akan kemungkinan menurunnya landasan kerjasama ASEAN sendiri.

Negara-negara anggota ASEAN, atau setidaknya Indonesia, selalu meman-

dang kerjasama ASEAN sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negeri mereka. ASEAN, sejak dari awalnya, telah berhasil menciptakan suatu lingkungan yang stabil dan damai di kawasan. Berdasarkan ini negara-negara anggotanya dimungkinkan melaksanakan program-program pembangunan nasionalnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyatnya. Maka ASEAN diakui mempunyai arti strategis, karena tanpa ASEAN tidak akan ada stabilitas di kawasan dan tanpa stabilitas tidak akan ada kemakmuran. Meskipun hasil-hasil dalam kerjasama perdagangan, industri, dan bidang-bidang yang lain sejauh ini sangat tidak memenuhi harapan, namun ASEAN mempunyai arti vital dalam konteks keseluruhan kebijakan luar negeri dari kawasan ini.

Itulah alasan mengapa Indonesia, misalnya, mengkhawatirkan kemungkinan menurunnya atau melemahnya kerjasama ASEAN jika ASEAN bergabung dalam suatu kelompok kerjasama yang lebih besar seperti APEC. Terutama jika APEC didominasi oleh salah satu atau kedua raksasa ekonomi: Jepang dan Amerika, adalah bahaya bahwa ASEAN akan kehilangan identitasnya dan dengan itu hilang pula perekat yang mengikat mereka selama ini.

Orang harus melihat ketakutan ini tidak sebagai melulu *xenophobia*, karena bagaimanapun ASEAN, sebagai suatu asosiasi, masih relatif muda. Dia membutuhkan pemupukan yang terus-menerus oleh semua negara anggotanya untuk melawan tekanan-tekanan dari luar baik ekonomi maupun politik yang mungkin memecah-belah mereka. Barangkali diperlukan waktu lebih daripada satu generasi sebelum solidaritas regional berakar dan menjadi kesadaran nasional dalam masyarakat ASEAN pada umumnya.

Amerika Serikat dan Jepang tampaknya amat menyadari kepekaan di ASEAN tersebut. Kedua negara raksasa ekonomi ini sangat hati-hati dalam pendekatannya untuk pembentukan suatu forum Pasifik, dan menghindari timbulnya kesan bahwa mereka akan memaksakan hegemoni mereka di kawasan. Maka bukanlah merupakan kesempatan semata bahwa kesempatan diberikan kepada Australia, sebagai negara berkekuatan sedang, untuk mengambil inisiatif menyelenggarakan Pertemuan APEC Pertama yang dihadiri para delegasi bertingkat menteri.

Selama acara diskusi-diskusinya, para menteri APEC memberi perhatian pada kekhawatiran ASEAN, antara lain, dengan menyetujui bahwa salah satu prinsip dalam usaha kerjasama Asia-Pasifik ialah komitmen untuk membuka dialog terbuka dan konsensus, dengan penghargaan yang sama terhadap pandangan dari semua anggotanya. Selain itu, disetujui bahwa dalam kerjasama akan diakui adanya keanekaragaman di kawasan, termasuk perbedaan sistem sosial dan ekonomi serta tingkat perkembangan masing-masing.

Mengenai kelembagaan APEC, ASEAN lebih suka menggunakan mekanisme dialog yang sudah ada antara ASEAN dan mitra-mitra dialognya, yang lazim disebut PMC (*Post-Ministerial Conference*), sebagai forum untuk konsultasi-konsultasi APEC. PMC bertemu setiap tahun, dihadiri oleh para menteri luar negeri enam negara ASEAN dan para mitra dialognya: AS, Eropa Barat, Jepang, Kanada, Australia, dan New Zealand. Dalam pandangan ASEAN, forum ini hendaknya digunakan untuk melakukan konsultasi-konsultasi APEC, dengan ditambah anggota baru seperti Korea.

Sebagaimana disebutkan di depan, tidak tercapai persetujuan final pada pertemuan di Canberra menyangkut masalah kelembagaan ini. Sekalipun demikian, pertemuan menyepakati agar kerjasama sebaiknya melengkapi dan berpangkal pada, dan tidak memperkecil arti, organisasi-organisasi yang telah ada di kawasan, termasuk badan-badan resmi antar pemerintah seperti ASEAN maupun badan-badan konsultasi tidak resmi seperti Konperensi Kerjasama Ekonomi Pasifik (PECC). Dengan pengertian itu, semestinya dapat segera dicapai suatu persetujuan mengenai pendirian organisasi APEC, dengan kaitan kerjasama yang erat dengan ASEAN, PECC, dan lembaga-lembaga serupa yang lain yang ada di kawasan.

Masalah keanggotaan merupakan persoalan lain yang sulit. Karena APEC adalah suatu badan antar pemerintah, dapatlah dimengerti bahwa tidak akan mudah memutuskan negara-negara mana akan diperbolehkan untuk ikut serta. Tak seorang pun akan meragukan pentingnya perdagangan Cina, Hongkong, dan Taiwan di kawasan. Akan tetapi, masih perlu ditemukan suatu perumusan yang dapat disetujui oleh semuanya untuk mengikutsertakan ketiga negara ini. Partisipasi Uni Soviet dalam APEC bahkan barangkali akan lebih sulit lagi diputuskan. Beberapa negara Amerika Latin pun telah menyatakan minatnya turut bergabung, tetapi anggota-anggota lain masih harus memberikan persetujuannya berdasarkan kuatnya kaitan-kaitan ekonomi mereka dengan kawasan ini.

Atas dasar pengalaman yang lalu, pemerintah-pemerintah memerlukan banyak waktu untuk menyetujui masalah-masalah yang peka secara politik seperti itu. Karena alasan itu adanya organisasi-organisasi non-

pemerintah, seperti PECC, besar artinya karena sebagai lembaga non-pemerintah jauh lebih mudah membuat keputusan mengenai keanggotaan. Negara-negara yang berkepentingan ekonomis dengan kawasan secara mudah dapat bergabung dalam PECC dan ikut aktif dalam berbagai kegiatan yang menyangkut masalah-masalah kawasan, sebelum APEC dapat memutuskan untuk mengikutsertakan mereka atau tidak dalam kegiatan resmi APEC. Ciri PECC yang *tri-partit* dan informal memungkinkan forum ini lebih bebas mendiskusikan kebijakan-kebijakan dan permasalahan-permasalahan, dan karenanya dapat berperan sebagai pelengkap yang berguna bagi sistem konsultasi APEC yang lebih resmi. Semua ini berarti bahwa jalan yang terbaik untuk mengatur kerjasama regional di Asia-Pasifik adalah mengaitkan berbagai organisasi dan forum, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam suatu jalinan organisasi-organisasi yang saling menunjang.

Perkembangan-perkembangan di Eropa Timur

Perubahan-perubahan besar sedang berlangsung di Eropa Timur. Seluruh dunia dengan penuh perhatian menyaksikan pesatnya perubahan ekonomi dan politik di kawasan Eropa. Tak seorang pun memperkirakan bahwa perubahan yang demikian mendasar dan besar akan terjadi dalam jangka waktu yang begitu singkat. Negara-negara di Asia-Pasifik sudah seharusnya memikirkan implikasi-implikasi apakah yang akan ditimbulkan oleh perkembangan.

Sejauh menyangkut Indonesia, terbukanya pasaran Eropa Timur memberikan peluang baru untuk peningkatan substansial ekspor ke kawasan itu. Ini merupakan peru-

bahan yang sewajarnya disambut gembira karena memungkinkan negara-negara seperti Indonesia mendiversifikasikan pasaran ekspornya, yang pada gilirannya akan menguatkan basis ekspornya. Diperkirakan bahwa suatu Eropa Timur yang lebih berorientasi pasar akan menyerap volume barang dagangan lebih besar yang dapat disediakan Indonesia secara kompetitif, seperti minyak nabati, sabun maupun deterjen, dan alat-alat kecantikan. Beberapa perusahaan Indonesia baru-baru ini sudah menandatangani suatu persetujuan usaha patungan dengan rekan usahanya di Uni Soviet, untuk mendirikan industri di negara itu guna mengolah bahan mentah minyak sawit dari Indonesia. Berbagai macam barang konsumsi dapat dihasilkan dari minyak kelapa sawit yang bisa dipasarkan di Uni Soviet. Usaha-usaha serupa dapat dilakukan, misalnya dalam industri-industri berbahan mentah karet atau hasil pertanian yang lain.

Sementara keprihatinan telah terungkap atas kemungkinan berkurangnya arus modal dari Eropa Barat ke Indonesia, jikalau para investor dan pemerintah di Eropa Barat memfokuskan perhatian mereka pada pasar Eropa Timur yang sangat potensial. Mungkin ada dasar riil untuk keprihatinan ini, meskipun masih belum pasti bahwa arus modal ke Asia-Pasifik akan merosot secara substansial. Prospek untuk pertumbuhan kuat secara berkesinambungan di kawasan ini adalah sangat baik. Untuk jangka pendek sampai menengah peluang-peluang bisnis dan investasi di seluruh kawasan Asia Timur dan Tenggara mungkin tetap menarik bagi para investor potensial.

Bahkan walaupun daya tarik Eropa Timur menjadi terlalu kuat, negara-negara di bagian dunia sini seharusnya dapat mengerahkan cukup tabungan dari dalam ka-

wasan sendiri. Tingkat tabungan di seluruh perekonomian Asia Timur dan Tenggara yang bertumbuh pesat telah berkembang secara berarti. Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi makro maupun mikro yang tepat, tabungan ini dapat ditingkatkan lebih lanjut, dan negara-negara berkembang di kawasan yang masih membutuhkan impor modal untuk membiayai pembangunannya, tidak akan menghadapi kendala-kendala sumber yang serius.

Sebagai kesimpulan, perekonomian kawasan Asia-Pasifik tampaknya siap untuk terus tumbuh dalam tahun 1990-an. Saling ketergantungan yang meningkat menyebabkan negara-negara ini mengembangkan ker-

jasama di antara mereka, untuk menjamin agar perdagangan dan investasi terus meluas dengan hambatan yang minimal. Indonesia dan ASEAN seharusnya menemukan jalan untuk menyesuaikan tata kerjasama sub-regionalnya sendiri di dalam lingkup kerjasama Asia-Pasifik yang lebih luas, tanpa kehilangan makna dan kepentingan kerjasama ASEAN. Partisipasi negara-negara Asia-Pasifik seharusnya diperluas di masa depan berdasarkan kekuatan perkaitan ekonomi mereka dengan kawasan. Perubahan akhir-akhir ini yang terjadi di Eropa Timur seharusnya disambut baik, karena memperluas dan menguatkan basis untuk pertumbuhan berkelanjutan perekonomian dunia di waktu mendatang.

Dialektika Paradigma Hubungan Internasional: Aliansi Atlantik dan Kawasan Pasifik

Bantarto BANDORO

TULISAN ini mencoba melihat dasar-dasar yang membentuk paradigma aliansi Atlantik dan paradigma Pasifik serta interaksi antara kedua paradigma itu. Sebagai titik tolak, analisis akan difokuskan pada dua konsep sentral yang telah sejak lama menjadi dasar dari dua bidang studi hubungan internasional, yaitu ekonomi internasional dan keamanan internasional. Bidang studi yang disebut pertama terutama didasarkan atas gagasan liberalisme internasional, di mana negara-negara liberal, terutama Amerika Serikat dan Eropa Barat, dianggap sebagai pendukung utama kekuatan pasar dalam ekonomi internasional.¹ Pola

¹Munculnya kembali liberalisme ekonomi pada dasarnya merupakan hasil dari tujuan kekuatan dan kebijakan luar negeri negara kapitalis dominan, yaitu Amerika Serikat. Jadi konstruksi orde pasca perang yang didasarkan atas prinsip-prinsip liberal merupakan kepentingan nasional Amerika Serikat pada waktu itu karena ia dianggap memiliki ekonomi terbesar dan terkuat serta dana cadangan terbesar. Lebih lanjut lihat Stephen Gill dan David Law, *The Global Political Economy, Perspective, Problems and Policies* (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1988), hal. 31.

semacam ini mungkin dapat disamakan dengan model GATT.

Sedangkan yang selama ini diakui sebagai dasar dari bidang studi keamanan internasional adalah penangkal yang diperluas (*extended deterrence*).² Menurut konsep ini Amerika Serikat mencoba membendung kemungkinan agresi militer Uni Soviet, terutama di Eropa Barat, dengan ancaman eskalasi nuklir sebagai tanggapan. Bentuk penangkal semacam ini muncul oleh karena Amerika Serikat mempunyai komitmen keamanan di luar wilayahnya sendiri untuk melindungi wilayah-wilayah sekutunya. Pola hubungan semacam ini mungkin dapat disamakan dengan pola hubungan model NATO.

²Diskusi mengenai *extended deterrence* dapat ditemukan dalam Glenn H. Snyder, *Deterrence and Defense. Toward A Theory of National Security* (Westpoer, Connecticut: Greenwood Press Publisher, 1975) terutama Bab 3.

Liberalisme Internasional dan Penangkal yang Diperluas

Konsep liberalisme internasional dan penangkal yang diperluas lahir dalam lingkungan pemikiran Barat. Kedua konsep ini dan pola hubungan model GATT dan NATO telah sejak lama menjadi fokus analisis-analisis hubungan internasional. Suatu pemikiran yang mencoba menggabungkan kedua konsep dan model inilah yang kemudian membentuk apa yang dikenal dengan paradigma Aliansi Atlantik. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, kedua konsep di atas selalu dikaitkan dengan situasi di kawasan Eropa, Amerika dan Lautan Atlantik yang pada waktu itu menjadi pusat politik dunia setelah Perang Dunia II. Kawasan-kawasan itu dan pola hubungan yang berlaku dalam kawasan itu diorganisasikan dan dikendalikan oleh kekuatan hegemoni tunggal Amerika Serikat dalam konteks Aliansi Atlantik.

Tetapi hasil-hasil studi hubungan internasional yang muncul setelah Perang Dunia II menunjukkan bahwa sesungguhnya konsep liberalisme internasional dan penangkal yang diperluas telah lebih dahulu mewarnai kebijakan ekonomi dan politik Inggris, khususnya dalam abad antara Perang Napoleon dan Perang Dunia I. Liberalisme internasional dan strategi koalisi mendasari kebijakan ekonomi dan politik Inggris dan hal itu telah membantunya menjadi kekuatan yang mendominasi sistem internasional.³

³Paul Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers* (New York: Random House, 1987), hal. 151-158. Lihat juga George Modelski, "The Long Cycles of Global Politics and the Nations States," *Comparative Studies and History* (April 1978), hal. 214-235; E.H. Carr, *The Twenty Years Crisis, 1919-1939* (London & Basingstroke: The Macmillan Press.

Pax Britanica, era sistem internasional yang didominasi oleh Inggris, mampu bertahan selama kurang lebih dua abad. Tetapi kemudian terjadi pergeseran besar-besaran dalam perimbangan kekuatan global secara keseluruhan karena tampilnya kekuatan ekonomi dan militer baru dan ketidakmampuan pemimpin dunia sebelumnya untuk menjamin tujuan-tujuan ekonomi dan politiknya. Amerika Serikat kemudian muncul sebagai kekuatan dunia baru dalam abad 20 menggantikan Inggris, dan secara demikian dianggap sebagai pemegang konsep liberalisme berikutnya.⁴ Jadi ide yang terkandung dalam liberalisme internasional sesungguhnya menunjuk pada ekonomi suatu negara yang bersifat komersial, *politis* (sistem politik) yang liberal dan kekuatan maritim yang kuat. Amerika Serikat dianggap memiliki semuanya ini.

Sebagai kekuatan Atlantik dan sekaligus kekuatan Pasifik⁵ Amerika Serikat telah mampu memberi sumbangan yang berarti bagi terpeliharanya tata internasional. Dalam konteks itu dan sesuai dengan posisinya Amerika Serikat mencoba menerapkan gagasan liberalisme dalam konteks Atlantik/Eropa di samping dalam realitas Pasifik/Asia. Kalau situasi keamanan di kedua kawasan ini kita amati lebih lanjut sesungguhnya terdapat beberapa persamaan. Di kawasan Eropa Barat dan Asia Timur Amerika Serikat sejauh ini masih menganggap Uni

⁴Diskusi mengenai munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia dalam abad 20 dapat ditemukan dalam Robert Keohane dan Joseph S. Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition* (Boston: Little Brown, 1977); Robert Gilpin, *War and Change in World Politics* (New York: Cambridge University Press, 1983).

⁵C.J. Bartlett, *The Rise and Fall of the Pax Americana* (New York: St. Martin's Press, 1974), hal. 86-120.

Soviet sebagai sumber ancaman. Atas dasar itulah Amerika Serikat mengadakan perjanjian pertahanan dengan Jepang tahun 1951 di Asia Timur dan dengan Jerman Barat 1951 di Eropa Barat. Dalam bidang ekonomi pun terdapat persamaan. Jerman Barat dan Jepang adalah dua negara yang mengalami kehancuran ekonomi akibat perang. Melalui Rencana Marshal tahun 1947 Amerika Serikat memulihkan perekonomian Eropa Barat dan hal yang sama pun dilakukannya terhadap Jepang tahun 1948.

Bantuan ekonomi besar-besaran Amerika Serikat kepada Jerman Barat dan Jepang dan dukungan okupasi pasukan Amerika Serikat di kedua negara telah mendorong bangkitnya kapitalisme liberal meskipun dengan cara yang berbeda. Di Jerman Barat pulihnya kapitalisme liberal terutama dipelopori dan dimotori oleh perusahaan-perusahaan Jerman dan didukung oleh birokrasi yang *fragmented*. Hasil kerjasama kedua unsur itu melahirkan kekuatan kapitalis liberal Jerman yang pada waktu itu melihat dunia dalam konteks kebijakan liberalisme liberal, suatu kebijakan yang mirip dengan kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat. Sebaliknya restorasi kapitalis liberal di Jepang dimotori oleh birokrasi Jepang dan didukung oleh bank-bank dan perusahaan dagang di negara itu. Menurut konsep liberalisme Jepang negara akan menjadi pelopor kemajuan masyarakat (*state leading the society*), dan dengan konsep ini Jepang memandang dunia dalam konteks kebijakan merkantilisme (*mercantilism*),⁶ suatu kebijakan yang sangat berbeda dari kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat.

⁶Dalam konteks ini Jepang mencoba *catch up* negara-negara besar lainnya guna mempertahankan kohesi nasional dan stabilitas politik. Gill dan Law, *The Global Political Economy*, hal. 103.

Kawasan Pasifik: Merkantilisme dan Penangkal Terbatas

Kondisi di kawasan Pasifik dilihat dari segi geografi maupun pola hubungan internasional memang berbeda dari kondisi di Eropa Barat, meskipun Amerika Serikat merupakan kekuatan intrusif di kedua kawasan itu. Dinamisme kawasan Pasifik tidak hanya diperlihatkan oleh tingginya interaksi antar negara-negara di kawasan, tetapi juga oleh pertumbuhan ekonomi dan ekspansi perdagangan. Semuanya ini menunjukkan betapa pentingnya kawasan Pasifik dalam membentuk penyesuaian global hubungan internasional dan ekonomi dunia. Dua keistimewaan (*features*) dari dinamisme kawasan Pasifik yang perlu dicatat adalah pertumbuhan ekonomi dalam formasi angsa terbang⁷ dan meningkatnya interaksi horizontal antara Jepang dan negara-negara industri baru (*NICs*) maupun ASEAN. Keistimewaan-keistimewaan inilah yang sesungguhnya membedakan kondisi dan perkembangan kawasan Pasifik dari kondisi dan perkembangan di Eropa, dan secara demikian membentuk paradigma tersendiri, yaitu paradigma Pasifik, dengan Jepang, dan mungkin dengan Cina, sebagai negara *core* di kawasan.

Jika kita menggunakan disiplin ekonomi internasional untuk memandang konsep hubungan ekonomi internasional negara-negara kawasan Pasifik, terutama Asia Timur dan Tenggara, maka jelas bahwa hu-

⁷Teori "angsa terbang" pertama kali dikemukakan oleh Kaname Akamatsu untuk menggambarkan pola perkembangan Asia Timur dan Asia Tenggara. Menurut teori itu perkembangan ekonomi Asia-Pasifik dipelopori oleh Jepang dan diikuti oleh Negara Industri Baru (NIB) di Asia, beberapa negara anggota ASEAN dan sampai tingkat tertentu juga Cina, Vietnam dan Korea Utara.

bungan ekonomi internasional mereka tidak didasarkan atas liberalisme internasional tetapi merkantilisme internasional. Dalam arti, mereka lebih percaya akan suatu negara yang kuat yang dapat menggerakkan masyarakatnya ke arah kompetisi efektif dalam ekonomi dunia, dan hal itu pada gilirannya akan meningkatkan kekuatan dan kenikmatan negara dan masyarakatnya.

Selanjutnya, dipandang dari sudut keamanan internasional negara-negara Asia Timur tidak menganut konsep penangkal yang diperluas melainkan penangkal terbatas (*finite deterrence*). Misalnya, Jepang oleh karena letak geografisnya, dan Cina karena jumlah populasi dan kekuatan nuklirnya, bukan merupakan sasaran ancaman Soviet yang berarti dibandingkan ancaman Soviet terhadap negara-negara Eropa Barat. Dan usaha untuk menangkal Soviet di Asia Timur lebih mudah diatasi meskipun dengan cara masing-masing. Jepang, misalnya, telah mengembangkan konsep keamanan komprehensif, sedangkan Cina juga mengembangkan konsep serupa dalam bentuk "perang rakyat."⁸ Seperti yang akan kita lihat nanti, untuk negara-negara Asia Timur konsep keamanan yang bercorak penangkal terbatas lebih sesuai dengan konsep ekonomi yang bercorak merkantilisme internasional.

Kalau sistem internasional kawasan Pasifik yang didasarkan atas konsep merkantilisme internasional dan penangkal terbatas dapat direalisasi, mungkin Amerika Serikat tidak akan lagi menjadi negara *core* di ka-

wasan Pasifik. Selanjutnya, jika semua negara besar di Pasifik, termasuk Amerika Serikat, menerima konsep merkantilisme internasional, maka Amerika Serikat mungkin akan menutup pasarnya. Demikian pun, jika konsep penangkal terbatas diterima oleh semua negara besar di kawasan, termasuk juga Amerika Serikat, tentu Amerika Serikat akan menarik Armada VII-nya dari Pasifik. Tetapi tanpa pasar Amerika yang terbuka dan armada lautnya, sesungguhnya Amerika Serikat akan menjadi kurang berarti bagi Asia-Pasifik. Jika analisis ini betul, Jepang dan Cina akan menjadi negara-negara *core* di Pasifik, sedangkan negara-negara lain termasuk Amerika Serikat akan menjadi negara pinggir seperti halnya Amerika Latin dalam sistem intra-Amerika.

Oleh sebab itu untuk mendukung analisis lebih lanjut mengenai interaksi kedua paradigma hubungan internasional itu, kita perlu mengkaji asal-usul historis konsep merkantilisme internasional dan penangkal terbatas Asia Timur, dengan harapan masa depan paradigma itu dapat dipahami lebih dalam. Meskipun salah satu atau kedua konsep itu juga dianut oleh beberapa negara Asia Timur, termasuk Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong, namun konsep-konsep itu dianggap mempunyai arti yang lebih penting justru karena dianut oleh Cina dan Jepang.

Kenyataan bahwa dua negara yang disebut terakhir merupakan negara besar di Asia adalah tidak dapat diingkari, meskipun masing-masing memiliki sejarah modern yang berbeda, terutama mulai dari Perang Cina-Jepang (1895-1896) sampai Perang Dunia II. Cina, misalnya, memiliki pengalaman-pengalaman di wilayahnya sendiri, seperti Perang Opium, pemberontakan Taiping, revolusi tahun 1911, invasi dan okupasi Jepang, perang saudara, revolusi tahun

⁸Perang rakyat merupakan model kekuatan militer Cina yang dikembangkan oleh Lin Biao tahun 1965 untuk menghadapi Perang Perlawanan Terhadap Jepang. William R. Heaton, Jr., "The Defense Policy of the Republic of China," dalam *The Defense Policies of Nations*, ed. Douglas J. Murray dan Paul R. Viotti (Baltimore dan London: The John Hopkins University Press, 1982), hal. 423-424.

1949 dan revolusi kebudayaan. Pengalaman-pengalaman Cina ini dapat dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman Jepang dalam periode yang sama dan berlangsung di wilayah Jepang, yaitu Restorasi Meiji, serangan Amerika Serikat dalam Perang Dunia II dan okupasi negara itu di Jepang.

Pengalaman-pengalaman Cina dan Jepang yang berbeda itu sangat mempengaruhi kondisi negara mereka dan visi mereka mengenai konsep-konsep hubungan luar negeri. Dengan perkataan lain, konsekuensi dari perbedaan itu adalah bahwa dalam sejarah modernnya Cina dianggap sebagai negara yang tidak koheren. Sebaliknya Jepang, oleh karena sejarah modernnya yang lebih memperlihatkan usaha menciptakan kerukunan internen, dianggap cukup koheren. Hanya baru dalam beberapa tahun terakhir ini saja Cina dianggap mulai koheren dengan mendukung dan mempertahankan versinya sendiri mengenai merkantilisme internasional dan penangkal terbatas. Sedangkan Jepang sesungguhnya telah sejak lama menggunakan konsep itu sebagai dasar hubungan ekonomi luar negeri dan keamanan negaranya. Oleh sebab itu, tulisan ini akan lebih memfokuskan pada konsep merkantilisme dan penangkal terbatas Jepang.

Jepang dari Restorasi Meiji ke Perang Pasifik

Perbedaan dalam konsep liberalisme ekonomi dan merkantilisme akan menyebabkan pula perbedaan dalam posisi *timing* industrialisasi. Kalau ide dalam konsep liberalisme menunjuk pada negara yang telah lebih dahulu melakukan industrialisasi, seperti Inggris dan Amerika Serikat, maka konsep merkantilisme menunjuk pada nega-

ra yang melakukan industrialisasi baru setelah Perang Dunia II, seperti Jerman Barat dan Jepang. Alasan perbedaan itu banyak dibahas oleh ahli sejarah ekonomi.⁹

Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa negara-negara yang baru melakukan industrialisasi setelah Perang Dunia (*late industrializers*) akan selalu berusaha melindungi industri-industri *infant* mereka dari negara-negara industri yang telah lebih dulu kuat. Selain itu, mereka membutuhkan akses ke pasaran yang lebih luas yang telah lebih dulu didominasi oleh negara industri kuat dan itu memerlukan dana dalam jumlah yang besar. Semua ini mereka lakukan agar mereka dapat mengimbangi kecepatan laju pembangunan negara-negara industri dan untuk itu dipersyaratkan negara yang kuat dengan kebijakan merkantilis yang mampu memberi arah pada ekonomi yang berkembang.

Di kawasan Eropa negara yang menganut kebijakan merkantilis adalah Jerman, sedangkan di Asia adalah Jepang. Konsekuensinya terdapat berbagai persamaan dalam sejarah mereka mulai tahun 1860-an -- unifikasi Jerman dan Restorasi Meiji -- sampai Perang Dunia II. Tetapi industrialisasi Jepang sesungguhnya baru dimulai sekitar satu generasi setelah Jerman. Ini adalah salah satu faktor yang membuat Jepang menjadi negara yang menonjol dan bahkan kebijakannya lebih merkantilis daripada Jerman.

Kalau sebagai negara industri yang terlambat kedudukan Jepang sama dengan Jerman, sebagai negara kepulauan kedudukan Jepang sama dengan Inggris. Status Jepang

⁹Antara lain lihat James R. Kurth, "The Political Consequences of the Product Cycles: Industrial History and Political Outcomes," *International Organization*, No. 33/1 (Winter 1979).

yang disebut pertama membuatnya lebih menekankan usaha memperkuat negara sebagai pemandu ekonomi, sedangkan sebagai negara kepulauan ia lebih menekankan pada usaha mencari pasar luar negeri. Tetapi, seperti telah dikatakan tadi, oleh karena Jepang baru memulai proses industrialisasi setelah Perang Dunia II, maka ia kehilangan peluang untuk mengisi pasaran luar negeri yang telah dikuasai oleh negara-negara industri yang lebih dulu lahir. Dilihat dari perspektif ini Jepang dapat dianggap sebagai *late imperializer*, dan sesuai dengan statusnya sebagai negara kepulauan Jepang cenderung menjadi imperium *sea-borne* yang didukung oleh kekuatan laut. Jepang perlahan-lahan mulai mampu mengimbangi kekuatan yang telah ada pada waktu itu, yaitu Inggris.

Akan tetapi situasi yang dihadapi Inggris dalam kawasan Eropa berbeda dari situasi yang dihadapi Jepang di kawasan Asia. Di kawasan Asia, hal itu dapat dilihat dari kenyataan bahwa Cina bersatu di bawah pemerintahan yang cukup lemah -- tidak seperti di kawasan Eropa yang terbagi menjadi beberapa negara tetapi cukup kuat -- dan hal itu memberi peluang kepada Jepang untuk menyerang daratan Asia, suatu peluang yang memang tidak dimiliki oleh Inggris. Dengan memanfaatkan peluang itu Jepang membuktikan dirinya sebagai kekuatan maritim yang kemudian bahkan mencoba menjadi kekuatan kontinental dengan mencoba menandingi kekuatan kontinental dan kekuatan maritim yang ada pada waktu itu, yaitu Jerman dan Inggris.

Keberhasilan usaha Jepang mengimbangi kemampuan maritim Inggris telah membantu terbentuknya aliansi Jepang-Inggris tahun 1902¹⁰ dan hal itu telah memungkinkan Je-

pang memenangkan perang dengan Rusia pada tahun 1904 dan menganeksasi Korea tahun 1905.¹¹ Selanjutnya, kekalahan Rusia dari Jepang mendorong Inggris untuk memberi perhatian yang lebih besar kepada Jerman sebagai satu-satunya kekuatan kontinental yang mengancam. Dan persepsi Inggris mengenai Jerman ini mendorong lahirnya *entente* (saling pengertian) antara Inggris dan Rusia tahun 1907 dan masuknya Inggris dalam Perang Dunia I. Sementara itu, di Asia aneksasi Jepang terhadap Korea merupakan awal lahirnya kekuatan kontinental Jepang, sehingga Jepang pada waktu itu berada dalam posisi untuk memperluas ekspansinya ke Manchuria dan untuk melakukan serangan secara penuh jika peluang timbul. Semua ini dilakukan oleh Jepang demi mendukung ide merkantilisme imperial.

Jepang dan Jerman memang diakui sebagai negara yang mampu mengembangkan industri yang paling kompetitif di dunia. Produk-produk mereka telah membuahkan kemakmuran dalam dasawarsa 1920-an dan ini berarti tersedianya pasar internasional yang terbuka. Kebijakan merkantilisme internasional menjadi semakin atraktif bagi kedua negara industri ini. Tetapi sebagai akibat depresi besar-besaran dalam dasawarsa itu, pasar internasional yang semula terbuka diisi oleh hambatan-hambatan perdagangan (*trade barriers*). Sebagai akibatnya ide merkantilisme imperialis timbul kembali, seperti diperlihatkan oleh Jepang dengan menyerbu Manchuria tahun 1931 dan Jepang sejak waktu itu bahkan menjadi kekuatan yang lebih kontinental daripada sebelumnya.

Sejalan dengan perkembangan itu, Jepang kemudian menjadi tempat bagi teoritis merkantilis membicarakan konsepsi-konsepsi

¹⁰Ian Nish, *The Origin of Russo-Japanese War* (London dan New York: Longman, 1985), hal. 73-74.

¹¹*Ibid.*, hal. 313-216.

si yang canggih mengenai bagaimana suatu negara dapat mempertahankan perkembangan masyarakatnya dengan cara melakukan kompetisi dalam ekonomi dunia yang dinamis. Salah satu konsepsi yang muncul adalah *product trade cyclus*,¹² yang kemudian menjadi dasar intelektual bagi strategi industri dari Kementerian Perdagangan dan Industri Jepang tahun 1930-an. Tetapi merkantilisme awal versi internasional ini gugur akibat munculnya ide imperialis, yaitu invasi Jepang terhadap Cina. Bahkan Kementerian Perdagangan dan Industri selama perang menjadi Kementerian Urusan Amunisi, sebelum ia berubah kembali menjadi Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri setelah perang.

Invasi Jepang terhadap Cina tahun 1937 semakin memperkuat Jepang sebagai kekuatan kontinental dan memberinya peluang untuk memperluas kekuatannya ke Indocina tahun 1940 dan 1941, akhirnya bahkan melibatkan diri dalam perang dengan Amerika Serikat yang dimulai dengan serangan diam-diam terhadap pelabuhan Pearl Harbor.¹³ Di pihak Amerika Serikat, dalam usahanya mengembangkan penangkal yang diperluas, Amerika Serikat pada tahun 1940 memindahkan sebagian dari armada lautnya dari San Diego dan Long Beach ke Pearl Harbor. Tetapi seperti yang telah kita lihat Amerika Serikat mengalami kegagalan dalam strategi itu. Perang antara Jepang dan Amerika Serikat di Pasifik melengkapi perang di Eropa yang telah terjadi lebih dulu dan secara demikian melahirkan perang dunia.

¹²Mengenai teori ini lihat Gill dan Law, *The Global Political Economy*, hal. 200-201, 239.

¹³Mengenai serangan Pearl Harbor dilihat dari perspektif Amerika Serikat dapat dibaca Ronald H. Spector, *Eagle Against the Sun. The American War with Japan* (New York: Random House, 1985).

Oleh karena penyerbuan Jepang ke Cina dilakukan melalui darat, maka dapat dikatakan kebijakan Cina itu merupakan proyek angkatan darat Jepang dan tujuan kebijakan itu adalah untuk mengekalkan imperium merkantil. Sedangkan Pearl Harbor merupakan proyek angkatan laut Jepang yang bertujuan untuk menjamin keamanan dari imperium yang telah dibentuk (ditandai dengan serangan terhadap Cina). Dilihat dari tindakan-tindakan Jepang itu, dapat dikatakan kebijakan Cina dan strategi Pearl Harbor dimaksudkan untuk membentuk tujuan-tujuan ekonomi dan keamanan Jepang. Menurut pemimpin Jepang hanya gabungan kekuatan darat dan lautlah yang dapat membantu Jepang mencapai tujuan-tujuannya.

Hasil kombinasi kebijakan dan strategi Jepang inilah yang kemudian melahirkan *Greater East Asia Co-prosperity Sphere*,¹⁴ suatu orde Jepang di Asia yang ditopang oleh kebijakan merkantilisme internasional dan keamanan komprehensif. Usaha Jepang untuk menciptakan orde semacam itu merupakan awal perang Pasifik,¹⁵ suatu pertempuran laut terbesar dalam sejarah, yang kemudian membawa kehancuran di pihak Jepang akibat serangan bom atom oleh Amerika Serikat, dan diakhiri oleh okupasi Amerika Serikat di Jepang. Kekuatan nuklir Amerika Serikat akhirnya mampu meredam ambisi pemimpin militer Jepang untuk mendominasi hubungan internasional di Asia. Era baru Jepang dianggap dimulai awal 1950-an setelah Amerika Serikat mengakhiri okupasinya di negara itu.

¹⁴Mengenai pengaruh geopolitik terhadap konsep Jepang ini baca Jo Yung Whan, *Japanese Geopolitics and the Greater East Asia Co-prosperity Sphere* (University Microfilms International, 1964).

¹⁵Perspektif Jepang mengenai Perang Pasifik dikaji oleh Saburo Ienaga, *The Pacific War, 1931-1945* (New York: Pantheon Book, 1978).

Jepang dari Okupasi ke Status Baru

Jepang berada di kawasan Asia-Pasifik dengan tingkat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat yang cukup tinggi dalam bidang ekonomi, teknologi maupun keamanan. Sebagai negara yang kalah perang dengan status negara berkembang, Jepang sejak tahun 1945 sepenuhnya bergantung pada lingkungan internasional yang menguntungkan yang diciptakan oleh Amerika Serikat. Salah satu elemen dari lingkungan itu yang cukup penting adalah payung sekuriti. Dalam konteks ini, pada tahap awal pembangunan Jepang, Amerika Serikat mengambil alih seluruh peranan angkatan bersenjata Jepang termasuk keamanan di laut untuk menjamin suplai minyak dari Teluk Parsi dan Indonesia ke Jepang dan menjamin pasar di Asia Tenggara bagi produk-produk Jepang.

Setelah kalah perang, Jepang tidak lagi dianggap memiliki kekuatan maritim dan strategi kontinental yang berarti. Satu-satunya institusi yang dimiliki Jepang sejak sebelum perang dan kemudian menjadi institusi tertinggi dalam masa pasca perang adalah birokrasi.¹⁶ Kekuatan birokrasi Jepang yang

telah ada sejak abad ketujuh dipertahankan oleh penguasa Okupasi sebagai upaya untuk melancarkan fungsi-fungsi pemerintahan di negara itu. Ini berarti bahwa penguasa Okupasi tetap mengakui supremasi satu-satunya pilar industri di Jepang dan oleh karena itu Jepang tetap dianggap memiliki strategi industri.

Jadi apa yang dilakukan oleh penguasa Okupasi sesungguhnya sangat membantu Jepang meningkatkan posisi dan statusnya di dunia. Dan hal itu dilakukan dengan meletakkan dasar-dasar untuk memperkuat negara sebagai pemandu ekonomi yang tidak diarahkan pada imperium internasional, tetapi secara eksklusif diarahkan pada pengembangan strategi industri dengan sasaran pasar internasional. Posisi Jepang setelah okupasi justru jauh lebih baik daripada sebelum Perang Dunia II. Dengan posisi dan statusnya yang baru itu Jepang telah mampu mengembangkan visinya sendiri mengenai hubungan ekonomi internasional, yaitu merkantilisme internasional.

Perkembangan ekonomi Jepang setelah Perang Dunia II pada umumnya dianggap luar biasa. Periode pengalaman perkembangan Jepang yang menimbulkan rasa ingin tahu dan perhatian yang paling tinggi adalah tahun 1960-an dan awal 1970-an. Selama periode itu, Jepang sebenarnya telah mentransformasikan ekonominya dari ekonomi yang bisa dilukiskan sebagai suatu ekonomi tingkat menengah yang telah berkembang ke arah ekonomi yang paling maju di dunia. Pertumbuhan luar biasa ini disebabkan oleh ekspansi yang pesat dalam bidang industri. Selain itu, investasi yang pesat dalam teknologi baru dan peralatan mutakhir telah sangat membantu menaikkan produktivitas dan memberi dasar-dasar kuat yang membuat Jepang berhasil dalam per-

¹⁶Birokrasi ekonomi Jepang mulai bangkit dan berkuasa selama tahun 1930-an dan tahun 1940-an sebagai tanggapan atas krisis depresi, perang di Cina dan Perang Dunia II. Birokrasi tersebut mencapai kekuasaannya yang paling besar selama pendudukan sekutu awal tahun 1950-an pada waktu saingan utamanya, yaitu kaum militer dan *zaibatsu* menjadi lemah dan dihancurkan. Chalmers Johnson, "Lembaga Politik dan Pelaksanaan Ekonomi: Hubungan Pemerintah-Bisnis di Jepang, Korea Selatan dan Taiwan," dalam *Perkembangan Ekonomi Asia: Masa Kini dan Masa Depan*, penyunting Robert A. Scalapino, Seizaburo Sato dan Jusuf Wanandi (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1990), hal. 113. Lihat juga Takeshi Ishida, "Changes in Japanese Perceptions of the Occupation," *Asian and African Studies* 18 (1984), hal. 26.

saingan internasional. Banyak orang berpendapat bahwa hal itu adalah hasil bimbingan pemerintah Jepang yang meletakkan konsep merkantilisme sebagai dasar kebijakan ekonomi internasional Jepang.

Jepang memang telah mampu bangkit dari kedudukannya sebagai negara kecil dan lemah dalam lingkungan internasional menjadi negara yang berhasil dalam pembangunan ekonominya dan menjadi negeri yang secara ekonomis maju yang mampu melindungi industri domestiknya. Sebagai *late industrializer*, Jepang telah mampu membuktikan dirinya sebagai kekuatan ekonomi yang besar dan menjadi pesaing utama ekonomi negara-negara Barat. Satu-satunya kekuatan yang mungkin mampu menghadapi kebijakan merkantilisme internasional Jepang adalah Amerika Serikat, tetapi ia tidak mengambil kebijakan khusus untuk menghadapi kebijakan Jepang semacam itu.

Persoalan mengapa Amerika Serikat tidak mencoba menandingi kebijakan Jepang telah banyak dibahas oleh pengamat. Robert Gilpin, misalnya, berpendapat bahwa prioritas kebijakan Amerika Serikat lebih diletakkan pada persoalan keamanan internasional daripada ekonomi internasional.¹⁷ Keamanan internasional merupakan pertimbangan utama dari hubungan yang berorientasi pada keamanan. Dilihat dari segi ini motivasi Amerika Serikat untuk mengembangkan hubungan semacam itu dengan Jepang adalah untuk memperoleh sekutu regional.¹⁸ Tetapi kedudukan Jepang dalam

hubungan semacam itu justru membuatnya memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih besar daripada sekutu Amerika Serikat di Eropa.

Konsep merkantilisme internasional Jepang dan negara-negara Asia Timur lainnya memandang negara sebagai motor utama masyarakat, agar mereka mampu melakukan kompetisi yang efektif dalam pasar dunia, di mana hal itu pada gilirannya akan meningkatkan kekuatan maupun kesejahteraan negara dan masyarakatnya. Dengan kebijakan itu Jepang telah memperlihatkan keberhasilannya untuk mencapai tingkat tertinggi dalam pembangunan industri dan teknologi. Ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain khususnya negara industri baru di Asia Timur. Ada alasan bagi negara-negara industri maju di Asia Timur yang mempunyai kepentingan dalam pengalaman Jepang. Dengan mempelajari pertumbuhan Jepang yang pesat dan transformasi ekonominya yang dicapai, mereka (negara industri baru dan negara berkembang) berharap mengikuti haluan yang sama.¹⁹

Perhatian negara-negara pada persoalan memahami proses dan sifat perkembangan Jepang dapat bertujuan untuk mengevaluasi dampak ekonomi Jepang terhadap hubungan internasional. Dilihat dari perspektif ini konsep merkantilisme internasional melihat kompetisi ekonomi dunia tidak sebagai suatu permainan *zero-sum*, tetapi sebagai suatu permainan yang dapat memberikan hasil positif kepada banyak negara baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Jepang dewasa ini dianggap salah satu aktor (negara maju) dalam permainan itu yang

¹⁷Robert Gilpin, *US Power and the Multinational Corporation: The Political Economy of Foreign Direct Investment* (New York: Basic Books 1975).

¹⁸Mark J. Gasiorowski dan Seung-hyun Baek, "International Client Relationships and Client States in East Asia," *Pacific Focus*, Vol. II, No. 2 (Fall 1987), hal. 114-143.

¹⁹Hadi Soesastro, "Jepang "Guru" - ASEAN "Murid": Apa Bisa Jalan?" dalam Scalapino, Sato, Wainandi, *Perkembangan Ekonomi Asia*, hal. 167.

memiliki kemampuan untuk melanjutkan dan mempertahankan pengembangan teknologi ataupun industri baru untuk selanjutnya ditransfer kepada negara-negara berkembang.

Telah dikatakan di muka bahwa Jepang telah memanfaatkan lingkungan internasional yang menguntungkan yang diciptakan oleh Amerika Serikat antara lain payung keamanan. Amerika Serikat lebih banyak memainkan fungsi keamanan untuk Jepang. Bahkan Pasukan Bela Diri (*SDF*) Jepang pada awal tahun 1950-an terutama dibentuk untuk memenuhi kebutuhan Amerika Serikat.²⁰ Pakta Keamanan Bersama Jepang-Amerika Serikat memang telah diterima secara luas di Jepang sejak tahun 1950-an. Tetapi justru pada saat-saat seperti itu banyak keberatan di Amerika Serikat dikemukakan terhadap tidak adilnya hubungan keamanan Jepang - Amerika Serikat. Misalnya, pada saat Amerika Serikat mengeluarkan 5% sampai 6% GNP-nya untuk pertahanan dan defisit anggaran belanja meningkat, sementara itu Eropa menggunakan sekitar 3% GNP untuk pertahanannya, maka Jepang -- dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di dunia industri -- mempunyai kebiasaan untuk tetap berada dalam batas 1% (sampai tahun 1987).

Jepang berhasil memanfaatkan lingkungan internasional semacam itu untuk keuntungan pembangunan ekonominya. Tetapi keasyikan Jepang ini malah menimbulkan tekanan-tekanan terutama dari Amerika Serikat agar Jepang mulai mengambil peran aktif. Jepang menyadari hal ini, dan lebih penting lagi ia menyadari bahwa ia memang

tidak dapat menjamin keamanannya secara sendirian. Oleh sebab itu, Jepang (mulai awal 1980-an) mencoba mengembangkan ekuivalen fungsional dengan mengkombinasikan kekuatan militer Amerika dengan kekuatan militer Jepang, kekuatan ekonomi dan postur diplomasi Jepang yang *low profile*. Kombinasi komprehensif inilah yang sesungguhnya menjadi dasar dari konsep keamanan komprehensif Jepang, yang meletakkan kekuatan ekonomi sebagai inti (*core*) dari keamanan itu.

Dilihat dari kerangka keamanan komprehensif ini konsep penangkal terbatas (*finite deterrence*) yang dikembangkan oleh Jepang cukup masuk akal. Tidak seperti Perancis atau Cina, penangkal terbatas Jepang tidak digantungkan pada kekuatan nuklir. Alergi nuklir yang berkembang setelah tahun 1945 terlalu besar bagi Jepang untuk mengandalkan penangkal terbatas pada kekuatan nuklir. Konsep penangkal terbatas oleh Jepang dianggap lebih cocok untuk mendampingi kebijakan merkantilisme internasional, sebab hal itu berarti bahwa Jepang akan dapat lebih berkonsentrasi pada usaha mencari dan bersaing di pasar internasional.

Konsep Jepang mengenai penangkal terbatas dan merkantilisme internasional sebenarnya bertentangan dengan konsep Amerika Serikat mengenai hal yang sama. Sengket ekonomi dan keamanan antara kedua negara yang telah sejak lama berlangsung, membuktikan pertentangan itu. Tetapi adanya perbedaan itu justru menguntungkan Jepang dan negara-negara Asia Timur lainnya. Dalam arti bahwa sistem internasional yang ditopang oleh kebijakan Amerika Serikat seperti itu akan lebih memacu Jepang untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk melakukan kompetisi-kompetisi ekonomi. Kebijakan merkantilisme dan penangkal

²⁰Martin E. Weinstein, *Japan's Postwar Defense Policy, 1947-1968* (New York & London: Columbia University Press, 1971), Bab Dua.

terbatas Jepang tentu juga menyumbang pada terciptanya kondisi-kondisi yang menguntungkan Jepang. Pemikiran mengenai hubungan ekonomi internasional dan keamanan terbatas Jepang mungkin dapat dilukiskan dalam suatu konsep yang lebih sederhana tetapi mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu konsep keamanan komprehensif.

Konsep ini muncul dari pemikiran Perdana Menteri Ohira (1978) yang kemudian dibahas oleh Kelompok Studi Mengenai Keamanan Nasional Komprehensif.²¹ Kelompok ini memandang keamanan nasional sebagai suatu hal yang komprehensif yang mengandung dua kebijakan utama, yaitu kebijakan keamanan dalam pengertian yang sempit dan kebijakan keamanan ekonomi. Untuk menjalankan kebijakan komprehensif itu Kelompok Studi itu memberi rekomendasi agar Jepang mengambil inisiatif untuk menciptakan orde politik internasional yang damai dan membantu membentuk kerjasama di kawasan Pasifik (dalam tingkat regional). Selain itu, usaha diplomatik Jepang juga harus diarahkan untuk memajukan kerjasama regional maupun internasional dan menjamin arus sumber daya ekonomi.

Tesis konsep ini, jika kita kaji lebih dalam, adalah ketergantungan yang kompleks. Ide ketergantungan ini mengandung arti bahwa isu ekonomi dan keamanan dianggap sebagai *high politics*, suatu kebijakan yang lebih berorientasi pada keamanan negara, baik dalam pengertian keamanan itu sendiri (*security*) maupun keamanan ekonomi. Jadi, dalam era ketergantungan ini, Jepang menyadari bahwa kelangsungan pembangunan di Jepang tidak hanya tergantung pada faktor keamanan dalam pengertian yang sempit

tetapi juga keamanan suplai bahan-bahan mentah. Singkatnya, Jepang sangat peka dan rawan terhadap perubahan dalam hubungan antara aktor-aktor yang membentuk sistem internasional. Dan kebijakan keamanan komprehensif, menurut pandangan pemimpin Jepang, dianggap sebagai kebijakan yang memadai untuk menciptakan tata politik internasional yang kondusif bagi Jepang.

Konsep merkantilisme Jepang itu ditanggapi oleh beberapa sektor di Amerika Serikat. Institusi-institusi keuangan Amerika Serikat, misalnya, dapat menerima konsep itu karena hal itu bisa menciptakan industri yang dinamis. Sebagai akibatnya pertumbuhan industri akan lebih cepat daripada perkembangan institusi keuangan. Tetapi industri yang dinamis di suatu negara sudah tentu sangat membutuhkan institusi keuangan yang cukup kuat di negara lain. Ini berarti bahwa kepentingan-kepentingan sektor tertentu di Amerika Serikat tidak hanya mendukung liberalisme internasional Amerika Serikat, tetapi juga menerima konsep merkantilisme internasional Jepang. Meskipun Amerika Serikat dapat menerima konsep merkantilisme internasional, tidak berarti bahwa tidak ada *spill over* ataupun kesenjangan akibat perbedaan antara kedua konsep itu.

Misalnya persoalan tawar-menawar antara bank-bank Amerika Serikat dan bank-bank Jepang; Bank-bank Amerika dianggap memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada bank-bank Jepang dalam masalah *international lending*, tetapi bank-bank Amerika tidak memiliki dana yang cukup seperti yang dimiliki oleh bank-bank Jepang. Persoalan tawar-menawar muncul oleh karena Amerika Serikat mengharapkan agar arus dana Jepang diarahkan untuk keuntungan

²¹Robert W. Barnet, *Beyond War Japan's Concept of Comprehensive National Security* (New York: Pergamon Press, 1984), hal. 1-6.

Amerika, misalnya untuk membantu membiayai hutang Amerika Latin; sedangkan bank-bank Jepang tetap menginginkan agar mereka beroperasi dalam sistem keamanan yang "murah" yang ditopang oleh kekuatan militer Amerika Serikat. Mengenai masalah ini seorang pengamat mengatakan bahwa bank-bank Amerika perlu tetap mendukung strategi penangkal yang diperluas Amerika Serikat terutama di kawasan Pasifik, sedangkan bank-bank Jepang membantu menyediakan dana untuk proyek-proyek bank Amerika terutama di kawasan Amerika Latin.²²

Diskusi di atas menunjukkan bahwa adanya penekanan yang berbeda dalam konsep yang dianut Amerika Serikat dan Jepang justru memberi Jepang peluang untuk menikmati posisi yang lebih baik dan menciptakan lingkungan politik internasional yang menguntungkan Jepang. Apalagi paradigma yang diciptakan oleh Amerika Serikat itu beberapa tahun belakangan ini dianggap mulai memudar,²³ sementara ekonomi Jepang dan ekonomi Asia Timur lainnya, menurut laporan *Newsweek*, 22 Februari 1988, bergerak ke arah suatu posisi untuk menciptakan paradigma Pasifik yang menurut majalah di atas ditandai dengan munculnya kekuatan Asia. Dilihat dari perspektif ini Jepang tidak hanya akan menjadi negara *core* dalam paradigma Pasifik, tetapi juga akan mampu memberi hasil yang positif kepada banyak negara.

²²Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1978), hal. 328.

²³Norman Macrae, "Pacific Century, 1975-2075," *The Economist*, 4 Januari 1975, hal. 15. Lihat juga "Pacific Century," laporan khusus, *Newsweek*, 22 Februari 1988, hal. 8; Samuel Huntington, "The US Decline or Renewal," *Foreign Affairs*, Vol. 67, No. 22 (Winter 1988/1989), hal. 76-96.

Penutup

Dengan konsep penangkal yang diperluas dan liberalisme internasional, Amerika Serikat memang berhasil menciptakan sistem internasional yang relatif stabil. Negara-negara di kawasan Eropa Barat dan Asia Timur sama-sama menikmati lingkungan yang diciptakan oleh paradigma Amerika Serikat itu. Tetapi pola hubungan yang terdapat di kedua kawasan itu sesungguhnya berbeda. Seperti yang telah kita lihat, hubungan internasional di kawasan Eropa Barat lebih banyak dipola oleh Amerika Serikat. Bantuan-bantuan Rencana Marshal Amerika Serikat pada Eropa Barat dan bantuan-bantuan yang diberikan pada tahun-tahun berikutnya dimaksudkan tidak hanya untuk memperluas kekuatan penangkal Amerika Serikat, tetapi juga untuk menjamin kekuatan pasar uang produk-produk Amerika Serikat. Amerika Serikat kemudian memperluas paradigmanya ini ke kawasan Asia dan secara demikian membuatnya menjadi kekuatan Atlantik sekaligus kekuatan Pasifik. Dari sudut pandang Amerika Serikat, apa yang disebut *Pax Americana* pada saat itu tampaknya telah memperlihatkan kehadirannya yang semi permanen.

Di bawah konsep penangkal yang diperluas dan liberalisme internasional, ekonomi dunia mengalami kemajuan pada sekitar kuartal ketiga dari abad ini, tetapi kemudian menurun pada kuartal terakhirnya. Pada kuartal ketiga ketika di seluruh dunia kegiatan ekonomi dan bisnis yang dipimpin Amerika Serikat maju, beberapa negara mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi daripada Amerika Serikat. Misalnya, pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an Eropa Barat dan Jepang merupakan contohnya. Pada 1970-an dan 1980-an contoh lebih menonjol dapat ditemukan di kawasan Asia Timur.

Dari sudut pandang global, menurunnya ekonomi dunia, mungkin sebagai akibat ke-munduran relatif hegemoni global dan regional Amerika Serikat, melahirkan persaingan bidang ekonomi internasional yang semakin keras. Seiring dengan menurunnya ekonomi dunia, tampak naiknya secara relatif ekonomi beberapa negara di kawasan Pasifik, terutama Asia Timur. Yang paling menonjol di antara negara-negara yang berprestasi adalah negara-negara industri baru Asia. Tetapi di antara negara-negara industri ini, Jepang berprestasi jauh lebih baik daripada negara-negara lain dalam kategori ini. Jadi yang terlihat sesungguhnya adalah keunggulan kompetitif di kawasan Pasifik.

Dengan memanfaatkan bantuan-bantuan yang sama dengan bantuan yang pernah diberikan oleh Amerika Serikat kepada Jerman Barat dan memobilisasi kekuatan birokrasi yang sengaja dipertahankan oleh penguasa okupasi Amerika Serikat, Jepang pada dasawarsa berikutnya mampu menempatkan dirinya dalam daratan negara-negara industri maju yang telah lebih dulu lahir. Peranan Jepang sebagai pemicu pembangunan negara-negara di kawasan Pasifik (Asia Timur) telah menyumbang pada terbentuknya keistimewaan-keistimewaan (*features*) kawasan Pasifik. Selanjutnya, melalui visi merkantilisme internasional dan penangkal terbatas, Jepang dan negara-negara Asia Timur lainnya membentuk paradigma Pasifik yang merupakan saingan dari paradigma Atlantik yang dibentuk oleh Amerika Serikat. Dalam arti bahwa hubungan internasional untuk dasawarsa mendatang akan sangat ditentukan oleh bagaimana Amerika Serikat dan Jepang, dengan visi atau konsepnya masing-masing, menata hubungan antar aktor internasional dalam kedua paradigma itu.

Kalau analisis yang diajukan oleh majalah *Newsweek* di atas benar, maka besarnya perhatian terhadap peranan Jepang (dan negara-negara industri baru di Asia) dalam konteks paradigma Pasifik dewasa ini sekurang-kurangnya merupakan petunjuk munculnya kekuatan Asia. Hal ini bisa diartikan bahwa analisis hubungan internasional dalam dasawarsa berikutnya akan lebih difokuskan pada hubungan-hubungan dalam kerangka paradigma Pasifik di mana Amerika Serikat tidak lagi dilihat sebagai bagian integral dari fenomena Pasifik. Malahan ada yang berpendapat bahwa Jepang harus mengambil tanggung jawab untuk mempertahankan stabilitas rezim internasional dan mungkin Amerika Serikat harus menerima pergeseran ke arah hegemoni Jepang.²⁴

Dari sudut pandang Jepang dan negara-negara Asia Timur lainnya, konsep merkantilisme internasional diartikan sebagai refleksi kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Pasifik yang didasarkan atas keunggulan komparatif yang dinamis dalam pasar internasional. Seperti yang telah kita lihat di atas, pertumbuhan ekonomi dalam pola angsa terbang telah membuka peluang negara-negara di Asia untuk melakukan kompetisi yang lebih tajam. Demikian pun, konsep keamanan komprehensif dapat diartikan sebagai kerjasama komprehensif antar negara-negara di kawasan Pasifik dan kekuatan penangkal yang dikembangkan hanya ditujukan untuk tujuan terbatas, yaitu perlindungan terhadap teritori nasional masing-masing negara. Pemikiran inilah yang membedakan dari pemikiran yang mendasari paradigma Atlantik.

²⁴Sebagaimana dikutip oleh Hadi Soesastro, "The Role of the Pacific Basin in the International Political Economy," *Foreign Relations Journal*, Vol. IV, No. 2 (Juni 1989), hal. 73.

Apa yang hendak disimpulkan di sini bukan untuk menunjukkan bahwa paradigma yang satu lebih kuat daripada paradigma lainnya, tetapi untuk menunjukkan kenyataan bahwa kedua paradigma itu, dengan masing-masing negara intinya, masih akan terus berinteraksi dalam dasawarsa berikutnya. Dan hasil interaksi itu dapat berupa meningkatnya paradigma yang satu yang berarti pula memudarnya paradigma

yang lain. Di sinilah sebenarnya letak dialektika antara kedua paradigma hubungan internasional itu. Amerika Serikat dan Jepang tampaknya tetap akan menjadi fokus analisis dalam kerangka paradigma-paradigma itu. Tetapi yang perlu dicatat di sini adalah pernyataan Herman Kahn beberapa tahun yang lalu, bahwa Jepang merupakan *super-state* dan tidak akan pernah menjadi *super-power*.

Eropa 1992 dan Dampaknya Terhadap Kerjasama di Kawasan Pasifik

C.P.F. LUHULIMA

SEJAK 1985, dengan diterimanya suatu program komprehensif, yang mencakup suatu jadwal kegiatan tentang tindakan-tindakan pembukaan pasar (liberalisasi arus barang, modal, jasa dan manusia di antara keduabelas negara anggota Masyarakat Eropa) untuk mencapai Pasar Tunggal Eropa pada tanggal 31 Desember 1992, mulailah suatu proses yang bertujuan membawa perubahan paling penting dalam peta bumi Eropa sesudah Perang Dunia II. Pada tanggal 1 Januari 1993 orang-orang Eropa yang akan bersatu dengan terciptanya suatu pasar bersama yang murni, akan lebih kuat bersaing dengan Amerika Serikat, Jepang, Ekonomi-ekonomi Industri Baru (EIB) dan ASEAN, dan setiap lembaga kerja sama yang akan dibangun di kawasan Asia-Pasifik.

Keputusan untuk memulai rangkaian kegiatan ini merupakan suatu *respons* terhadap keprihatinan bahwa ME ditinggalkan saingan-saingan internasionalnya, khususnya Amerika Serikat dan Jepang, dan kini Ekonomi-ekonomi Industri Baru dan

ASEAN, dan bahwa fragmentasi pasar Eropa merupakan suatu faktor merugi yang amat besar. Kendati permulaan upaya ini lamban jalannya, namun momentum sudah dicapai pada awal tahun 1988 dan suatu proses yang tidak dapat dibalikkan mulai mewujudkan diri. Kunci momentum itu ialah perubahan-perubahan dalam pengambilan keputusan yang tercantum dalam *Akta Tunggal Eropa*, penyelesaian kemacetan dalam anggaran ME dan keyakinan yang semakin meningkat bahwa program Eropa 1992 akan berhasil. Hampir semua pemerintah negara anggota bekerja aktif untuk meningkatkan kesadaran umum akan program 1992. Dan perusahaan-perusahaan ME merencanakan serta bertindak berdasarkan suatu pra-anggapan bahwa upaya ME akan terwujud.

Program perampungan pasar internal Eropa terdapat dalam *Kertas Putih*, yang diajukan Komisi Masyarakat Eropa di bulan Juni 1985¹, mencantumkan kurang lebih 300 tindakan (kini tinggal 279 tindakan pembu-

¹Completing the Internal Market, Juni 1985.

kaan pasar yang masih harus dituangkan ke dalam produk hukum) atau bidang-bidang yang memerlukan tindakan-tindakan. Rintangan-rintangan yang hendak dikesampingkan seperti tercantum dalam *Kertas Putih* dapat dikelompokkan sebagai berikut: pengawasan di perbatasan; batasan-batasan terhadap kebebasan gerak manusia dan haknya untuk memperoleh pekerjaan di setiap negara anggota; batasan-batasan terhadap pengakuan kualifikasi profesional yang diberikan negara-negara lain; perbedaan antara negara anggota dalam pajak nilai tambah dan pajak penjualan; perbedaan dalam rezim legal dan dengan demikian tiadanya kerangka legal bersama; batasan-batasan terhadap gerak bebas modal; batasan-batasan terhadap pemberian jasa, karena diatur secara ketat oleh pemerintah-pemerintah nasional; perbedaan-perbedaan dalam peraturan dan standar teknis; dan pembatasan-pembatasan dalam kebijaksanaan *public procurement*.

Kendati usulan-usulan dalam *Kertas Putih* diajukan sebagai suatu paket tanpa pencantuman prioritas, untuk menghindari tentangan dari negara-negara nasional, karena menyinggung kepentingan masing-masing negara anggota, namun bidang-bidang utama dapat disimpulkan sebagai berikut: penghapusan pengawasan-pengawasan di perbatasan (indikasi paling mencolok dari suatu pasar yang terfragmentasi liberalisasi gerak modal dan jasa, saling pengakuan peraturan dan standar nasional masing-masing negara anggota), dan pembukaan *public procurement markets* (yang menghasilkan sebanyak 15% dari GDP Masyarakat Eropa) bagi perusahaan-perusahaan negara-negara anggota lainnya.

Kategori batasan yang langsung mempengaruhi berjalannya suatu pasar, tetapi

tidak dimasukkan dalam *Kertas Putih*, ialah tidak adanya mata uang bersama, kurangnya koordinasi kebijaksanaan-kebijaksanaan makro-ekonomi, perbedaan dalam rezim perpajakan langsung dan perbedaan-perbedaan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan sosial, lingkungan dan konsumen, yang hanya disinggung dalam *Kertas Putih*.

Kendati ME telah menarik keuntungan dari keberhasilan besar *Sistem Moneter Eropa* dalam mengurangi fluktuasi, namun dalam hal-hal tertentu adanya ketidakstabilan antara mata uang negara-negara anggota, dan lebih khusus lagi, tidak adanya mata uang bersama, meningkatkan kompleksitas dan biaya berusaha di ME. Selanjutnya, pelaksanaan kebijaksanaan dan pengejaran sasaran makro-ekonomi yang berbeda-beda, tanpa suatu mekanisme yang lebih baik atau keharusan koordinasi, menciptakan rintangan-rintangan dalam liberalisasi gerak modal antar negara anggota.

Komisi ME amat tegas dalam pernyataannya bahwa tidak ada Eropa "a la carte." Negara-negara anggota tidak dapat memilih bagian-bagian mana dari *Kertas Putih* yang ingin mereka terapkan, karena hal itu akan melemahkan integritas program dan menyia-nyiaikan upaya pembentukan pasar internal itu.

Secara minimal, bagi orang-orang Eropa, 1992 berarti menjadi anggota suatu pasar sebesar 320 juta orang yang sangat menguntungkan. Tercapainya penyatuan itu akan memberikan Eropa Barat suatu kekuasaan yang besar sekali dalam menangani masalah-masalah perdagangan dunia dan masalah-masalah dunia umumnya. Masyarakat Eropa dengan demikian lebih bertindak sebagai pemerintah pusat Eropa Barat, apalagi apabila negara-negara EFTA berga-

bung dengan ME untuk menciptakan suatu ruang ekonomi bersama, di mana manusia, barang, jasa dan modal dapat beredar dengan bebas, tanpa dihalangi perbatasan nasional. Keuntungan potensial bagi negara-negara anggotanya besar sekali. Produk regional Masyarakat Eropa diperkirakan akan naik antara 4,5% dan 7% atau US\$285 milyar, lapangan kerja akan terbuka bagi 2 sampai 5 juta orang, harga-harga konsumen akan turun sebesar 4,5 sampai 6%, penurunan dalam defisit anggaran pemerintah sampai 2% dari GDP, dan suatu perbaikan dalam neraca eksternal ME sampai 1% dari GDP.²

Usaha untuk menyelesaikan pasar internal ini berjalan dalam suatu kerangka institutional yang berbeda pula. Interaksi antara ketiga lembaga utama ME -- Dewan, Komisi dan Parlemen Eropa -- ditandai oleh sejumlah ketegangan dan dipengaruhi oleh perluasan kekuasaan Parlemen Eropa dalam proses pengambilan keputusan. Ketegangan yang terjadi antara lembaga-lembaga di Brussel (terutama Komisi ME) dengan negara-negara anggota diperbesar oleh pergeseran tanggung jawab ke Brussel. Lembaga yang keempat, Pengadilan Eropa, sudah mengambil berbagai keputusan atas permintaan dan usul Komisi Eropa, yang amat mendorong proses integrasi ekonomi Masyarakat Eropa.

Kendati program pasar internal Eropa telah membangkitkan suatu tingkat antusiasme yang tinggi dan dukungan dalam Masyarakat Eropa, namun hambatan dan gangguan terhadap keberhasilan upaya besar ini tidaklah sedikit. Sebagian besar

masalah yang terdapat dalam upaya itu amat beragam: negara-negara atau kelompok-kelompok dalam negara-negara anggota berpendapat bahwa mereka akan dirugikan oleh usul-usul atau kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu. Seringkali masalah-masalah itu terkait dengan masalah-masalah lain yang melibatkan rangkaian permasalahan dan kepentingan yang berbeda-beda. Jadi, walaupun terdapat konsensus politik yang kuat yang mendorong upaya penyatuan pasar Eropa, sering sangat sulit untuk mencapai konsensus dalam kasus-kasus individual. Karena itu, hendaknya "1992" janganlah dilihat sebagai suatu peristiwa, melainkan sebagai suatu proses. Tugas penyatuan itu tidak akan selesai pada tanggal 1 Januari 1993 itu, tetapi kemajuan yang dicapainya akan cukup besar.

Secara umum, prospek tindakan-tindakan yang akan dilakukan di berbagai bidang menjelang 1992 adalah sebagai berikut:

- kendati pengurangan pengawasan perbatasan dan pengurangan biaya dalam pengangkutan lintas-batas banyak terjadi dan akan terus terjadi, namun masalah yang berkaitan dengan pajak, persyaratan kesehatan tanaman dan hewan yang berbeda, pengawasan perdagangan narkoba, teroris dan imigrasi akan menyulitkan peniadaan pengawasan sepenuhnya;
- kendati persetujuan dicapai guna saling mengakui kualifikasi profesional, tetapi ada kemungkinan terdapat cukup tentangan di berbagai negara anggota, sehingga hasilnya akan macam-macam;
- perkiraan pajak tidak langsung akan sulit sekali dilakukan, karena ia menyangkut perubahan-perubahan yang cukup besar dalam jumlah dan sifat pendapatan negara-negara anggota, serta penyerahan pengawasan mengenai bidang-bidang perpa-

²Michael Calingaert, *The 1992 Challenge from Europe: Development of the European Community's Internal Market* (Washington, D.C.: National Planning Association, Fourth Printing 1989), hal. 66.

- jakan yang sensitif kepada Brussel. Kemajuan yang lamban dapat diperkirakan dalam hal ini;
- kemajuan dalam hukum perusahaan juga cukup problematis, sebagian karena kecenderungan yang meningkat di lingkungan ME untuk menghadapi masalah-masalah kebijaksanaan sosial, seperti kondisi kerja, partisipasi pekerja dan hak-hak tenaga kerja. Pada lain pihak, masalah merk dagang ME hampir selesai, sesuatu yang lebih sulit bagi masalah paten. Suatu permulaan telah dilakukan di bidang hak cipta. Komisi Eropa diharapkan akan melaksanakan suatu kebijaksanaan persaingan yang keras yang akan mempengaruhi masalah-masalah *antitrust* dan bantuan negara;
- Masyarakat Eropa telah setuju untuk menghapus semua rintangan yang masih ada di bidang gerak bebas modal pada akhir tahun 1992 (dan menjelang 1995 juga bagi negara-negara anggota yang paling lemah). Tetapi, dengan memperhatikan ancaman yang terdapat dalam hal liberalisasi penuh bagi mata uang yang lemah, maka ada kemungkinan bahwa masalah ini akan mengalami beberapa kemunduran;
- perubahan-perubahan yang besar diharapkan dalam jasa finansial, terutama melalui introduksi suatu sistem yang menyangkut deregulasi, harmonisasi standar-standar esensial bagi supervisi dan perlindungan terhadap investor, saling pengakuan antara negara anggota mengenai standar-standar itu, dan supervisi lembaga-lembaga oleh negara-negara di mana mereka ditempatkan. Kemajuan dalam deregulasi transportasi dan "teknologi-teknologi baru" akan lebih lamban;
- usaha ME dengan "pendekatan baru" dalam masalah harmonisasi standar melalui

"persyaratan-persyaratan yang esensial" dan kemudian saling pengakuan standar negara-negara anggota dan mungkin pengembangan standar Eropa oleh badan-badan Eropa berjalan dengan baik, dan diharapkan bahwa menjelang 1992 akan ada kemajuan besar. Pada lain pihak, kemajuan dalam *testing* dan sertifikasi lebih problematis sifatnya;

- suatu serangan yang cukup besar dilakukan atas rintangan-rintangan terhadap *public procurement*. Kendati sejumlah tindakan penting dapat dilaksanakan pada akhir tahun 1992, tentangan masih akan tetap kuat sehingga membatasi pelaksanaannya yang efektif.

Perubahan-perubahan besar yang akan terjadi dalam Masyarakat Eropa, khususnya dengan proses peniadaan rintangan-rintangan terhadap arus barang, modal, manusia dan jasa, akan mempengaruhi bidang-bidang dan sektor-sektor secara berbeda-beda. Akan terjadi berbagai dislokasi dan ada berbagai pemenang dan yang kalah dalam proses yang besar dan menarik ini. Hasilnya ialah persaingan yang lebih besar daripada sebelumnya, sesuatu yang akan mempengaruhi semua peserta dalam Pasar Tunggal Eropa, baik peserta dari dalam Masyarakat Eropa sendiri maupun dari luar.

Dari uraian di atas tampaklah bahwa agenda Eropa 1992 sarat dengan masalah-masalah internal, sehingga tidak cukup perhatian ditujukan kepada masalah-masalah di bagian-bagian lain dunia ini. Ada kemungkinan bahwa dengan perkembangan begitu pesat yang terjadi di Eropa Timur sejak pertengahan tahun lalu akan dibuat pengaturan-pengaturan khusus yang mendorong ekspor negara-negara Eropa Timur guna membiayai impor dari negara-negara Eropa Barat. Dengan demikian akan dicip-

takan berbagai preferensi -- apakah itu dilakukan dengan sengaja atau tidak -- yang dapat mendiskriminasi terhadap bagian-bagian dunia lainnya. Kemungkinan terciptanya suatu Eropa yang membentang "dari Atlantik sampai ke Ural" dan berperilaku sebagai suatu kawasan ekonomi adalah cukup besar.

Dimensi Eksternal Eropa 1992

Perwujudan menyeluruh dan efektif program Pasar Tunggal Eropa mempunyai berbagai implikasi yang mendalam bagi ekonomi global dan bagi mitra-dagang Masyarakat Eropa. Penyisihan berangsur-angsur dari rintangan-rintangan internal perdagangan akan menciptakan pasar satu-satunya yang terbesar bagi produk-produk industri dunia. Suatu ekonomi Eropa yang terintegrasi dapat bertindak sebagai stimulus utama perdagangan dunia atau menjadi rintangan utama bagi pengembangan semacam itu. Keputusan-keputusan tentang siapa yang mempunyai akses ke pasar ini, dan atas dasar persyaratan apa, akan mempengaruhi jutaan manusia, dari produsen pisang di kepulauan Karibia sampai kepada perusahaan-perusahaan dagang raksasa di kawasan Asia-Pasifik, yang semuanya bergantung pada hubungan dagang yang sehat dan ekspansif dengan Masyarakat Eropa bagi kehidupannya.

Kawasan Asia-Pasifik khususnya gusar karena prospek bahwa apabila rintangan-rintangan internal Eropa Barat mulai disisihkan, mereka akan digantikan dengan suatu rangkaian rintangan yang bersatu yang dibuat untuk membatasi keuntungan suatu pasar internal sebagai suatu "Tembok Eropa" yang baru. Para eksekutif bisnis mulai mengungkapkan keprihatinannya bahwa, sekali rintangan-rintangan eksternal sudah

terumuskan, maka ME mempunyai wewenang untuk menentukan siapa yang dibolehkan masuk dan siapa tidak.

Kegusaran ini meningkat seperti terungkap dalam berbagai majalah bisnis utama yang memprediksikan keadaan yang lebih parah. Di bulan Mei 1988, *Far Eastern Economic Review* memulai dengan suatu tulisan sebanyak delapan halaman tentang bagaimana Eropa mempersiapkan diri untuk merebut inisiatif dari Ekonomi-ekonomi Industri Baru di kawasan Pasifik, dan membawa pusat kegiatan perdagangan internasional kembali ke Eropa.³ Peringatan bahwa "Benteng Eropa dengan proteksionisme sedemikian sederhana seperti kuota-kuota nasional dapat membuka jalan bagi suatu perbentengan Eroproteksionisme yang kompleks, yang meningkat menjadi kuota-kuota Masyarakat Eropa, kebijakan perdagangan yang secara umum lebih kaku dan kebijakan investasi ke luar yang kurang bebas" seakan-akan dibuat untuk membenarkan kegusaran paling besar masyarakat bisnis internasional.

Pada saat yang sama, edisi Eropa dari *Wall Street Journal*⁴ -- yang diterbitkan pada waktu *Omnibus Trade Act* yang kontroversial dengan pasal-pasal proteksionis sedang disetujui Kongres Amerika Serikat -- memperkirakan bahwa garis depan proteksionisme berikutnya akan muncul dari dalam Pasar Tunggal Eropa itu. Tulisan itu menekankan bahwa kombinasi catatan historis ME, khususnya *Kebijaksanaan Pertanian Bersama*, yang disebutnya "a black hole of protectionism," dan tekanan yang meningkat dari produsen kendaraan bermotor Eropa, lembaga-lembaga keuangan

³"Europe's Single Challenge," *Far Eastern Economic Review*, 5 Mei 1988, hal. 127-134.

⁴*The Wall Street Journal*, 7-8 Oktober 1989.

dan sektor-sektor industri lainnya untuk membantu ME dalam menghadapi saingan eksternal akan membuat program pasar internal menjadi inisiatif yang paling restriktif, yang pernah diwujudkan oleh suatu kelompok dagang regional, dan memulai suatu putaran baru dan buruk perang dagang lintas-Atlantik.

Kertas Putih tidak memberikan indikasi bagaimana Komisi ME bermaksud menangani masalah yang dilahirkan kebijaksanaan negara-negara anggota terhadap impor dari negara-negara ketiga. Apakah rintangan terhadap impor kendaraan, atau tekstil dan pakaian jadi (*garments*) yang diterapkan salah satu negara anggota (apakah itu dilakukan melalui kuota, tarif atau *voluntary exports restraints*) harus diterapkan oleh setiap negara anggota lainnya? Apakah negara anggota yang bersangkutan harus menghapus rintangan nasionalnya dan menyesuaikan dengan negara-negara anggota lainnya? Ataukah akan ada semacam kompromi antara kedua ekstrem ini? Apabila demikian, apakah tingkat dan sifat proteksionisme Eropa pada tanggal 1 Januari 1993 nanti?

Inilah bentuk-bentuk pertanyaan yang diajukan masyarakat bisnis internasional. *Kertas Putih* hanya mencurahkan satu alinea saja kepada implikasi Pasar Tunggal itu bagi negara-negara ketiga:

“... identitas komersial Masyarakat Eropa harus digalang sehingga mitra-mitra dagang kita tidak akan diberi keuntungan dari terbukanya pasaran yang lebih luas tanpa mereka sendiri yang memberi konsesi yang sama.” (Alinea 19)

Alinea inilah yang memulai penggunaan istilah “resiprositas,” yang menandakan bahwa hubungan eksternal Pasar Tunggal Eropa akan didasarkan atas prinsip timbal-

balik. Prinsip resiprositas disinggung pula dalam Laporan Cecchini:

Harapannya mungkin adalah bahwa Pasar Eropa yang dinamis, yang berdagang dengan masyarakat dunia atas dasar daya saing yang membaik, akan memberikan banyak dorongan bagi pertumbuhan pasar-pasar dan perekonomian lain secara cukup mantap.

Sebagai imbalannya, pemerintah-pemerintah ME berhak untuk mengharapkan tanggapan yang memadai dari mitra-mitra ekonomi ME di luar negeri, terutama AS dan Jepang. Bila keuntungan-keuntungan pasaran bersama Eropa perlu dibagikan kepada dunia internasional, maka haruslah juga ada suatu kesediaan memikul beban tanggung jawab ekonomi global secara adil, dengan langkah-langkah keterbukaan pasar yang diperluas secara internasional atas dasar resiprositas yang jelas. (xix-xx)

Andreas van Agt, mantan Perdana Menteri Nederland yang kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan ME di Tokyo, pada kesempatan Hari Schuman dan peringatan 100 tahun lahirnya Jean Monnet yang diadakan di Jepang, mengatakan:

Tidakkah kami seharusnya memperjuangkan imbalan keuntungan tambahan, atas peluang-peluang yang baru tercipta bagi keuntungan pihak-pihak ketiga, sebanyak keuntungan ini akan mereka dapatkan dari usaha-usaha dan pengurbanan-pengurbanan kami menghapuskan hambatan-hambatan yang masih ada dalam kawasan kami? Adakah kewajiban politik, hukum atau moral pada kami Masyarakat Eropa untuk hanya membuka semua pintu masuk menuju “tambang emas” kesempatan-kesempatan tahun 1992 yang digali dengan susah payah, tanpa minta bayaran tiket masuk?⁵

Horst G. Krenzler, Direktur Jenderal Hubungan Luar Komisi Masyarakat Eropa, dalam pertemuan dengan 15 ahli dari ASEAN yang berkunjung ke Brussel pada

⁵Andreas van Agt, “Japan and the EC - Single Market 1992,” dikutip Toshiro Tanaka, “The European Community and Japan: Countdown to 1992” dalam *Japan Review of International Affairs* (Fall/Winter 1989), hal. 216.

bulan Maret 1988 mencoba melunakkan prinsip resiprositas ini dan berusaha meyakinkan wakil-wakil ASEAN bahwa penyelesaian Pasar Tunggal Eropa akan menstimulasi ekonomi dunia karena daya saing ME yang lebih besar menuju ke pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan ke pertumbuhan impor (*trade creation via growth effect*). Ia melanjutkan:

Penyelesaian Pasar Tunggal ... akan mengurangi biaya dan menyediakan suatu landasan pasar yang lebih luas bagi setiap orang yang memproduksi atau berdagang di Eropa. Di samping itu, ia akan menciptakan suatu lingkungan persaingan yang lebih ketat. Keberhasilan bagi Masyarakat Eropa dan perusahaan-perusahaan negara ketiga yang beroperasi di Eropa akan bergantung kepada mutu pengelolaannya, kepada kemampuan dan fleksibilitas sumber daya manusianya dan kepada kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dengan penuh imajinasi.⁶

Demikian pula halnya dengan Willy de Clercq, mantan Commissioner bagi Hubungan Luar ME, yang dalam suatu ceramah di London bulan Juli 1988 membanggakan bahwa:

Masyarakat Eropa sudah menjadi mitra dagang yang terbesar di dunia. Ekspor barang-barang manufaktur kami adalah 26% ekspor negara-negara OECD, dibandingkan dengan 14% untuk AS, dan 17% untuk Jepang. Bagian ekspor jasa-jasa kami di dunia bahkan lebih besar lagi. Sebagai akibatnya, kami mempunyai kepentingan vital dalam hal mempertahankan sistem perdagangan bebas di dunia.

Ia melanjutkan dengan menggariskan tiga prinsip yang akan membina kebijaksanaan perdagangan luar Komisi ME menuju ke tahun 1993. Pertama, ia mengakui bahwa program pasar internal akan otomatis menuju ke arah penguatan identitas eksternal ME sebagai akibat dari penghapusan Artikel

115 Perjanjian Roma. Ia juga menekankan bahwa ME akan tetap berpegang pada komitmennya dalam babak perundingan liberalisasi perdagangan dalam rangka GATT yang kini berjalan di Jenewa untuk tidak mengajukan rintangan-rintangan proteksionis yang baru.

De Clercq juga menjelaskan bahwa selama GATT belum mencakup perdagangan di bidang jasa, ME tidak melihat satu alasan pun mengapa keuntungan dari liberalisasi internal "harus diperluas secara unilateral ke negara-negara ketiga." Bank-bank Amerika Serikat dan Jepang, misalnya, yang sudah beroperasi di satu negara anggota tidak akan dibolehkan memperluas kegiatannya ke negara anggota yang lain, kecuali apabila bank-bank ME diberi hak-hak yang sama di negara-negara itu.

Akhirnya, ia menegaskan bahwa perbedaan-perbedaan yang besar antara kedua belas negara anggota harus dihapus. Ia mengatakan bahwa dalam banyak hal, restriksi impor itu dapat dihapus tanpa banyak kesulitan. Tetapi ada berbagai *hard-core cases* yang penghapusannya akan menyebabkan penderitaan besar di beberapa negara anggota, dan bahwa tindakan-tindakan protektif perlu diganti dengan "appropriate measures at community level" untuk masa peralihan tertentu.

Tidak lama kemudian, Komisi ME memberikan indikasi pertama tentang rencananya pada salah satu dari *hard-core cases* ini. Rencana ini bertujuan untuk menghapus sama sekali semua peraturan fiskal dan teknis yang memfragmentasi industri otomotif dan restriksi yang ketat atas subsidi negara. Komisi juga mengusulkan untuk menggantikan batasan-batasan kuantitatif

⁶C.P.F. Luhulima, "Menuju Pasar Tunggal Eropa," dalam *Kompas*, 15 April 1989.

atas ekspor kendaraan Jepang oleh Inggris, Prancis, Italia, Spanyol dan Portugal dengan suatu *plafond* yang berlaku bagi seluruh ME sebesar 1 juta kesatuan per tahun sampai akhir 1992, untuk memberikan kesempatan kepada produsen mobil Eropa menyesuaikan diri dengan iklim baru persaingan internasional. Komisi ME berkeyakinan bahwa hal ini merupakan satu-satunya jalan untuk menghilangkan kebiasaan akan batasan-batasan kuantitatif dalam sektor otomotif.

Reaksi Kawasan Asia-Pasifik

Bagaimanakah dunia bereaksi terhadap regionalisme Eropa ini? Berbagai skenario dapat dikemukakan tentang reaksi berbagai bagian dunia, akan tetapi kiranya yang paling penting ialah reaksi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Sejak pertengahan tahun 1960-an kawasan Asia-Pasifik sudah berusaha mengembangkan kekohesifan guna membangun suatu wilayah dan menginginkan pembangunan suatu mekanisme untuk pengembangan perimbangan terhadap Eropa.

Tigapuluh tahun terakhir ini kawasan Asia-Pasifik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan interdependensi baginya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Pada satu pihak, hal ini menandakan bahwa sifat interdependensi yang ada bertumpu pada sumber dan mekanisme pertumbuhan di kawasan ini. Pada lain pihak, perjuangan yang berkelanjutan untuk memper-tumbuhan ekonomi dapat menjelaskan penerimaan prinsip interdependensi, khususnya oleh negara-negara berkembang di kawasan ini.⁷

⁷M. Hadi Soesastro, "The Emerging Pacific Structure," dalam *Indonesian Quarterly*, Vol. 17, No. 1 (1989), hal. 83.

Pola interdependensi di kawasan Pasifik ini, yang menonjolkan baik persaingan, maupun komplementaritas, dianggap telah menciptakan iklim yang kondusif bagi kerja sama ekonomi. Interdependensi ini didasarkan atas suatu pembagian kerja yang khas dan dinamis, apa yang disebut pola "angsa terbang" (*flying geese*). Ia mengimplikasikan bahwa kawasan sebagai keseluruhan dapat maju dengan mengikuti negara-negara pendahulu, yaitu Amerika Serikat dan Jepang.

Pola pembangunan "angsa terbang" ini tampaknya dimungkinkan oleh keragaman kawasan Asia-Pasifik dan karena pembagian kerja memungkinkan setiap negara memanfaatkan keunggulannya untuk berkembang. Jadi, di kawasan Pasifik, Amerika Serikat-lah yang berkembang lebih dahulu sebagai negara terkemuka. Ia kemudian disusul oleh Jepang, yang mulai dengan mengembangkan sektor barang konsumen yang tidak tahan lama (*non-durables*), yang kemudian diikuti oleh barang-barang konsumen yang tahan lama (*durables*) dan barang-barang modal, dan akhirnya oleh pengembangan industri teknologi canggih. Kalau Jepang memerlukan satu abad untuk mencapai tingkat itu, maka Ekonomi-ekonomi Industri Baru (NIEs) Asia -- Korea, Taiwan, Hongkong dan Singapura -- melakukannya hampir dua kali lebih cepat daripada Jepang. Mereka kini diikuti dengan cepat oleh negara-negara ASEAN lainnya, yang sudah berhasil mengatasi kebergantungan yang terlampau besar pada produksi bahan baku, dan mengembangkan sektor-sektor industri. Dan pertumbuhan ASEAN ini dipimpin oleh Muangthai dan Malaysia, dan kini juga Indonesia, dengan Filipina menyusul tidak jauh di belakang. Muangthai, Malaysia dan Indonesia kini merupakan negara-negara yang tumbuh paling cepat di dunia, dan oleh

Bank Dunia sudah disebut Ekonomi-ekonomi Industri Baru kategori kedua.

Orang dapat pula berargumentasi bahwa struktur regional interdependensi ekonomi muncul dan diperkuat karena ia memungkinkan apa yang dapat disebut "rolling readjustment of industries." Tantangan utama bagi kawasan ini tampaknya berasal dari kenyataan bahwa melanggengkan proses ini memerlukan kerjasama yang lebih besar, karena tantangan akan bertambah dan penyesuaian-penyesuaian oleh industri-industri yang lebih tua akan lebih menyakitkan. Ada usul yang menyarankan agar proses "rolling readjustment" dibuat menjadi inti setiap kelembagaan kerjasama regional di Asia-Pasifik ini.⁸

Kendati demikian, observasi tentang interdependensi berikut ini perlu diperhatikan:

Interdependensi memiliki dua aspek yang berbeda-beda tetapi saling berhubungan: meningkatnya perkaitan ekonomi antar negara melalui arus perdagangan dan keuangan, dalam pengertian yang sedikit berbeda, hubungan timbal balik yang kompleks di antara kekuatan-kekuatan utama sistem ekonomi dunia. Apa yang diperlukan dalam interdependensi itu adalah membesarnya resiko, dan, karena pengetahuan biasanya tertinggal di belakang perubahan yang kompleks, membesarnya ketidakpastian. Lebih mendalam lagi, interdependensi berarti bahwa peluang-peluang untuk memperoleh keuntungan bersama ditingkatkan kecuali kalau kerawanan juga semakin besar.⁹

Faktor lain yang dapat ditonjolkan sebagai penyebab keberhasilan perkembangan di kawasan Asia-Pasifik ini ialah sejumlah faktor dan kebijaksanaan domestik, seperti

kebijaksanaan yang berorientasi ekspor, tingkat investasi yang tinggi, khususnya untuk pengembangan sumber daya manusia, yang didukung oleh tingkat tabungan dalam negeri yang tinggi, peran aktif sektor swasta dalam ekonomi, perbaikan-perbaikan yang besar dalam pertanian, dan kebijaksanaan penyesuaian ekonomi yang berhasil.¹⁰ Kiranya bukan tempatnya di sini untuk menjelaskan mengapa negara-negara Asia-Pasifik membangun ekonominya sesuai dengan strategi itu.

Menuju Suatu Organisasi Tandingan di Kawasan Asia-Pasifik?

Sampai kini belum ada suatu organisasi Asia-Pasifik, yang mencakup kerja sama antara semua negara di kawasan ini, meskipun usaha-usaha telah dibuat sejak pertengahan dasawarsa 1960-an, ketika dua sarjana Jepang, Kiyoshi Kojima dan Hiroshi Kurokawa, mengajukan gagasan kawasan perdagangan bebas di Pasifik, yang didukung oleh mantan Menteri Luar Negeri Saburo Okita. Mungkin gagasan kerjasama ekonomi Asia-Pasifik Perdana Menteri Robert (Bob) Hawke, yang diajukan di Seoul bulan Januari 1989 dan dibahas dalam suatu Sidang Menteri di Canberra, *Asia-Pacific Economic Cooperation Conference* (6-7 November 1989), merupakan awal yang baru ke arah usaha pelebagaan kerjasama ekonomi Asia-Pasifik, menandingi pembentukan Pasar Tunggal Eropa. Inti konsep ini ialah pengembangan suatu arus informasi

⁸Harland Cleveland, "The Future of the Pacific Basin," dalam *Pacific Viewpoint* 25 (1984), hal. 6-9.

⁹Sylvia Ostry, "Interdependence: Vulnerability and Opportunity," *Economic Impact*, No. 62, 1988, hal. 71.

¹⁰Saburo Okita, "Pacific Development and Its Implications for the World Economy," dalam *The Pacific Basin - New Challenges for the United States*, Ed. James W. Morley (New York: Academy of Political Science, 1986), hal. 26-27.

dan analisis yang lebih baik dan memungkinkan identifikasi dan pemajuan kepentingan bersama dan membantu melanggengkan momentum ekonomi yang menonjol di kawasan Asia-Pasifik.

Kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan November itu berkisar pada anggapan bahwa perkembangan lanjut ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, dengan segala implikasinya bagi perbaikan tingkat hidup rakyatnya, bergantung pada pengembangan dan perbaikan sistem perdagangan multilateral melalui perluasan dan ketaatan kepada peraturan-peraturan GATT. Dengan keberhasilan Babak Uruguay dan usaha-usaha berikutnya, kawasan Asia-Pasifik tidak hanya dapat menjamin masa depan ekonominya sendiri, melainkan juga memperbaiki perkembangan ekonomi global. Semua peserta mengyakan bahwa suatu sistem perdagangan multilateral yang terbuka tetap merupakan faktor penentu bagi pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dan tidak satu delegasi pun dalam konperensi itu mendukung pembentukan suatu blok perdagangan di kawasan Asia-Pasifik.

Kendati demikian, APEC dapat dianggap sebagai semacam lembaga kerjasama ekonomi Asia-Pasifik, karena dua sidang menteri berikutnya diadakan di Singapura (30-31 Juli 1990) dan di Korea tahun 1991, sedangkan sidang-sidang pejabat tinggi menyusul Konperensi Canberra sudah diadakan dua kali, yang terakhir di Singapura pada tanggal 20-21 Mei 1990. Enam proyek kerjasama APEC telah dapat disetujui pelaksanaannya, yaitu tinjauan data perdagangan dan investasi, promosi perdagangan, ekspansi investasi dan alih teknologi di kawasan Asia-Pasifik, inisiatif pengembangan multilateral sumber daya manusia, kerja sama energi regional, dan konservasi

sumber daya laut. Berbagai kelompok kerja akan dibentuk APEC untuk menangani proyek-proyek ini.

Mekanisme APEC ini tampaknya diilhami suatu organisasi yang lain, yaitu *Pacific Economic Cooperation Conference* (PECC). Organisasi ini sudah berjalan selama sepuluh tahun, dan beranggotakan negara-negara yang sama dalam bentuk *tripartit*, yang mencakup akademikus, kalangan bisnis dan pejabat-pejabat pemerintah dalam kapasitas pribadi. Dengan demikian, PECC amat bermanfaat bagi pencarian bentuk-bentuk organisatoris lainnya, tanpa komitmen formal salah satu pemerintah.

Jadi APEC lebih merupakan suatu proses daripada suatu bangunan. Inisiatif Australia didorong -- di samping oleh kekhawatiran pembentukan Pasar Tunggal Eropa, yang tampaknya merupakan sebab pengusulan pembentukan organisasi-organisasi kawasan Asia-Pasifik sejak pertengahan tahun 1960-an itu, dan persetujuan antara Amerika Serikat dan Kanada untuk mendirikan zone perdagangan bebas antara keduanya di dasawarsa 1990-an ini -- juga oleh keinginan untuk membongkar rintangan-rintangan tarif dan non-tarif pada saat perdagangan intra-Pasifik sudah mendekat US\$200 milyar. Suatu organisasi menteri-menteri ekonomi Pasifik akan mampu "meniadakan rintangan-rintangan yang menghambat perdagangan dan pariwisata, melakukan studi tentang kawasan, mengembangkan standar umum bagi produk-produk, memantau arus keuangan dan investasi, membangun pangkalan data elektronika, dan memperbaiki pertukaran informasi melalui pemanfaatan bersama atas fasilitas-fasilitas satelit dan telekomunikasi. Ada kesempatan yang amat

besar pula bagi persetujuan-persetujuan penerbangan dan pengkoordinasian jadwal dan alur perkapalan.”¹¹

APEC dapat dianggap sebagai suatu mekanisme yang dapat menjawab tantangan yang datang dari Eropa 1992 secara bersama

dan menjurus ke arah suatu organisasi Asia-Pasifik yang formal, apalagi kalau *Ruang Eropa Bersama* yang akan dibentuk Masyarakat Eropa dan *European Free Trade Zone* (EFTA) akan mencakup pula negara-negara Eropa Timur, yang kini masih tergabung dalam *COMECON*, dan berkembang sebagai suatu kawasan pertumbuhan yang setingkat dengan negara-negara Asia-Pasifik.

¹¹ *South*, November 1989, hal. 13.

Arah Politik Luar Negeri RRC Pasca Tian An Men: Prakiraan Dekade 1990-an

Rizal SUKMA

HADIRNYA Republik Rakyat Cina (RRC) sebagai salah satu negara besar (*great power*) dalam percaturan politik global dan regional dewasa ini, merupakan realitas yang terlalu penting untuk diabaikan. Meskipun dari sudut ekonomi Cina tetap dikategorikan sebagai negara yang sedang berkembang, namun keberhasilannya mengembangkan kemampuan teknologi, khususnya persenjataan nuklir, menempatkan Cina pada posisi strategis dalam perimbangan kekuatan Timur-Barat.¹ Dengan kata lain, Cina dapat dipandang sebagai kekuatan yang mampu mempengaruhi perimbangan strategis (*strategic balance*) antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet (US) dalam konteks persaingan antara keduanya.

Terangkatnya posisi RRC ke peringkat global dan strategis dalam politik dunia mulai terlihat sejak perpecahan persekutuan

Cina-Soviet, adanya pengakuan Cina sebagai aktor global oleh AS, dan masuknya negara "naga" ini sebagai anggota PBB serta memiliki hak veto sama dengan AS dan US. Kehadiran RRC sebagai *great power* semakin diperkuat sejak dicanangkannya program Empat Modernisasi (*Si Xiandaihua*) oleh Deng Xiaoping pasca Mao Zedong. Mulai saat itu terlihat pembangunan ekonomi, industri dan teknologi besar-besaran di dalam negeri. Semua upaya itu diarahkan untuk membawa Cina kepada terbentuknya sebuah negara modern dan kuat di awal abad ke-21.² Hasil-hasil yang dicapai memang cukup mengesankan. Beberapa tahun terakhir ini Cina berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya sampai sekitar 10% per tahun.

Sejalan dengan perubahan-perubahan kebijaksanaan dalam negeri, tampak pula perubahan-perubahan di lingkup politik luar negerinya. Perhatian politik luar negeri Cina

¹Peter Berton, "The Asian Strategic Balance and China," dalam *Beyond China's Independent Foreign Policy*, ed. James C. Hsiung (New York: Praeger, 1984), hal. 7.

²Parris H. Chang, "Chinese Politics: Deng's Turbulent Quest," *Problems of Communism* 30 (Januari-Februari 1981), hal. 1-21.

lebih diarahkan pada upaya mendukung kelangsungan modernisasi ekonomi, baik melalui bantuan lembaga-lembaga keuangan internasional maupun kerjasama dengan negara-negara maju seperti AS, Jepang, dan Eropa Barat. Koeksistensi damai mewarnai penampilan Beijing dalam mengelola hubungan dengan negara-negara tetangga, terutama di kawasan Asia-Pasifik melalui penataan hubungan segi tiga strategis (*strategic triangle*) AS-RRC-US. Namun, tujuan akhir dari pembangunan ekonomi dan pendekatan damai dalam urusan luar negeri itu tetap diacukan untuk mengubah pola kekuatan yang didominasi oleh *super power*, baik pada peringkat global maupun regional, dengan cara membentuk *disan daguo* (kekuatan ketiga) di mana Cina sendiri yang akan berperan sebagai pemimpinnya.³

Keberhasilan yang mengesankan baik dalam modernisasi ekonomi maupun dalam lingkup politik luar negerinya itu menjadi tidak pasti setelah terjadinya peristiwa pembantaian mahasiswa di Tian An Men (Gerbang Perdamaian Langit) tanggal 3-4 Juni 1989. Beralihnya dominasi kekuasaan ke tangan faksi konservatif, setelah pembersihan terhadap pendukung "pemberontakan kontra-revolusi" (*fangeming baoluan*) pimpinan Zhao, segeralah diikuti oleh perubahan kebijaksanaan domestik. Model pembangunan yang selama ini dijalankan mantan Sekretaris Jenderal PKC Zhao Ziyang disebut sebagai reformasi yang mendorong "liberalisasi borjuis" dan "westernisasi."⁴ Cina kembali berusaha menampilkan model pembangunan yang dirasa lebih sejalan de-

ngan prinsip-prinsip sosialisme Cina (*Zhongguode Shehui Zhuyi*).

Perubahan di dalam negeri Cina itu berlangsung bersamaan dengan perubahan dalam situasi internasional. Perubahan-perubahan dalam politik domestik dan luar negeri Soviet telah mempengaruhi iklim hubungan Timur-Barat. Perkembangan hubungan internasional dekade 1990-an tampaknya ditandai oleh berakhirnya era "Perang Dingin Kedua" dekade sebelumnya. Restrukturisasi hubungan yang dilakukan AS dan US, terutama dalam konteks perimbangan kekuatan Timur-Barat, ikut mempengaruhi tata hubungan internasional kawasan Asia-Pasifik. Dalam perkembangan demikian, tatanan segi tiga strategis AS-RRC-US yang sering dipandang sebagai penentu keadaan di kawasan akan ikut mengalami pergeseran-pergeseran penting.

Berangkat dari asumsi bahwa perubahan di lingkup domestik dan atau di lingkungan internasional cenderung diikuti oleh perubahan-perubahan dalam politik luar negeri sebuah negara,⁵ tulisan ini akan menelaah

³David C.L. Auw, "Communist China and Power Configuration in the Asia-Pacific Region," *Issues & Studies*, vol. XIX, no. 10 (Oktober 1983): hal. 53.

⁴*Far Eastern Economic Review*, 12 Oktober 1989. Untuk selanjutnya disingkat *FEER*.

⁵Pandangan teoritis ini mendasari studi tentang politik luar negeri yang dilakukan oleh para penganut aliran *scientific* yang mengasumsikan politik luar negeri sebagai hasil perkaitan (*linkage*) antara lingkungan eksternal dan internal. Bahasan teoritis tentang *linkage* dalam politik luar negeri, antara lain, lihat James N. Rosenau, *Scientific Study of Foreign Policy* (London: Frances Pinter, 1980). Studi tentang Cina yang menggunakan pendekatan ini, antara lain, lihat Byong-Moo Hwang, "Linkage Politics in Chinese Foreign Policy-Making," *The Journal of East Asian Affairs*, vol. II, no. 1 (Spring/Summer 1982), hal. 15-42; Akihiko Tanaka, "Internal-External Linkage in Chinese International Conflict Behavior: A Model," *Journal of Northeast Asian Studies*, vol. II, no. 1 (Maret 1983), hal. 39-57; dan Chen-min Chao, "Communist China's Independent Foreign Policy: The Link with Domestic Affairs," *Issues & Studies*, vol. XXII no. 10 (Oktober 1986), hal. 13-32.

arah politik luar negeri RRC pasca tragedi Tian An Men Juni 1989. Untuk itu bahasan akan dipusatkan pada telaah atas tanggapan Barat dan kalkulasi Cina dalam kerangka politik segi tiga strategis, dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan RRC di lingkup politik luar negerinya.

Tanggapan Barat dan Kalkulasi Segi Tiga Strategis

Pembantaian di Tian An Men yang diprakarsai oleh faksi konservatif PKC memang merupakan tindakan yang cukup "efektif" untuk mencapai tujuan jangka pendek mereka, yaitu menghentikan aksi demonstrasi dan menyingkirkan faksi moderat pimpinan Zhao Ziyang dari struktur kekuasaan di Zhongnanhai.⁶ Namun, keberhasilan itu harus dibayar mahal dengan merosotnya citra positif RRC di mata dunia internasional khususnya negara-negara Barat. Adanya perubahan di dalam negeri sejak Deng Xiaoping berkuasa, telah menggeser citra Cina sebagai negara komunis yang bertahan dengan kekakuan ideologis menjadi negara yang berorientasi pada pragmatisme ekonomi. Maka, banyak pihak tidak menduga bahwa pemerintah Beijing akan menggunakan kekerasan untuk meredam gerakan mahasiswa pro-demokrasi.

Reaksi paling keras datang dari Amerika Serikat. Sehari setelah aksi kekerasan itu terjadi, Presiden George Bush segera mengumumkan langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintahnya, yaitu menunda transaksi dagang antar pemerintah dan ekspor persenjataan, menunda semua kunjungan pejabat-pejabat militer senior, mempertimbang-

kan permohonan para mahasiswa Cina di AS untuk memperpanjang masa tinggalnya, dan memberikan bantuan obat-obatan untuk mahasiswa yang terluka melalui Palang Merah. Sanksi AS itu mencakup penundaan penjualan perangkat militer sejumlah US\$600 juta yang sejauh ini baru diberikan sekitar 10%, empat radar sejumlah US\$62 juta, dan peralatan pembuat granat sejumlah US\$38 juta.⁷ Washington juga mengumumkan bahwa pihaknya akan berusaha menunda pemberian pinjaman baru dari lembaga-lembaga finansial internasional kepada RRC.

Dalam pertemuan di Paris bulan Juli 1989, negara-negara Eropa Barat dan Jepang yang tergabung dalam Kelompok-7 negara industri sepakat untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Cina. Awal bulan Oktober 1989, *Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (COCOM)*⁸ memutuskan untuk menunda rencana pengurangan pembatasan ekspor teknologi sensitif berdayaguna-ganda (*dual-use technology*) ke Cina, seperti komputer, laser, perangkat-perangkat mesin, mikroelektronik dan perlengkapan lainnya yang bisa dipergunakan untuk keperluan persenjataan antikapal selam.⁹

Bank Dunia dan Jepang, di bawah tekanan AS dan Eropa Barat, menunda keputusan untuk memberikan pinjaman baru sebesar US\$10 triliun.¹⁰ Penundaan Bank Du-

⁷FEER, 15 Juni 1989.

⁸Organisasi informal negara-negara NATO dan Jepang yang mengatur ekspor ke negara-negara komunis.

⁹Wenguang Shao, "China's Relations with the Superpowers," *Survival*, vol. XXXII, no. 2 (Maret/April 1990), hal. 162.

¹⁰Lowel Dittmer, "The Tiananmen Massacre," *Problems of Communism*, vol. XXXVIII (September-Oktober 1989), hal. 13. Lihat Juga FEER, 6 Juli 1989.

⁶Pusat pemerintahan Cina, yang terletak di sebelah Lapangan Tian An Men (Gerbang Perdamaian Langit).

nia terdiri dari 7 usulan pinjaman sejumlah US\$780,2 juta yang sebagian besar dimaksudkan untuk membiayai proyek-proyek transportasi dan pembangunan industri di Shanghai.¹¹ Sedangkan Jepang menunda pemberian bantuan bilateral kepada Cina, termasuk rencana bantuan sejumlah Y810 milyar (US\$5,9 milyar) bagi 42 proyek yang akan dimulai pada tahun fiskal 1990.¹² Bank Pembangunan Asia ikut pula menunda keputusannya untuk memberikan pinjaman baru sejumlah US\$1 triliun, dan banyak perusahaan-perusahaan patungan yang mengurangi produksi dan menunda penanaman modal baru.¹³

Meskipun tekanan AS dan Barat itu diakui dapat menambah kesulitan ekonomi Cina, kepemimpinan konservatif di Beijing memperlihatkan reaksi yang agak keras. Dalam pidato penyambutan empat duta besar baru untuk RRC dari Afrika dan Amerika Selatan, P. Li Peng memperingatkan pihak Barat agar tidak ikut mencampuri masalah-masalah dalam negeri Cina dengan dalih membela hak asasi manusia dan kemerdekaan. Li juga menegaskan bahwa Cina akan mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh Barat itu.¹⁴ Perkembangan seperti ini jelas membawa masalah serius bagi hubungan Washington-Beijing, yang sejak awal tahun 1989 sebenarnya sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda penurunan hubungan yang bersumber pada soal-soal hak asasi manusia. Hubungan AS-Cina sempat tegang ketika AS mengundang pem-

bangkang terkemuka Cina Fang Lizhi dalam acara jamuan kehadiran Bush di Cina.¹⁵ Perlindungan yang kemudian diberikan oleh Kedutaan AS di Beijing kepada Fang, mempergencar tuduhan bahwa AS berada di belakang aksi-aksi demonstrasi mahasiswa.

Meskipun AS dan RRC bertahan pada sikap "keras" masing-masing, sebenarnya baik Washington maupun Beijing sama-sama menghadapi pertimbangan sulit. Bagi AS krisis di Beijing telah menimbulkan perdebatan mengenai kebijaksanaan seperti apa yang seharusnya dijalankan AS. Perdebatan itu tercermin dari berkembangnya dua pendapat yang bertolak belakang.¹⁶ Pendapat pertama menginginkan tindakan yang lebih keras dalam "menghukum" Cina, termasuk mencabut status RRC sebagai *Most-Favored-Nation* (MFN). Pendapat kedua tetap menginginkan pemeliharaan hubungan AS-RRC karena hubungan baik kedua negara sejalan dengan kepentingan nasional AS.

Presiden Bush tampaknya lebih condong kepada pendapat kedua dan sejak awal ia telah menegaskan bahwa ia tidak ingin melihat hubungan yang selama ini telah terbina baik menjadi rusak oleh langkah-langkah yang emosional.¹⁷ Meskipun pemerintahan Bush sempat melontarkan reaksi keras setelah peristiwa Tian An Men, sikapnya segera melunak. Pertemuan Menlu RRC Qian Qichen dan Menlu AS James Baker pada

¹¹ *FEER*, 6 Juli 1989.

¹² Shao, "China's Relations," hal. 162.

¹³ Lowel Dittmer, "China in 1989: The Crisis of Incomplete Reform," *Asian Survey*, vol. XXX, no. 1 (Januari 1990), hal. 37.

¹⁴ *South China Morning Post*, 13 Agustus 1989. Selanjutnya disingkat *SCMP*.

¹⁵ Henri d'Antoine, "The Great Leap Backwards," *Pacific Defence Reporter* (Desember 1989/Januari 1990), hal. 40.

¹⁶ Shao, "China's Relations," hal. 163. Lihat juga Steven W. Mosher, "The Tragedy of U.S. China Policy," *The Heritage Foundation*, Lecture No. 213, 1989, hal. 6.

¹⁷ Lihat konperensi pers George Bush tanggal 5 Juni 1989 seperti yang dikutip oleh *FEER*, 15 Juni 1989.

bulan Juli dan Agustus 1989 di Geneva dan Paris, menandai cairnya keputusan Bush untuk membekukan kontak-kontak tingkat tinggi Washington-Beijing.¹⁸ Keputusan Bush untuk mengirim Penasihat Keamanan Nasional Brent Scowcroft dan Deputy Menlu Lawrence Eagleburger secara rahasia untuk bertemu dengan para pemimpin Cina di Beijing bulan Juli dan Desember 1989 memperlihatkan hasrat Washington untuk segera memperbaiki kembali hubungan AS-RRC.¹⁹

Bulan November 1989, Presiden Bush memveto usulan sanksi tambahan yang diajukan Kongres. Sebelumnya ia mengizinkan kembali pengiriman tiga pesawat Boeing 757-200 ke Cina meskipun sistem navigasi pesawat itu dapat dipergunakan bagi kepentingan militer. Bulan Oktober 1989, pemerintah AS melanjutkan kembali latihan yang diberikan kepada 40 warga RRC di bidang modernisasi pesawat tempur seperti F-8.

Upaya-upaya Washington untuk memulihkan hubungan dengan Cina mengundang kritik tajam dari pihak Kongres. Sikap lunak Bush dilihat sebagai cerminan keraguan pemerintah AS dalam menempatkan arti penting Cina secara proporsional dalam kalkulasi strategis Washington. Para pengkritik Bush mengatakan bahwa Cina sekarang ini tidak lagi memiliki arti penting seperti 10 tahun yang lalu dengan adanya perkembangan di Eropa Timur dan peredaan ketegangan AS-US.¹⁹ Namun, tanggal 19 Desember 1989 Bush mengurangi beberapa sanksi ekonomi terhadap Cina dengan mencabut larangan penambahan pinjaman dari Bank Expor-Import. Washington juga menyetujui rencana peluncuran 3 satelit AS oleh Cina.²⁰

Lebih jauh, Presiden Bush menegaskan kembali bahwa Cina tetap memiliki posisi strategis dalam politik dunia, dan hal ini penting artinya bagi AS.²¹

Dari sudut pertimbangan strategis, Cina memang memiliki arti penting yang tidak dapat disangkal dengan adanya hubungan konstruktif AS-RRC. Selama lebih dari satu dekade belakangan ini, hubungan Washington-Beijing terbukti sebagai penguat stabilitas di Asia bahkan di dunia. Meskipun tampaknya sudah tidak relevan bagi AS untuk berbicara tentang "kartu Cina," berpihaknya RRC kepada AS dalam menghadapi US merupakan faktor yang cukup penting dalam kalkulasi geopolitik Washington. Berkembangnya permusuhan antara AS dan RRC akan memaksa Washington untuk menilai kembali perimbangan kekuatan global, yang pada gilirannya akan mempersulit para pengambil keputusan di Gedung Putih.

Kalau meredanya ketegangan dalam hubungan AS-US sekarang ini terjadi dalam suasana konflik Cina-Soviet, posisi tawar-menawar (*bargaining position*) Cina terhadap AS akan "lemah." Artinya, Washington berpeluang untuk memainkan "kartu Soviet" terhadap Cina. Seperti yang berlangsung selama dekade 1970-an sampai awal dekade 1980-an, AS menempati posisi yang menguntungkan dalam lingkup segi tiga strategis (*strategic triangle*) AS-RRC-US. Washington menduduki posisi *pivot* yang bebas mengembangkan hubungan baik dengan Beijing dan Moskow. Sementara itu, Soviet dan Cina mengalami berbagai kesulitan dalam mengembangkan hubungan positif di antara mereka.

Namun, situasi menguntungkan seperti itu sudah tidak dimiliki oleh Washington

¹⁸SCMP, 12, 15 dan 26 Agustus 1989.

¹⁹Andrew B. Brick, "Rebuilding US-China Relations," *Backgrounders* (25 Januari 1990), hal. 2.

²⁰Shao, "China's Relations," hal. 164.

²¹FEER, 21 Desember 1989.

memasuki dekade 1990-an ini. Tercapainya "jabat tangan" antara Mikhail Gorbachev dan Deng Xiaoping bulan Mei 1989 memperkuat terjadinya pergeseran dalam tata hubungan segi tiga Washington-Beijing-Moskow. Washington tidak dapat lagi memanfaatkan hubungan negatif Beijing-Moskow seperti pada masa-masa sebelumnya. Hubungan negatif antara AS dan RRC jelas akan lebih menguntungkan Soviet. Karenanya, mempertahankan hubungan positif dua arah (baik terhadap US maupun RRC) merupakan pilihan rasional yang tidak merugikan walaupun tidak dikatakan dapat memperbesar keuntungan bagi Washington.²²

Faktor ekonomi juga menjadi bahan pertimbangan penting bagi Washington dalam merumuskan kebijaksanaan Cina-nya. Pada tahun 1988, perdagangan AS-Cina mencapai jumlah US\$44 milyar dan investasi AS di Cina mencapai US\$3 milyar. Pada tahun 1989, meskipun terlihat penurunan sejak memburuknya hubungan pasca Tian An Men, jumlah perdagangan kedua negara mencapai US\$17,9 milyar.²³ Di samping itu, sebelum Juni 1989 AS juga memberikan bantuan berupa teknologi berdayaguna ganda seperti helikopter, pesawat pengangkut, dan rudal-rudal anti-tank.²⁴ Sementara, AS membutuhkan produk-produk Cina seperti peralatan elektronik, besi dan baja, minyak, dan sebagainya (lihat tabel).

²²Bahasan yang lebih komprehensif tentang arti penting RRC dalam kalkulasi AS, lihat Rizal Sukma, "RRC dan Kalkulasi Politik Luar Negeri AS," *Media Indonesia*, 17 Januari 1990.

²³Brick, "Rebuilding US-China," hal. 2. Lihat juga Direction of Trade Statistic, IMF (Maret 1990), hal. 133.

²⁴Gary Klintworth, "China: Asia/Pacific After Tiananmen," *Pacific Research* (Agustus 1989), hal. 4.

10 PRODUK UTAMA YANG DIIMPOR DARI CINA PADA 1989

Nama Produk	Jumlah Impor dalam Juta US\$
Pakaian	2.657,2
Barang-barang Mainan dan Olah Raga	1.725,4
Barang-barang Elektronik	1.638,0
Alas Kaki	721,0
Barang-barang untuk Perjalanan	683,0
Bahan Mentah Minyak Bumi	504,1
Mesin Pembangkit Tenaga	330,9
Ikan	297,1
Plastik	237,1
Besi dan Baja	225,2
Jumlah Impor.	11.938,5

10 PRODUK UTAMA YANG DIEKSPOR KE CINA PADA TAHUN 1989

Nama Produk	Jumlah Ekspor dalam Juta US\$
Mesin Pembangkit Tenaga	1.844,5
Biji-bijian	1.126,5
Pesawat Terbang	536,2
Pupuk	487,4
Barang-barang Kimia	347,0
Benang dan Pabrik Kapas	280,4
Kayu dan Pulp	269,4
Peralatan Profesi dan Peratalan Ilmiah	278,7
Besi dan Baja	267,7
Mesin Perlistrikan	243,9

Sumber: Andrew B. Brick, Bryan T. Johnson, dan Thomas J. Timmons, "Washington's Agonizing Decision: To Extend or Revoke China's Most-Favored-Nation Trade Status," *Background*, No. 104 (8 Mei 1990).

Bagi RRC, bantuan dari AS memang tidak bisa dijadikan sandaran sepenuhnya. Sejak naiknya Ronald Reagan sebagai presiden, hubungan Cina-AS sempat menurun karena kebijaksanaan Washington terhadap Taipei, terutama dalam hal penjualan senjata AS yang ditingkatkan kembali. Di samping itu, AS juga memberikan bantuan teknologi dan finansial terhadap Taiwan. Pemberian bantuan serupa terhadap RRC tersendat-sendat karena Washington khawatir terhadap ambisi Beijing untuk menyatukan kembali Taipei ke Cina daratan. Sikap AS ini dilihat Cina sebagai sikap yang tidak menghormati kedaulatannya, di samping dapat menjadi sumber kecemasan faksi konservatif di dalam negeri terhadap politik luar negeri Deng yang dekat dengan AS dan Barat.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi RRC dalam mengelola hubungan dengan AS, mendorongnya untuk menganut strategi politik luar negeri independen pada bulan September 1982. Dengan strategi ini dikatakan bahwa Beijing tidak akan pernah "meningkatkan diri kepada salah satu kekuatan besar (*big power*) atau kelompok kekuatan (*group of powers*) tertentu." Untuk itu Cina merasa perlu menarik dirinya agar tidak terlalu dekat dengan AS dan mengupayakan normalisasi hubungan dengan Uni Soviet.²⁵ Sejak saat itu terlihat kemajuan dalam hubungan Moskow-Beijing, di samping tetap dipertahankannya hubungan baik Beijing-Washington. Hubungan AS-US yang ditandai oleh peningkatan ketegangan selama dekade 1980-an, menempatkan Beijing pada posisi

paling menguntungkan dalam segi tiga strategis AS-RRC-US. Cina memiliki ruang gerak yang bebas untuk mengembangkan hubungan baik dengan kedua superpower, dan posisi seperti ini jelas memberi keuntungan bagi Cina yang sedang menjalankan Empat Modernisasi yang memerlukan prasyarat berupa lingkungan eksternal yang aman dan bersahabat.

Proses normalisasi hubungan dengan Soviet secara strategis meningkatkan arti penting RRC dalam kalkulasi politik segi tiga AS. Para analis Barat sendiri melihat perkembangan itu telah menurunkan pengaruh Washington terhadap Beijing.²⁶ Namun, tampilnya Gorbachev ke puncak kekuasaan di Kremlin yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam politik luar negeri Soviet telah membawa pergeseran baru dalam hubungan AS-US. Selama tahun 1987 sampai 1989, Soviet mengambil langkah-langkah positif bagi detente antar superpower. Dalam kesepakatan mengenai *Intermediate Nuclear Force* (INF) dengan AS, US sepakat untuk mengurangi rudal-rudal jarak menengah dari mandala Eropa. Bulan Desember 1988, Gorbachev mengumumkan rencananya untuk mengurangi personel angkatan bersenjata sampai 500.000 orang dalam waktu dua tahun dan 50.000 pasukan, 800 pesawat tempur, dan 1.000 tank di Eropa Timur.²⁷ Bulan Februari 1989, Moskow menarik semua pasukannya dari Afghanistan. Sejak itu bisa dikatakan pola hubungan AS-US bergeser ke arah yang lebih baik.

Dari perspektif segi tiga strategis, dalam keadaan hubungan AS-US sedang membaik agak sulit bagi Cina untuk mencoba memainkan "kartu Soviet" terhadap AS, sama

²⁵Studi yang baik tentang politik luar negeri independen ini antara lain lihat James C. Hsiung, ed., *Beyond China's Independent Foreign Policy* (New York: Praeger Publisher, 1985); Robert G. Sutter, *Chinese Foreign Policy: Development After Mao* (New York: Praeger Publisher, 1986); dan Samuel S. Kim, ed., *China and the World: Chinese Foreign Policy in the Post-Mao Era* (Colorado: Westview Press, 1984).

²⁶Brick, "Rebuilding US-China," hal. 2-3.

²⁷Edward Furdson, "Optimism but Major Difficulties Remain," *Pacific Defence Reporter* (Desember 1989/Januari 1990), hal. 85.

halnya dengan AS yang juga sulit untuk menggunakan "kartu Soviet" dalam menghadapi Cina. Di samping itu, hubungannya dengan Soviet sejak Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Mei 1989 belum berjalan lancar sepenuhnya dan masih diwarnai oleh ketidakpastian. Ketidakpastian tentang masa depan hubungan Beijing-Moskow antara lain bersumber dari perbedaan pandangan mereka terhadap perkembangan politik di dalam negeri masing-masing. Misalnya, dalam kunjungannya ke Jerman Barat setelah KTT Cina-Soviet, Gorbachev menegaskan bahwa Uni Soviet tidak akan pernah menggunakan kekerasan dalam persoalan pembaruan politik. Menlu Eduard Shevardnadze dalam pidatonya bulan September 1989 di PBB menentang keras apa yang disebutnya sebagai "intoleransi ideologis dan politik" serta memuji "supremasi nilai-nilai kemanusiaan yang universal."²⁸ Sedangkan Beijing memandang perubahan di Soviet dan Eropa Timur sebagai sesuatu yang tidak sepatutnya terjadi. Kekalahan partai-partai komunis di Eropa Timur dilihat Beijing sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima secara ideologis.

Dengan demikian, Cina harus berpikir dua kali untuk mengambil sikap konfrontatif terhadap AS. Ketidakinginan RRC untuk membiarkan hubungan Beijing-Washington terus memburuk antara lain terungkap dari pernyataan para pemimpin Zhongnanhai segera setelah peristiwa Juni 1989. Dalam pidato tanggal 9 Juni 1989, Deng Xiaoping menjamin bahwa Cina tidak akan mengubah kebijaksanaannya selama ini termasuk kebijaksanaan pintu terbuka.²⁹ Ketika menerima

Penasihat Keamanan Nasional Brent Scowcroft bulan Desember 1989, Deng mengatakan bahwa "meskipun terdapat perbedaan, hubungan AS-RRC harus terus ditingkatkan. Karena hal ini penting artinya bagi perdamaian dunia."³⁰ Hal yang sama juga ditegaskan oleh Duta Besar di AS, Han Xu.³¹ Di samping itu, upaya-upaya membuka kembali kontak dengan AS yang dilakukan oleh Menlu Qian Qichen selama bulan Juli-Agustus 1989 dapat dilihat sebagai bagian dari upaya mempertahankan hubungan baik Washington-Beijing.

Di samping keterbatasan strategis dalam konteks politik segi tiga, keterbatasan ekonomi di dalam negeri menjadi pertimbangan penting dalam kalkulasi politik luar negeri Cina. Tujuan untuk menjadikan RRC sebagai negara modern dan kuat di awal abad ke-21 memerlukan modernisasi. Untuk itu baik faksi moderat maupun konservatif sepakat bahwa tujuan demikian hanya dapat dicapai melalui program Empat Modernisasi (*Si Xiandaihua*). Sejak program ini dijalankan mulai tahun 1978, perkembangan ekonomi Cina relatif menunjukkan hasil yang mengesankan.

Kemajuan ekonomi yang dicapai Cina selama satu dekade Empat Modernisasi sangat didukung dan mengandalkan politik pintu terbuka (*open door policy*) yang dapat mendorong perolehan keuntungan dari perdagangan luar negeri.³² Jumlah ekspor dan impor tahun 1987 mencapai US\$82,68 mil-

²⁸Shao, "China's Relations," hal. 165.

²⁹Pidato Deng Xiaoping seperti yang dikutip oleh *Inside China Mainland* (Agustus 1989), hal. 16-17. Untuk selanjutnya diringkas *ICM*.

³⁰*FEER*, 21 Desember 1989.

³¹"Quarterly Cronicle," *China Quarterly*, no. 120 (Desember 1989), hal. 916.

³²Fang Zong Yin, "China Open Door Policy and the China Market," *The Korean Journal of International Studies*, vol. XIX, no. 3 (September 1988), hal. 319-320.

nyar,³³ meningkat hampir 7 kali daripada jumlah US\$13,181 milyar pada tahun 1977,³⁴ dan selama itu RRC berhasil menjalin hubungan dagang dengan lebih dari 170 negara. Kerjasama teknik dengan negara-negara asing juga berkembang pesat. Dari keseluruhan kerjasama dengan luar negeri, kerjasama dengan AS, Jepang dan negara-negara industri Barat lainnya menjadi acuan terpenting bagi penopang keberhasilan Empat Modernisasi. Sampai tahun 1988, jumlah perdagangan Cina dengan negara-negara industri Barat mencapai US\$47,9 milyar, di samping kebutuhan Cina akan teknologi modern dari negara-negara maju ini. Keberhasilan zona-zona ekonomi khusus di daerah pantai, juga bergantung pada investasi yang ditanam oleh negara-negara Barat.

Namun, sejak tahun 1988 Cina mulai mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi yang serius. Masalah-masalah yang berusaha untuk ditanggulangi pada Kongres PKC ke-13 tahun 1987 masih belum terpecahkan, bahkan semakin diperumit oleh munculnya perbedaan dan pertentangan kebijaksanaan antara Sekjen PKC Zhao Ziyang dan PM Li Peng (berikut ahli-ahli ekonomi senior seperti Chen Yun, Yao Yilin, dan Bo Yibo). Hutang luar negeri diperkirakan mencapai US\$40 milyar pada tahun 1988, meningkat hampir 3 kali dari jumlah US\$15,8 milyar pada tahun 1985. Para bankir Barat menilai Cina akan menghadapi kesulitan dalam hal hutang luar negeri ini.³⁵ Proyek-proyek yang mengandalkan bantuan luar negeri menjadi tersendat-sendat pelaksanaannya akibat penundaan bantuan oleh lembaga-lembaga ke-

uangan internasional menyusul peristiwa Juni 1989.

Pertimbangan faktor ekonomi dan ketergantungan terhadap bantuan Barat dalam menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi ini sudah barang tentu menjadi faktor penting dalam kalkulasi dan perumusan kebijaksanaan Cina terhadap AS dan Barat. Karenanya, sulit bagi Beijing untuk mengambil tindakan yang dapat merusak hubungannya dengan Washington, yang pada gilirannya akan menghambat kelangsungan program modernisasi.

Pasca Tian An Men: Kembali ke Dunia Ketiga?

Meskipun tragedi Tian An Men mengundang reaksi keras dunia internasional, terutama dari AS dan negara-negara Barat lainnya, sampai sekarang belum terlihat tanda-tanda terjadinya perubahan substansial dalam politik luar negeri Cina. Kepemimpinan konservatif di Beijing, meskipun sedang melakukan perubahan di lingkup kebijaksanaan dalam negeri, tampaknya tidak bermaksud melakukan perubahan yang sama dalam politik luar negeri. Hal ini pertama kali dilontarkan oleh Deng Xiaoping tanggal 9 Juni 1989, yang kemudian ditegaskan kembali dalam komunike yang dikeluarkan pada Sidang Pleno ke-4 Komite Sentral PKC tanggal 24 Juni 1989. Dalam komunike itu ditegaskan bahwa RRC "akan terus mempertahankan politik luar negeri yang berciri kemandirian dan perdamaian (*self-reliant and peaceful foreign policy*), melanjutkan pengembangan hubungan internasional yang damai berdasarkan lima prinsip koeksistensi damai, dan Cina tetap menjadi penyumbang bagi perdamaian dunia."³⁶

³³*Yearbook of Direction of Trade Statistics 1989*, IMF, 1989, hal. 134.

³⁴*Yearbook of Direction of Trade Statistics 1981*, IMF, 1981, hal. 121.

³⁵*FEER*, 2 November 1989, hal. 48.

³⁶*ICM* (Agustus 1989), hal. 19.

Pada tanggal 12 Juli 1989, Sekjen PKC Jiang Zemin mengatakan bahwa "keterbukaan terhadap negara-negara lain merupakan kebijaksanaan pemerintah Cina yang tidak akan berubah." Ia mengatakan bahwa dalam mengelola hubungan dengan negara-negara lain Cina harus membicarakan soal persahabatan dan soal perjuangan, soal prinsip dan juga soal strategi.³⁷ Perdana Menteri Li Peng, dalam usahanya untuk mengembalikan citra Cina, memberi jaminan bahwa situasi politik dan ekonomi Cina tetap dalam keadaan stabil dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Cina berhasil ditanggulangi pemerintah dengan baik.³⁸ Secara keseluruhan, para pemimpin konservatif di Cina mengharapkan kerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta luar negeri berjalan seperti semula, karena pembaruan ekonomi yang tetap menjadi prioritas utama Beijing diakui tidak mungkin terlaksana dalam suasana terisolasi dari dunia luar.

Karenanya, selepas dari kesibukan menangani pergolakan politik dalam negeri, upaya-upaya diplomatik Beijing diarahkan untuk mengembalikan citra diri Cina sebagai negara moderat yang lebih mementingkan faktor ekonomi, khususnya di mata AS dan negara-negara industri Barat lainnya. Meskipun belum berhasil sepenuhnya, upaya Cina ini mengalami kemajuan. Sejak Agustus 1989, bank-bank asing mulai memberikan pinjaman kembali kepada Cina. Bank Dunia secara resmi melanjutkan bantuannya untuk proyek-proyek di Cina sejumlah US\$780 juta.³⁹ Sikap pemerintah AS yang keras berusaha dilunakkan oleh RRC melalui *smiling diplomacy* dengan memenuhi tuntutan

an Washington untuk membebaskan 573 tahanan Tian An Men dan pencabutan undang-undang darurat pada awal Januari 1990.⁴⁰ Upaya ini menghasilkan kemenangan diplomatik Cina, antara lain terlihat dari dibatalkannya rencana Washington untuk mencabut status *Most-Favored-Nation* bagi RRC.⁴¹ Melunaknya sikap Beijing terhadap pembangkang terkemuka Fang Lizhi yang diijinkan meninggalkan Cina, dapat dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki Citra itu, demi kesinambungan bantuan AS terhadap Cina.⁴²

Mengenai hubungan dengan Jepang, tampaknya Cina tidak begitu mengalami kesulitan dalam melanjutkan hubungan kerjasama yang telah terbina sebelumnya. Di antara negara-negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Cina, Jepang merupakan negara pertama yang menyerukan rekan-rekan Barat-nya untuk segera melunakkan sikap dan tidak mengisolasi Cina.⁴³ Hal ini tidak mengherankan, karena Jepang merupakan negara yang memiliki kepentingan ekonomi penting terhadap Cina. Investasi perusahaan-perusahaan Jepang meningkat dua kali lipat tahun 1989 yang lalu dari US\$275 juta tahun 1988 menjadi US\$440 juta. Lebih dari 1.000 perusahaan Jepang memiliki usaha pa-

⁴⁰W. Gary Vause, "Tibet to Tiananmen: Chinese Human Right and US Foreign Policy," *Occasional Papers/Reprints Series in Contemporary Asian Studies*, no. 6, 1989, hal. 43-44. Lihat juga *SCMP*, 20 Juni 1990 dan *US News & World Report*, 12 Maret 1990, hal. 42.

⁴¹*Kompas*, 26 Juni 1990.

⁴²*Kompas*, 26 Juni 1990.

⁴³*SCMP*, 12 Agustus 1989. Sebelumnya, menjelang KTT Kelompok-7 di Paris bulan Juli 1989, Jepang sempat menolak untuk menjatuhkan sanksi terhadap Cina, dan Menlu Jepang mengatakan "akan menentang kritik terhadap Cina atas nama KTT Paris." Lihat Peter Van Ness, "Sanctions on China," *FEER*, 21 September 1989, hal. 25.

³⁷ICM (September 1989), hal. 30.

³⁸*SCMP*, 13 Agustus 1989 dan 16 Agustus 1989.

³⁹*FEER*, 2 November 1989.

tungan dengan Cina.⁴⁴

Meskipun demikian, di sisi yang lain terlihat adanya pergeseran pemusatan perhatian dari Barat kepada pendekatan kembali terhadap negara-negara Dunia Ketiga. Walaupun hal itu tidak berarti RRC kembali menampilkan postur anti-Barat, paling tidak pergeseran ini mencerminkan munculnya keyakinan pemimpin Cina bahwa pihak Barat tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Hal ini dikemukakan secara implisit oleh PM Li Peng akhir bulan Agustus 1980 ketika ia membandingkan "pengertian yang diberikan sahabat-sahabat di Dunia Ketiga" dengan "sikap Barat yang menggerakkan gelombang anti-Cina."⁴⁵

Kecenderungan Cina untuk memperkuat kembali hubungan dengan Dunia Ketiga itu antara lain dapat dilihat dari rangkaian aktivitas diplomatik yang dilakukan tidak lama setelah Peristiwa Tian An Men:

- Tanggal 24 Juli 1989 Menlu RRC Qian Qichen melakukan kunjungan ke Botswana, Zimbabwe, Angola, Zambia, Mozambique, dan Lesotho. Pada saat yang sama Pembantu Menlu Yang Yuchang berkunjung ke Senegal, Pantai Gading, Gambia, Sierra Leone dan Ghana.⁴⁶
- Tanggap 7 September 1989 Presiden Bourkina Faso Blaise Compaore mengunjungi RRC selama enam hari.
- Tanggal 15 September 1989 Qian Qichen berkunjung ke Yordania, Mesir, Suriah, dan Tunisia.
- Tanggal 26 September 1989 Sekjen PKC Jiang Zemin melakukan pembicaraan de-

ngan Norodom Sihanouk di Beijing.

- Tanggal 3 Oktober 1989 Yaser Arafat berkunjung ke RRC untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden RRC Yang Shangkun, dan tanggal 5 Oktober dengan Deng Xiaoping dan Li Peng.
- Tanggal 5 Oktober 1989 atas undangan PM Li Peng, Sekjen Partai Revolusioner Rakyat Laos Kaysone Phomvihane berkunjung ke RRC.
- Tanggal 26 Oktober 1989 PM Thailand Chatichai Choonhavan berkunjung ke Cina dan melakukan pembicaraan mengenai masalah Kampuchea dengan Deng Xiaoping.⁴⁷

Di samping itu, Beijing juga berusaha mengembangkan hubungan dengan negara-negara yang belum memiliki hubungan diplomatik resmi dengannya. Dengan Korea Selatan, Beijing berhasil menjalin kerjasama perdagangan yang mencapai jumlah sekitar US\$3 milyar pada tahun 1989, hampir 10 kali lipat nilai perdagangan Cina dengan sekutunya Korea Utara. Awal bulan Februari 1990, Beijing meningkatkan kontak dengan Israel yang selama ini diduga sebagai mitra dekat Cina dalam hal kerjasama pengembangan teknologi militer. Hubungan dengan Arab Saudi semakin erat meskipun sampai sekarang Riyadh hanya mempunyai hubungan diplomatik resmi dengan Taipei.⁴⁸ Pendekatan yang sama juga dilakukan terhadap Indonesia dan Vietnam. Mengenai hubungan RRC-Indonesia, kedua belah pihak sepakat untuk mencairkan hubungan diplomatik secara resmi pada tanggal 8 Agustus 1990.

⁴⁴*The Economist*, 12 Mei 1990.

⁴⁵Henri d'Antoine, "The Great Leap," hal. 40.

⁴⁶Quarterly Cronicle," *China Quarterly*, no. 120 (Desember 1989), hal. 911-912.

⁴⁷*ICM* (November 1989), hal. 27, dan *ICM* (Desember 1989), hal. 29.

⁴⁸*FEER*, 22 Februari 1990.

Dalam beberapa kesepakatan yang dicapai dengan "sahabat-sahabat lama" di Dunia Ketiga selama pertukaran diplomatik itu, Cina juga terlihat kembali memberikan bantuan luar negeri. Selama kunjungannya ke Asia Selatan, PM Li Peng berjanji untuk memberi pinjaman lunak sejumlah US\$40 juta kepada Bangladesh. PM Li Peng juga berjanji untuk membantu pembiayaan berbagai proyek di Nepal. Di Islamabad, Cina menandatangani kesepakatan kerjasama produksi tank tempur dan kemungkinan penjualan kapal selam bertenaga nuklir Cina kepada Pakistan.⁴⁹

Bantuan luar negeri (*foreign aid*) pernah menjadi instrumen penting dalam politik luar negeri RRC selama era kepemimpinan Mao Zedong. Namun, sejak tahun 1978 Cina mulai membatasi pemberian bantuan luar negeri karena meningkatnya kebutuhan dalam negeri bagi pelaksanaan modernisasi, bahkan mulai saat itu Beijing harus menjadi negara peminjam dana dari luar negeri.⁵⁰ Artinya, meskipun akhir-akhir ini terlihat kembali kecenderungan Cina untuk menggunakan bantuan luar negeri dalam rangka mempererat hubungannya dengan Dunia Ketiga, bisa diduga hal itu hanya bersifat sementara sebatas upaya pengembalian citra diri. Karena, kondisi ekonomi Cina sekarang ini masih dihadapkan pada berbagai kesulitan yang semakin kompleks sejak terjadinya pergolakan Juni 1989.

Keterbatasan dalam pemberian bantuan luar negeri, mendorong Beijing untuk lebih menekankan arti penting hubungan politik daripada ekonomi dalam hubungannya de-

ngan Dunia Ketiga.⁵¹ Suasana kerjasama yang terbatas pada kerjasama politik dapat dijadikan bukti bahwa RRC tidak dapat menjadikan Dunia Ketiga sebagai katalisator program modernisasi ekonominya. Alasan-alasan strategis dan ekonomi seperti yang dipaparkan sebelumnya, tetap memaksa Beijing untuk menempatkan AS dan negara-negara Barat sebagai perhatian utama politik luar negerinya. Meluasnya aktivitas RRC di Dunia Ketiga sekarang ini, besar kemungkinan hanya bersifat sementara dan sebagai *counter* atas tindakan Barat yang oleh Beijing dilihat sebagai usaha untuk mengisolasi-nya secara politik.

Penutup

Kecenderungan politik luar negeri Cina sekarang ini sedikit banyak tetap bergantung pada sikap AS dan Barat pada masa-masa berikutnya. Kalau tekanan-tekanan AS dan Barat terus berlangsung, tidak tertutup kemungkinan Cina akan mengambil sikap yang lebih keras: seperti meningkatkan oposisi terbuka terhadap kehadiran militer AS di Asia Timur, khususnya di Korea, Jepang dan Filipina; kurang fleksibel dalam perundingan masalah Hongkong dengan Inggris; menutup kerjasama dengan Washington dalam upaya penyelesaian konflik di Semenanjung Korea; menegaskan kembali posisinya atas klaim-klaim di Laut Cina Selatan; dan memperkuat basis pengaruh di Asia Tenggara melalui peningkatan bantuan kepada Khmer Merah.

Kalau tekanan-tekanan AS dan Barat melunak, meskipun tidak sampai pada kembalinya hubungan yang stabil antara RRC

⁴⁹FEER, 22 Februari 1990.

⁵⁰John Franklin Copper, "China's Foreign Aid in 1978," *Occasional Papers/Reprint Series in Contemporary Asian Studies*, no. 8-1979, hal. 1-2.

⁵¹FEER, 22 Februari 1990.

dan Barat seperti saat sebelum peristiwa Tian An Men, pengalaman ''tidak 'enak'' dengan AS dan Barat tetap akan mendorong RRC untuk mengarahkan politik luar negerinya pada upaya peningkatan hubungan dengan Jepang, Korsel, ASEAN, dan negara-negara tetangga lainnya yang juga dapat memberi keuntungan bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi di dalam negeri, di samping terus berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan Uni Soviet dan mempertahankan persekutuan dengan Korea Utara. Melihat kecenderungan melu-

naknya sikap AS dan Barat belakangan ini, tampaknya arah politik luar negeri Cina lebih mungkin mengacu pada skenario demikian.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa arah politik luar negeri RRC pasca Tian An Men tidak mengacu kepada perubahan substansial. Perubahan-perubahan yang terjadi mungkin lebih tepat disebut sebagai penyesuaian taktis (*tactical adjustments*) daripada sebuah perubahan strategis.

Dokumen

RINGKASAN PERISTIWA ASEAN Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:

SUDIBYO (Editor), Yoyok ARIESSUSANTO, F. ANDREA

- I. SIDANG PARA MENLU ASEAN
- II. KERJASAMA EKONOMI ASEAN
 - A. Perkembangan Ekonomi ASEAN
 - B. Kerjasama Perbankan
- III. KERJASAMA NON-EKONOMI ASEAN
 - A. Kerjasama Kebudayaan dan Informasi
 - 1. Persahabatan CAJ-NSK
 - 2. Kongres Pustakawan ASEAN ke-8
 - B. Kerjasama Kesehatan
 - Konferensi Kesehatan ASEAN ke-1
 - C. Kerjasama Lingkungan Hidup
 - Pertemuan Kelompok Ahli Lingkungan Hidup ASEAN ke-3
 - D. Masalah Keamanan
- IV. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIA-LOG
 - A. Pertemuan ASEAN dengan mitra dialognya (PMC)
 - B. Hubungan ASEAN-Jepang
 - C. Hubungan ASEAN-Uni Soviet
 - D. Hubungan ASEAN - Asia-Pasifik
 - Pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ke-2
- V. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA
 - Masalah Sikap AS tentang Kamboja

I. SIDANG PARA MENLU ASEAN

Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-23 berlangsung di Jakarta tanggal 24-25 Juli 1990 untuk membahas: (1) kerjasama ASEAN di berbagai bidang atau komite dalam satu tahun terakhir; (2) masalah Kamboja, pengungsi Indocina dan hal-hal lain yang menjadi sorotan ASEAN; (3) strategi ASEAN dalam menghadapi pertemuan peninjauan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang kedua di Singapura. Dalam pertemuan ini untuk pertama kalinya Sekretariat ASEAN akan memiliki Deputy Sekjen yang berasal dari Singapura (*Kompas*, 24-7-1990).

Menlu Ali Alatas sebagai Ketua Panitia Tetap ASEAN mengatakan kepada Suara Pembaruan di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) posisi Indonesia bersama ASEAN selama ini menyangsikan apakah langkah yang diambil AS untuk mengosongkan kursi keanggotaan CGDK di PBB akan membantu dan mengarah pada penyelesaian yang dapat diterima semua sebagai penyelesaian; (2) langkah yang diambil AS akan dibicarakan pada konperensi tahunan para Menlu ASEAN ke-23; (3) Indonesia bersama ASEAN tidak keberatan AS membuka dialog dengan Vietnam maupun Hun Sen (*Suara Pembaruan*, 19-7-1990).

Sementara itu dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR-RI tanggal 18 Juli 1990, Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) ada kekenduran yang terjadi di dalam upaya mencari penyelesaian politik secara damai dan menyeluruh atas konflik Kamboja dan hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena hanya akan merugikan proses perdamaian konflik Kamboja dan rakyat Kamboja; (2) sebagai Ketua Bersama ICK, Indonesia dan Perancis terpanggil untuk tetap melanjutkan dan menggiatkan upaya penyelesaian konflik tanpa mengabaikan realitas yang ada; (3) hasil pertemuan Dewan Keamanan PBB ke-5 di Paris serta Pertemuan Tahunan Menlu ASEAN (AMM) dan Pertemuan Menlu ASEAN dengan Negara Mitra Dialog (PMC) akan diusahakan untuk menentukan langkah konkrit bagi penyelesaian masalah Kamboja (*Kompas*, 19-7-1990).

Dalam Konperensi Pers tanggal 20 Juli 1990 di Jakarta, Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) Pertemuan Para Menlu ASEAN ke-23 yang akan dibuka Presiden Soeharto tanggal 24 Juli 1990 di Istana Merdeka, untuk pertama kalinya akan dihadiri oleh para Menteri

Bidang Ekonomi ASEAN dan dari Indonesia yang hadir adalah Menteri Perdagangan Arifin Siregar serta Menteri Perindustrian Hartarto; (2) delegasi MEE ke AMM saat ini terdiri atas ketua, sekarang Italia, Ketua MEE yang baru diganti (Irlandia) dan ketua yang akan datang (Luxemburg) ditambah dengan komisioner yang menangani hubungan dengan negara-negara Asia-Pasifik dan Amerika Latin; (3) Post Ministerial Consult (PMC) akan meliputi sidang pleno antara 6 anggota ASEAN dengan 6 mitra wicaranya (6+6), disusul pertemuan ASEAN dengan 5 mitra wicaranya dari Pasifik yang dihadiri oleh MEE sebagai peninjau (6+5+1) dan ditindaklanjuti dengan pertemuan antara ASEAN dengan setiap mitra wicaranya (6+1); (4) pertemuan 1+1 dalam sidang tertutup yang direncanakan menyusul pertemuan 6+1 juga dapat dihadiri oleh Menlu ASEAN lainnya tetapi tidak semuanya; (5) selain PNG yang selalu hadir dalam AMM sebagai peninjau khusus, Menlu Kepulauan Solomon juga diundang untuk hadir sebagai peninjau; (6) pertemuan AMM ke-23 ini akan diawali dengan pertemuan para pejabat senior ASEAN (SOM) tanggal 20-22 Juli guna mempersiapkan materi pertemuan para Menlu (*Antara*, 21-7-1990).

Sementara itu PM Singapura Lee Kuan Yew, mengatakan kepada BBC di Singapura tanggal 21 Juli 1990 bahwa: (1) keputusan AS menarik dukungannya bagi CGDK di PBB mengundang teka-teki bagi Singapura; (2) kebijakan AS itu tidak dapat mencegah Khmer Merah meraih kemenangan dalam berbagai pertempuran di Kamboja, tetapi bahkan membuatnya lebih bersemangat di medan pertempuran, sebab ia tidak mau dihabisi secara politis dan militer. Oleh karena itu Khmer Merah akan menyerukan suatu upaya militer untuk merebut wilayah Kamboja lebih banyak; (3) untuk mencegah Khmer Merah meraih kemenangan dibutuhkan lebih banyak lagi daripada hanya mengosongkan kursi Kamboja di PBB dan berunding dengan Vietnam yang menyangkut Kamboja; (4) langkah AS ini merupakan preseden yang berbahaya dalam menyatakan suatu negara anggota PBB yang bukan lagi anggota PBB; (5) jika dilakukan suatu penyelesaian melalui pemerintahan sementara PBB dan pemilihan umum, Khmer Merah dan Cina tetap merupakan suatu kelompok guna mencapai kesepakatan sebab bila tidak siapa yang akan dipilih sebagai wakil rakyat Kamboja (*Kompas*, 22-7-1990).

Pernyataan bersama para Menlu ASEAN tanggal 23 Juli 1990 di Hotel Hilton Jakarta, seusai *working dinner* menyebutkan antara lain: (1) ASEAN menentang gagasan untuk mengubah keanggotaan Kamboja di PBB,

sebelum *Supreme National Council* (SNC) terbentuk di Kamboja yang diterima baik oleh keempat faksi yang bertikai di Kamboja; (2) keanggotaan Kamboja di PBB adalah masalah politik yang peka dan upaya untuk mengubahnya pada saat ini sebelum SNC terbentuk akan merupakan kemunduran bagi upaya penyelesaian politik yang menyeluruh di Kamboja; (3) SNC seharusnya menduduki kursi Kamboja di PBB setelah badan itu terbentuk, dan sebaiknya beranggotakan pribadi dari pelbagai pandangan politik dan berwibawa di kalangan rakyat Kamboja; (4) SNC hendaknya sudah terbentuk pada saat Majelis Umum PBB bersidang; (5) ASEAN sepenuhnya mendukung peningkatan peranan PBB di Kamboja, antara lain sebagai pemerintahan sementara di Kamboja sebelum berlangsungnya pemilihan umum. Sedangkan SNC berperan sebagai administrator di Kamboja dalam masa peralihan melalui struktur pemerintahan yang ada bersama-sama dengan PBB; (6) perubahan sikap AS tentang masalah Kamboja akan mempersulit upaya ASEAN dalam mencari penyelesaian politik yang langgeng dan menyeluruh di Kamboja (*Kompas*, 24-7-1990).

Sementara itu anggota Komisi I DPR-RI Theo Sambuaga mengatakan kepada pers tanggal 21 Juli 1990 di Jakarta bahwa: (1) Indonesia dan ASEAN tidak perlu merasa dirugikan oleh perubahan sikap AS, karena justru memberikan kesempatan bagi ASEAN untuk mendesak Khmer Merah dan RRC untuk bersikap lebih akomodatif terhadap rezim Hun Sen dalam perundingan-perundingan; (2) perubahan sikap AS memberikan dua dampak positif: (a) akan dapat mengurangi bargaining position Khmer Merah yang selama ini menjadi ganjalan dalam penyelesaian damai di Kamboja; (b) memungkinkan Vietnam mendesak Hun Sen untuk memberikan konsesi yang lebih lunak lagi; (3) Indonesia kini berpeluang besar untuk lebih aktif lagi melakukan pendekatan dan menempati posisi terdepan di ASEAN dalam menyelesaikan masalah Kamboja, karena mendapat kepercayaan dan mempunyai hubungan baik dengan Vietnam dan RRC; (4) Indonesia mempunyai kesempatan besar untuk meningkatkan peranan ASEAN sebagai pengambil inisiatif dalam penyelesaian masalah Kamboja agar ASEAN tidak lepas dari konteksnya yang selama ini cukup berperan (*Merdeka*, 24-7-1990).

Presiden Soeharto mengatakan pada Pembukaan Sidang Tahunan Para Menlu ASEAN ke-23 tanggal 24 Juli 1990 di Istana Negara Jakarta bahwa: (1) sidang tingkat menteri ASEAN seperti sekarang ini tidak dapat lagi bersifat rutin sekedar menyibukkan diri meninjau

kegiatan serta hasil yang dicapai tahun yang lalu dan merencanakan program kerja untuk tahun berikutnya; (2) sidang tahunan ini agar dimanfaatkan sepenuhnya untuk menilai dengan mengkaji ulang secara kritis dan menyeluruh posisi kepentingan dan tujuan pokok ASEAN dalam suatu lingkungan regional dan internasional yang sedang berubah dengan cepat dan terus berkembang; (3) ASEAN telah mampu menciptakan iklim serta kondisi regional yang memungkinkan negara anggotanya memusatkan perhatian dan usaha pembangunan nasional dan pada pemupukan ketahanan nasional serta regional melalui kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan; (4) ASEAN telah membuktikan dirinya berhasil hidup terus, bahkan tumbuh menjadi organisasi yang kukuh di mana keberadaan, potensi dan keberhasilannya tidak hanya diakui di kawasan Asia Timur, tetapi juga di seluruh dunia, namun hendaknya hal itu tidak boleh membuat ASEAN berpuas diri; (5) ASEAN akan ditantang untuk memperkuat jati dirinya serta tujuan dasarnya; (6) tugas utama ASEAN adalah terus meningkatkan kemampuan bersama agar dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang baru, serta mengantisipasi hambatan potensial yang terkandung dalam situasi yang sedang berkembang saat ini; (7) kecenderungan dewasa ini mengharuskan ASEAN dan negara berkembang lainnya pada dilema yang sulit; (8) penggabungan sejumlah negara maju ke dalam kelompok kerjasama ekonomi yang kuat seperti Pasar Tunggal Eropa di satu pihak membuka peluang baru bagi ASEAN, tetapi di lain pihak dapat merugikan bila kelompok-kelompok itu menutup diri dan menegakkan rintangan baru terhadap dunia luar; (9) perkembangan di Eropa Timur dan Tengah ke arah pluralisme politik yang lebih besar dan sistem ekonomi pasar yang lebih terbuka mengandung aspek positif dan negatif karena ada kemungkinan beralihnya arus dana penanaman modal dan perdagangan dari negara-negara industri ke kawasan itu; (10) ASEAN sangat prihatin melihat berlanjutnya proteksionisme di negara-negara maju serta bergolaknya harga-harga di pasar komoditi internasional; (11) ASEAN tidak dapat menghindarkan diri dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh permasalahan hutang negara-negara berkembang yang terus membengkak dan diperburuk oleh berubah-ubahnya nilai tukar berbagai mata uang utama serta makin menyusutnya arus dana untuk pembangunan; (12) ASEAN harus dapat menjawab tantangan-tantangan yang timbul dalam rangka menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya di tahun-tahun mendatang; (13) ASEAN hendaknya senantiasa berada di garis depan dalam usaha mempertahankan

suatu sistem perdagangan internasional yang benar-benar terbuka, adil dan dapat diandalkan; (14) ASEAN harus ikut menjamin agar Putaran Uruguay GATT yang sedang berlangsung sekarang ini diselesaikan dengan baik dan membuahkan hasil yang berimbang; (15) ASEAN harus berusaha menggairahkan kembali kerjasama di bidang komoditi demi terwujudnya pasaran yang lebih stabil dan harga yang layak bagi bahan mentah; (16) ASEAN agar secara aktif menyumbang pertumbuhan APEC, sehingga APEC dapat menjadi forum konsultasi dan kerjasama regional yang lebih luas di antara negara-negara Asia-Pasifik; (17) APEC harus berorientasi keluar dan menjadi wadah bagi kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip-prinsip serta modalitas yang memperkuat ASEAN, bukan dilunturkan identitas dan persatuan serta kerjasama dengan negara lain; (18) apa yang dicapai dalam rangka kerjasama ekonomi antar anggota ASEAN harus diakui masih di bawah harapan, meskipun ada kemajuan yang cukup menggembirakan terutama setelah KTT ASEAN III di Manila; (19) kini ASEAN seyogyanya mengadakan usaha-usaha yang lebih maju dan luas dalam rangka peningkatan bentuk kerjasama ekonomi yang sudah ada dan menjajaki bentuk-bentuk kerjasama yang baru; (20) sudah saatnya ASEAN memikirkan langkah-langkah yang nyata guna memperkuat peranan dan fungsi Sekretariat ASEAN serta memperbaiki koordinasi antara berbagai komite ekonomi dan fungsional; (21) konflik Kamboja yang tak kunjung selesai masih tetap merupakan hambatan utama dalam usaha mencapai perdamaian dan stabilitas yang lebih mantap di kawasan ini; (22) selama lebih dari satu dasawarsa ASEAN selalu berupaya untuk memberikan sumbangannya bagi suatu penyelesaian yang menyeluruh, adil dan langgeng; (23) berbagai prakarsa telah dilancarkan untuk menerbos kemacetan, namun patut disesalkan hingga kini belum membuahkan hasil, dikarenakan pihak-pihak dan negara-negara yang langsung terlibat belum menunjukkan kemauan politik untuk mencapai kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak; (24) pada akhirnya kemelut Kamboja yang berkepanjangan itu terpulung kepada pemimpin-pemimpin bangsa Kamboja sendiri; (25) kini tampak ada kemungkinan yang sangat mence-maskan bahwa kemacetan sekarang ini akan membuat upaya mencari penyelesaian politik kehilangan momentum dan akhirnya pudar; (26) ASEAN tetap terus berupaya memberi sumbangannya bagi pemulihan perdamaian yang adil di Kamboja (*Kompas*, 25-7-1990).

Sementara itu Menlu Ali Alatas mengatakan pada sidang pleno terbuka bahwa: (1) perubahan yang terus

berlanjut mengubah dasar ekonomi dan politik global; (2) model baru peredaan ketegangan dan akomodasi saling menguntungkan antara negara besar dan memberikan momentum serta membuka kemungkinan baru bagi kemajuan substansial dalam perlucutan senjata dan penyelesaian konflik regional; (3) perubahan yang terjadi cepat atau lambat akan berpengaruh di lingkungan ASEAN serta dalam bentuk dan cara yang berbeda mempengaruhi pula pada konfigurasi politik, ekonomi dan keamanan di kawasan Asia Timur dan Pasifik; (4) ASEAN harus memiliki kapasitas yang dinamis untuk melindungi kesatuan dan mengatasi masalah bersama; (5) kecenderungan regionalisme di dunia saat ini menimbulkan *inward looking* dan eksklusivisme, dan ASEAN berkepentingan untuk menjamin agar pengelompokan ekonomi khususnya di negara industri dapat mempertahankan keterbukaan ekonomi dan sistem perdagangan multilateral; (6) ASEAN perlu aktif mengembangkan APEC menjadi forum *outward looking* berdasarkan interdependensi sejati dan saling menguntungkan serta diarahkan atas dasar prinsip dan tujuan ASEAN, sehingga dapat memperkuat daya kohesi dan tujuan fundamental ASEAN.

Pada saat yang sama, Menlu Singapura Wong Kan Seng mengatakan bahwa: (1) APEC hendaknya diarahkan agar menguntungkan ASEAN; (2) pada saat perkembangan di Eropa menjadi pusat perhatian dunia, APEC dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekstra bagi AS, Jepang dan negara besar lainnya untuk mempertahankan hubungannya dengan ASEAN; (3) ASEAN perlu memiliki pilihan arah baru baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Menlu Malaysia Dato Abu Hassan Omar mengatakan bahwa: (1) Eropa Barat mitra dagang penting ASEAN mulai menaruh perhatian besar kepada negara-negara demokrasi baru di Eropa Timur; (2) ASEAN harus mengambil langkah agar perkembangan di Eropa Timur tidak akan menurunkan keuntungan ekonomi ASEAN dalam hubungannya dengan Eropa Barat; (3) munculnya Pasar Tunggal Eropa dapat menciptakan *inward looking* di wilayah Eropa yang tidak akan memberikan kontribusi pada arus perdagangan bebas dan investasi dunia; (4) ASEAN perlu mengintensifkan dialog dengan mitra dari Eropa dan menekankan pentingnya ekspansi hubungan ekonomi.

Sedangkan Menlu Filipina Raul Manglapus mengatakan: (1) perkembangan di Eropa dan hubungan ekonomi AS-Kanada menjadi tantangan ASEAN; (2)

ASEAN perlu memperketat kerjasama ekonominya; (3) perkembangan di Eropa dan dunia saat ini merupakan kejadian dramatis yang perlu dijawab ASEAN (*Kompas*, 25-7-1990); (4) ASEAN perlu meningkatkan tekadnya untuk mewujudkan keamanan regional dalam kerangka kerjasama demi perdamaian kawasan ini; (5) lebih dari satu negara anggota ASEAN pada saat ini menampung berbagai fasilitas militer asing yang sifatnya sementara (*Angkatan Bersenjata*, 25-7-1990).

Komunike Bersama pada akhir sidang menyatakan bahwa: (1) persiapan KTT ASEAN mendatang untuk menentukan posisi dalam menghadapi perubahan cepat yang kini terjadi di seluruh dunia; (2) Sekretariat ASEAN agar mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan latihan tahunan yang menghasilkan *ASEAN Macroeconomic Outlook* (AMO) untuk bahan pertimbangan dalam pertemuan para menteri ASEAN; (3) penyelesaian krisis Kamboja hanya dapat dicapai melalui Konperensi Internasional Paris tentang Kamboja (PICC) dan bukan dengan cara militer; (4) ASEAN menyambut baik perubahan mendasar dalam hubungan Timur-Barat yang telah menciptakan kondisi yang baik untuk mengupayakan perdamaian, keamanan dan kerjasama antar negara; (5) masalah keamanan Asia Tenggara memerlukan observasi yang sangat hati-hati, dan sepakat mengadakan dialog dalam konteks *Declaration of ASEAN Concord* serta Deklarasi Kuala Lumpur tentang ZOPFAN; (6) ASEAN harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengefektifkan pelaksanaan program Aksi ASEAN tentang ZOPFAN dan SEAN-WFZ yang disepakati dalam KTT ASEAN III; (7) ASEAN harus melanjutkan dan mengintensifkan upaya untuk menyusun draft perjanjian SEANWFZ, serta mempromosikan konsep ini pada negara-negara lain agar memperoleh dukungan; (8) ASEAN perlu mengambil langkah-langkah konkrit menuju kerjasama ekonomi intra ASEAN yang lebih efektif; (9) partisipasi swasta dalam proses dialog dan kerjasama intra ASEAN semakin penting dan dapat diefektifkan lagi; (10) sepakat melanjutkan inisiatif Ketua Panitia Tetap ASEAN untuk memperkuat peranan dan efektivitas mekanisme serta struktur ASEAN; (11) ASEAN menyambut baik bantuan yang disumbangkan oleh UNDP, ADB, Kanada dan MEE yang mendukung inisiatif Ketua Panitia Tetap; (12) mereka menyetujui pembentukan panel lima orang terkemuka yang disponsori UNDP untuk mengadakan studi dan membuat rekomendasi guna memperkuat dan mengubah struktur dan mekanisme ASEAN, khususnya Sekretariat ASEAN; (13) mendesak semua fraksi Kamboja mening-

katkan usaha untuk membentuk *Supreme National Council* (SNC) yang terdiri dari individu-individu yang memiliki otoritas mewakili rakyat Kamboja dan dari semua pandangan politik; (14) SNC hendaknya merupakan badan yang mewakili keempat faksi Kamboja yang bersengketa, merdeka, berdaulat dan bersatu; (15) SNC diharapkan dapat dikukuhkan pada pertemuan Majelis Umum PBB ke-45 tahun 1990; (16) masalah wakil Kamboja di PBB merupakan masalah politik yang peka, karena itu usaha mengubah wakil Kamboja pada saat ini sebelum SNC terbentuk merupakan kemunduran dalam upaya mencari penyelesaian politik yang menyeluruh di Kamboja (*Kompas*, 26-7-1990).

Seusai penutupan, Menlu RI Ali Alatas mengatakan pada pers bahwa: (1) pengosongan kursi Kamboja di PBB bukan hal yang sederhana, karena selain ada prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi, juga harus ada argumen yang dianggap benar dan diterima baik; (2) ASEAN tetap yakin jalan terbaik menyelesaikan konflik Kamboja adalah melalui jalur persidangan Konperensi Internasional Paris tentang Kamboja (PICC); (3) ASEAN akan minta penjelasan dari Menlu AS, James Baker tentang kebijakan baru AS mengenai masalah Kamboja dalam forum 6+6 yaitu pertemuan meja bundar enam menlu ASEAN dan enam menlu mitra dialognya; (4) ASEAN menaruh perhatian yang mendalam mengenai meningkatnya orang perahu Kamboja dan Vietnam, untuk itu UNHCR agar mengambil langkah-langkah yang pasti untuk menghentikan manusia perahu yang membebani negara suaka di Asia Tenggara; (5) ASEAN tidak menyetujui dalih Vietnam tentang ketidakmampuan mencegah rakyatnya pergi secara sembunyi-sembunyi; (6) ASEAN menolak sikap menentang dari Vietnam dan AS mengenai pemulangan pengungsi secara paksa karena hal ini terdapat dalam CPA (*Comprehensive Plan of Action*) (*Kompas*, 26-7-1990).

II. KERJASAMA EKONOMI ASEAN

A. PERKEMBANGAN EKONOMI ASEAN

Prof. Dr. Albert Coppe, Guru Besar Emeritus Universitas Katolik, Leuven, Belgia, mengatakan dalam pidato ilmiahnya yang berjudul "The European Economic and Political Integration and Its Impact on the International Community" pada Peringatan 30 Tahun Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, tanggal 1 Juni 1990, bahwa: (1) upaya integrasi Eropa Timur dan

Eropa Barat menjadi Eropa Raya akan memunculkan visi baru mengenai interaksi kegiatan ekonomi internasional yang akan dikenal sebagai *tripolar business world* (dunia usaha tiga kutub) yaitu Eropa Raya, Masyarakat ASEAN dan Amerika Utara; (2) jika masyarakat ASEAN benar-benar berkembang, dunia usaha tiga kutub akan merupakan kombinasi dari tiga pasar yang besar dan ramai; (3) ASEAN yang menitikberatkan kerjasama regional di bidang ekonomi menjanjikan suatu keseimbangan antara impor dan ekspor dalam hubungan ekonomi dengan kutub lain; (4) ASEAN memiliki banyak potensi dan merupakan pasar domestik yang besar; (5) ketiga kutub itu di masa depan diharapkan dapat berinteraksi secara seimbang dan saling menguntungkan di dunia perdagangan internasional (*Suara Karya*, 2-6-1990).

Mantan Ketua Umum Kadin Indonesia, Sukamdani 8. Gitosardjono, mengatakan kepada wartawan Suara Pembaruan di Jakarta tanggal 6 Juni 1990 bahwa: (1) Konsep Ekonomi Segi Tiga (KEST) dapat menjadi kekuatan untuk menghadapi tekanan, terutama akibat perkembangan ekonomi global ke arah ASEAN Incorporated. Untuk itu dunia usaha Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan peluang itu, dan jangan berpikir kerdil untuk sekedar menikmati pasaran lokal; (2) ide dasar untuk menciptakan KEST merupakan langkah konkrit untuk meningkatkan kerjasama regional, tidak saja di bidang ekonomi, tetapi juga meliputi unsur sosial dan politik secara saling menguntungkan; (3) KEST merupakan dukungan positif bagi terciptanya hubungan kerjasama regional; (4) untuk menjalin hubungan di antara negara Indonesia, Malaysia dan Singapura agar saling menguntungkan dalam perdagangan global dunia perlu persiapan; (5) dengan dukungan Singapura, maka Indonesia dan Malaysia yang banyak memiliki kesamaan hasil hutan dan berbagai jenis komoditi tradisional lainnya, dapat saling mengatur strategi pemasaran bersama (*Suara Pembaruan*, 7-6-1990).

Sementara itu pengamat ekonomi Drs. Christianto Wibisono mengatakan bahwa: (1) terciptanya KEST dapat merupakan kekuatan ekonomi yang kuat untuk menghadapi tekanan ekonomi dari Jepang dan AS sehingga menjadikan ASEAN Incorporated; (2) kerjasama tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura merupakan gambaran positif dan terobosan psikologis bagi Indonesia, sehingga diharapkan tidak ada lagi anggapan bahwa Singapura lebih tinggi dibandingkan Indonesia atau Malaysia (*Suara Pembaruan*, 7-6-1990).

Biro Ekonomi Kemlu Jepang melaporkan bahwa meskipun ekspor Jepang ke Masyarakat Eropa, AS dan Kanada mengalami kemerosotan, tetapi ekspor Jepang ke Asia Tenggara naik 1,4% sehingga menjadi US\$6,99 milyar, sedangkan impor dari negara-negara Asia Tenggara US\$5,25 milyar lebih, naik 1,1%. Dengan ini Jepang surplus US\$1,73 milyar. Sementara ekspor negara-negara ASEAN ke Jepang selama April 1990 naik 9,2% menjadi US\$2,18 milyar lebih sedangkan ekspor Jepang ke ASEAN naik 22,9% sehingga menjadi US\$2,51 milyar lebih (*Antara*, 11-7-1990).

B. KERJASAMA PERBANKAN

Konperensi Perbankan ASEAN ke-8 dan Pertemuan Dewan Perbankan ASEAN ke-20 berlangsung di Bali, tanggal 18-21 Juli 1990 dengan tema "Tantangan-tantangan yang Dihadapi oleh Perbankan ASEAN dalam Tahun 1990-an." Konperensi ini dihadiri oleh 170 peserta dari negara-negara anggota ASEAN untuk menggali ide-ide baru dalam rangka mencapai tujuan asosiasi. Hasil konperensi nanti akan disampaikan kepada Dewan untuk pembahasan lebih mendalam dan dicarikan implementasinya lebih lanjut.

Menteri Keuangan Prof. Dr. J.B. Sumarlin mengatakan pada pembukaan konperensi itu bahwa: (1) masalah pengaliran modal masuk ke kawasan ASEAN dan pertumbuhan mekanisme perdagangan internasional perlu dibahas bersama. Hal ini penting untuk menunjang serta menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi ASEAN; (2) pertumbuhan perdagangan internasional merupakan sarana penting untuk memperoleh valuta asing atau devisa guna mendukung pertumbuhan ekonomi ASEAN; (3) Indonesia dapat mengambil pengalaman dengan cara meningkatkan modal ke negara-negara ASEAN dan membantu bank-bank itu mengembangkan perdagangan luar negerinya, dan sebaliknya Indonesia dapat memberikan pengalaman kepada bank-bank di ASEAN mengenai mobilisasi dana; (4) munculnya kekuatan blok ekonomi dunia Barat, seperti perjanjian perdagangan bebas AS-Kanada serta terbentuknya Pasar Tunggal Eropa dapat mempengaruhi ekspor negara-negara ASEAN (*Angkatan Bersenjata*, 20-7-1990); (5) penyediaan modal merupakan sumber kehidupan untuk melanjutkan pembangunan ekonomi negara-negara ASEAN; (6) sumber modal yang diperlukan dapat berasal dari tabungan pribadi yang dimobilisasikan oleh lembaga keuangan, tabungan masyarakat yang dimobilisasikan oleh pemerintah melalui pajak pe-

nerimaan, arus investasi luar negeri dalam sektor swasta, bantuan pembangunan pemerintah, pinjaman komersial dari luar negeri dan pasar modal; (7) perubahan sosial, politik dan ekonomi di beberapa negara, khususnya di Eropa Timur, akan mempengaruhi situasi beberapa negara dan aktivitas bisnis satu negara dengan negara lainnya; (8) pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN sedang dalam kondisi top-form. ASEAN merupakan kawasan yang paling dinamis dan pertumbuhan ekonominya mencapai sekitar 8%/tahun, dua kali lipat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Meskipun ada kecenderungan untuk menurun, tetapi pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN paling tidak akan mencapai 7,7%; (9) tantangan yang dihadapi oleh para perbankan ASEAN di tahun mendatang adalah masalah proteksionisme dan kemungkinan munculnya friksi di kalangan anggota ASEAN sendiri. Oleh karena itu pembangunan ekonomi perlu terus dilanjutkan secara terbuka; (10) bank-bank yang ada di Indonesia diharuskan membiayai kegiatan ekspor non-migas dan khusus bank yang didirikan secara patungan dengan bank asing diwajibkan untuk mengalokasikan 50% dana kredit untuk membiayai ekspor non-migas; (11) masalah pinjaman bank-bank dari luar negeri tidak akan mempengaruhi sirkulasi uang di dalam negeri dan tingkat inflasi karena dana itu untuk membiayai kegiatan ekspor non-migas dan proyek yang berorientasi ekspor (*Suara Pembaruan*, 20-7-1990).

Sementara itu, pada forum diskusi, delegasi Singapura mengatakan bahwa: (1) ASEAN perlu mengatur kiat bersama menyambut modal dan teknologi yang sedang dialihkan dari Jepang dan negara-negara industri baru (NIC) ke negara-negara berkembang; (2) tahun 1989 negara-negara ASEAN memperoleh 52,3% dari US\$8,9 milyar investasi yang ditanam oleh kelima negara industri baru (NIC). Hal ini tentu akan lebih baik lagi, jika terjalin globalisasi aktivitas bersama antar negara ASEAN (*Kompas*, 21-7-1990).

Delegasi Filipina mengatakan bahwa: (1) langkah konkrit pembentukan kekuatan bersama ASEAN seharusnya bukan hanya globalisasi aktivitas bersama tetapi lebih tepat jika diciptakan formula investasi intra-regional untuk meraih investasi dari negara-negara industri baru (NIC); (2) empat bentuk kerjasama ASEAN, yaitu kesepakatan perdagangan preferensial, proyek industri, komplementasi industri dan kesepakatan industri patungan, belum menunjukkan integrasi ekonomi yang berarti; (3) seharusnya dalam formula in-

vestasi intra-regional, jaringan bank ASEAN memiliki sistem bersama yang saling mendukung, dan dapat segera dimanfaatkan dengan ditunjang oleh pembentukan area bebas perdagangan di kawasan ASEAN (*Kompas*, 21-7-1990).

Delegasi Indonesia mengatakan bahwa: (1) Indonesia tetap pada prinsip kebijakan deregulasi yang berporos pada keterbukaan ekonomi; (2) perubahan yang terjadi di Indonesia ialah peningkatan peran sektor swasta dalam aktivitas ekonomi; (3) keterbukaan Indonesia memungkinkan perbankan ASEAN berperan dalam berbagai sektor di Indonesia, misalnya kerjasama pelatihan karena perbankan Indonesia masih kekurangan tenaga manajer (*Kompas*, 21-7-1990).

Prof. Dr. Ronald I McKinnon dari Universitas Stanford, California, AS, mengatakan bahwa: (1) stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN harus dijaga dengan perimbangan kebebasan moneter dan perdagangan, sebab dalam penyediaan modal yang mutlak dibutuhkan dalam stabilitas ekonomi seringkali muncul bahaya yang tidak kelihatan sebelumnya. Misalnya, membentuk pasar modal, memang merupakan salah satu cara yang baik untuk memperoleh modal, tetapi kelimpahan modal yang diperoleh tidak produktif jika pasar modalnya kacau dan nilai tukar mata uang asing tidak dapat diduga; (2) jika mengalirnya dana pinjaman lewat sistem perbankan yang terorganisasi tidak dibarengi dengan imbalan keterbukaan perdagangan dapat mengakibatkan peminjam-peminjam yang potensial membentuk kekuatan pendanaan sendiri, yang akhirnya menimbulkan perbedaan antara peminjam yang diprioritaskan dan yang tidak diprioritaskan (*Kompas*, 21-7-1990).

Sementara itu, Dr. Sjahrir mengatakan bahwa salah satu contoh yang baik untuk dikaji adalah kebijaksanaan perbankan di Indonesia yang kini mampu menggerakkan kekuatan dan menumbuhkan ekonomi. Namun harus didukung dengan kebijaksanaan perdagangan yang memberi keleluasaan yang seimbang dengan kebijaksanaan perbankan. Paket deregulasi perdagangan bulan Mei 1990 cukup baik tetapi belum memadai jika dibandingkan dengan kebijaksanaan perbankan (*Kompas*, 21-7-1990).

Gubernur Bank Indonesia, Adrianus Mooy, mengatakan bahwa: (1) bank-bank yang tidak sehat harus segera merestrukturisasi dana dan jangan ragu-ragu meminta *discount window*; (2) bank-bank yang tidak sehat disebabkan terlalu bergantung pada pasar uang, pada-

hal pasar uang hanya merupakan salah satu sumber dana (*Suara Pembaruan*, 21-7-1990).

Ketua Federasi Perikanan ASEAN (AFF), J.A. Sumendap, mengatakan setelah pertemuan AFF dengan komite tetap keuangan, pertanian dan agro industri Dewan Perbankan ASEAN (ABC) di Bali tanggal 20 Juli 1990 bahwa: (1) sebuah perusahaan perikanan ASEAN (*ASEAN Fisheries Corporation*) akan dibangun di Indonesia; (2) proyek kerjasama perusahaan perikanan ASEAN dihasilkan berdasarkan sidang Dewan Federasi Perikanan ASEAN ke-1 di Bangkok, bulan Oktober 1989; (3) perusahaan perikanan ASEAN meliputi pabrik pemrosesan dan pengalengan, penyiapan ruang pendingin (*cold storage*) dan pabrik es; (4) sasaran perusahaan perikanan ASEAN adalah memberikan nilai tambah bagi hasil-hasil perikanan dan penyerapan tenaga kerja; (5) investasi perusahaan itu diperkirakan mencapai US\$20-30 juta, dan pemegang sahamnya adalah negara-negara ASEAN anggota federasi perikanan masing-masing negara; (6) selain perusahaan perikanan ASEAN, sedang direncanakan pembangunan *ASEAN Seafood Restaurant* di masing-masing negara ASEAN; (7) perusahaan perikanan ASEAN tidak akan tumpangtindih dengan PT Industri Perikanan Nusantara yang didirikan di Indonesia oleh 37 perusahaan swasta (*Antara*, 21-7-1990).

Pada penutupan pertemuan mereka sepakat untuk meneruskan ASEAN Fund tahap kedua setelah ASEAN Fund tahap pertama berhasil mengumpulkan modal sekitar US\$212 juta.

Dalam jumpa pers se usai penutupan konperensi, Ketua Dewan Perbankan ASEAN, H. Surasa, mengatakan bahwa: (1) sejak tahun 1988 ASEAN Fund tahap pertama memiliki modal sekitar US\$150 juta kemudian meningkat menjadi US\$212 juta; (2) peningkatan nilai sahamnya naik dari US\$10 mejadi sekitar US\$14,25 atau rata-rata meningkat 42%; (3) besarnya target modal untuk ASEAN Fund tahap kedua belum dapat ditetapkan; (4) *ASEAN venture capital* perlu didirikan sebagai lembaga keuangan yang diharapkan dapat membiayai perusahaan skala menengah dan pengusaha kecil di negara-negara anggota ASEAN; (5) dengan adanya ASEAN Fund dan modal usaha ASEAN memungkinkan peningkatan dana untuk investasi dalam negeri; (6) para bankir sepakat agar memantau perkembangan yang terjadi di negara-negara lain (*Antara*, 22-7-1990).

III. KERJASAMA NON-EKONOMI ASEAN

A. KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN INFORMASI

1. Persahabatan CAJ-NSK

Program Persahabatan Konfederasi Wartawan ASEAN dengan Nihon Shimbun Kyokai (Persatuan Editor dan Penerbit Surat Kabar Jepang) ke-13 berlangsung di Tokyo tanggal 7 Juni - 17 Juli 1990, diikuti oleh 15 wartawan dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Muangthai untuk mempererat dan memperdalam hubungan persahabatan Jepang dengan negara-negara ASEAN.

Ketua Pusat Pers Asing (FPC) Jepang, Teruji Akiyama mengatakan penutupan program itu bahwa: (1) program persahabatan NSK-CAJ diharapkan dapat membantu memperdalam dan memperkokoh hubungan persahabatan Jepang-ASEAN; (2) sejak tahun 1978 lebih dari seratus wartawan ASEAN telah mengikuti program ini; (3) dalam program sekarang para peserta mempelajari perkembangan industri dan pola ketenagakerjaan di Jepang dan memperoleh penjelasan mengenai obyek-obyek industri yang dikunjungi serta bertukar pikiran dengan media massa dan industri setempat (*Antara*, 17-7-1990).

2. Kongres Pustakawan ASEAN ke-8

Kongres Pustakawan ASEAN ke-8 berlangsung di Jakarta tanggal 11-14 Juni 1990 dengan tema "Tantangan-tantangan Baru dalam Pelayanan Perpustakaan Negara-negara Berkembang," untuk memperoleh gambaran tentang masalah ketenagaan, peralatan dan sistem pelayanan perpustakaan di ASEAN. Kongres ini diikuti oleh 550 pustakawan Indonesia dan 114 pustakawan ASEAN lainnya, selain itu juga diikuti 32 pustakawan dari AS, Australia, Belanda, Inggris, Italia, Hongkong, Jepang dan Selandia Baru (*Antara*, 11-6-1990).

Presiden Soeharto mengatakan dalam pembukaan kongres itu bahwa: (1) peranan pustakawan dan perpustakaan penting bagi kemajuan masyarakat; (2) profesi pustakawan di Indonesia diakui secara resmi sejak tahun 1988 dan pengembangan karir para pustakawan terpulang pada mereka sendiri dalam memanfaatkan peluang tersebut; (3) berbeda dengan pertemuan ka-

langan profesi lainnya, pertemuan para pustakawan biasanya luput dari perhatian masyarakat umumnya dan media massa pada khususnya; (4) dalam proses pembangunan yang penting bukan hanya hasilnya yang bersifat kebendaan seperti tumbuhnya pabrik-pabrik atau bertambahnya jalan raya dan gedung-gedung megah, tetapi pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang dapat menaikkan dan memperbaiki mutu kehidupan lahir batin bangsa secara menyeluruh; (5) pembangunan adalah proses yang terus-menerus untuk meningkatkan mutu kehidupan sosial, spiritual, intelektual maupun profesional; (6) belum tentu semua yang berasal dari negara maju dapat diterapkan di negara-negara sedang membangun karena adanya perbedaan tingkat kemajuan ekonomi, sosial dan pendidikan; (7) bagi para pustakawan di negara-negara sedang membangun perlu mengkaji sistem dan jasa perpustakaan serta dokumentasi yang sesuai, karena hal ini penting guna menunjang pembangunan sosial ekonomi di negara mereka; (8) pengkajian penting dilakukan karena pustakawan merupakan motor penggerak perpustakaan, umumnya dididik di negara maju, atau mengenal metode-metode yang diterapkan di negara maju; (9) kemampuan membangun perpustakaan dan kebutuhan perpustakaan di negara maju berbeda dengan negara-negara yang sedang membangun; (10) Indonesia berusaha membangun perpustakaan sampai ke pelosok-pelosok tanah air karena menyadari pentingnya ilmu pengetahuan serta teknologi bagi pembangunan, tetapi karena keterbatasan kemampuan keuangan hasilnya masih jauh dari kebutuhan; (11) melalui perpustakaan masyarakat akan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Antara*, 11-6-1990).

B. KERJASAMA KESEHATAN

- Konferensi Kesehatan ASEAN ke-1

Konferensi Kesehatan ASEAN ke-1 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 11-14 Juli 1990 diikuti oleh delegasi Dinas-dinas Kesehatan dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk: (1) merumuskan langkah-langkah pengawasan kesehatan dan mekanisme pengawasan penyakit trans-perbatasan; (2) bertukar informasi dan pengalaman serta berbagi pengetahuan teknis dan keahlian maupun teknologi di bidang kesehatan.

Menteri Kesehatan Malaysia Ng Cheng Kiat mengatakan pada pertemuan itu bahwa forum ini untuk meng-

koordinasi peraturan kesehatan internasional dan menyelaraskan pemberlakuan peraturan obat-obatan serta makanan antar negara anggotanya. Di samping itu juga untuk mengenali masalah umum kesehatan di perbatasan dan membahas pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkannya (*Antara*, 10-7-1990).

C. KERJASAMA LINGKUNGAN HIDUP

- Pertemuan Kelompok Ahli Lingkungan Hidup ASEAN ke-3

Pertemuan Kelompok Ahli Lingkungan Hidup ASEAN (AEGE) ke-3 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 13-14 Juni 1990, dihadiri Menteri Pembangunan Brunei Darussalam, Ismail Damit, Sekretaris Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina, Celso Roque, Menteri Lingkungan Hidup Singapura, Ahmad Mattar, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Indonesia, Emil Salim, Menteri Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Energi Muangthai, Prachuab Chaiyasan, untuk membahas masalah lingkungan hidup.

Dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Law Hieng Ding, Menteri Sains, Teknologi dan Lingkungan Hidup Malaysia, Stephen Yong mengatakan bahwa: (1) para ahli lingkungan hidup ASEAN agar waspada terhadap investor yang tidak bertanggung jawab dan menciptakan polusi yang merusak keseimbangan lingkungan hidup di Asia Tenggara; (2) satu cara untuk mencegah polusi akibat pembuangan limbah adalah menciptakan lingkungan yang harmonis di lingkungan ini; (3) para ahli agar mencari kemungkinan bagi pelaksanaan proyek di bawah pengawasan program kerjasama Jepang-ASEAN, yang antara lain meliputi pembangunan teknologi lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup (*Antara*, 14-6-1990).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Malaysia, Nordin Hassan mengatakan bahwa: (1) negara-negara ASEAN saat ini sedang memerangi polusi dan menentang praktek-praktek perdagangan yang tidak jujur atas nama lingkungan hidup; (2) para ahli sebaiknya menyadari adanya kecenderungan praktek-praktek perdagangan atas nama lingkungan hidup sehingga dapat mengatasi praktek perdagangan terselubung tersebut (*Antara*, 14-6-1990).

Mereka sepakat untuk: (1) memperluas kerjasama dan mengambil sikap bersama mengenai isu lingkung-

an hidup global; (2) negara-negara maju hendaknya mengalihkan teknologi dan dana bagi negara-negara berkembang untuk mengatasi polusi; (3) merumuskan suatu strategi bagi pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; (4) kerangka kerja bagi keharmonisan standar kualitas lingkungan hidup (*Antara*, 20-6-1990); (5) mengambil tindakan guna mengatasi berbagai masalah mengenai lingkungan; (6) menyertakan faktor-faktor lingkungan dalam perencanaan ekonomi dan berjanji menerima rencana pengelolaan dan pengembangan program kerjasama sumber daya alam; (7) pembagian kelompok kerja ASEAN yang meliputi: (a) konservasi alam oleh Malaysia; (b) lingkungan laut dan perairan oleh Brunei Darussalam; (c) pencemaran antar perbatasan oleh Singapura; (d) pengelolaan lingkungan oleh Filipina; (e) ekonomi lingkungan hidup oleh Indonesia; (f) informasi mengenai lingkungan melalui kesadaran masyarakat dan pendidikan oleh Muangthai (*Suara Pembaruan*, 20-6-1990); (8) membentuk strategi kelompok guna: (a) pengembangan yang menunjang program-program kebijaksanaan; (b) mengharmoniskan standar kesamaan lingkungan hidup; (c) mengkoordinasikan pencegahan polusi lintas perbatasan; (d) mengambil langkah-langkah yang mengurangi polusi; (e) melakukan riset dan pengembangan serta memajukan penggunaan teknologi bersih (*Merdeka*, 21-6-1990).

D. MASALAH KEAMANAN

Menteri Pertahanan Filipina, Fidel Ramos, mengatakan pada pembukaan Pekan Mesiu dan Pertahanan Filipina pertama di Manila tanggal 28 Juni 1990, bahwa: (1) negara-negara Asia Tenggara agar bersama-sama membuat senjata dan mengubah kawasan Asia Tenggara menjadi suatu blok yang kuat untuk menangkal ancaman dari luar; (2) sangat tidak realistis dan berbahaya bagi suatu negara untuk mengandalkan belas kasihan negara lain dalam urusan pertahanan; (3) ASEAN sebaiknya membuat kebijakan-kebijakan yang membuka peluang bagi kelompok negaranya untuk menghasilkan dan menjual peralatan pertahanan dalam konteks saling melengkapi, kerjasama atau semangat berkompetisi; (4) Filipina jangan sampai tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya dalam usaha memproduksi perlengkapan militer; (5) Filipina dapat membantu kestabilan regional dengan meningkatkan kerjasama pertahanan, khususnya dalam konteks saling melengkapi di bawah payung ASEAN (*Media Indonesia*, 29-6-1990).

Staf Ahli Lemhannas Indonesia, Sudjai, mengatakan pada Kursus Diplomat-diplomat Muda ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 4 Juli 1990, bahwa: (1) ASEAN perlu meningkatkan kerjasama keamanan untuk menghadapi ancaman-ancaman di masa mendatang dengan prinsip tak ada pangkalan militer di kawasan Asia Tenggara; (2) ASEAN harus mewujudkan ZOPFAN dan zona bebas senjata nuklir; (3) ASEAN harus terus menjamin kebebasan dan keamanan pelayaran pada garis SLOC (*Sea Lines of Communication*); (4) perlu usaha bersama untuk mengatasi kelemahan di bidang kerjasama ekonomi; (5) kerjasama sosial budaya dalam arti hubungan sosial antara sesama warga ASEAN masih lemah (*Antara*, 5-7-1990).

Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Lee Hsien Loong, mengatakan kepada peserta "Indonesia Forum" yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta tanggal 11 Juli 1990 bahwa: (1) kehadiran AS penting bagi pemeliharaan stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara. Oleh karena itu menjadi kepentingan ASEAN untuk mendorong agar AS tetap mempertahankan kehadirannya; (2) pengurangan kehadiran AS secara drastis dapat menimbulkan kekhawatiran karena negara-negara di kawasan Asia akan terpancing untuk meningkatkan kemampuan militernya; (3) Presiden Soeharto dan PM Mahathir Mohamad, tidak keberatan atas tawaran Singapura untuk menyediakan fasilitas bagi perbaikan pesawat dan kapal-kapal AS yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara (*Kompas*, 12-7-1990).

Panglima Komando Tertinggi Muangthai, Jenderal Sunthorn Kongsompong, mengatakan di Bangkok tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) sebaiknya ASEAN memiliki rasa percaya diri dan mengambil bagian dalam produksi senjata gabungan; (2) apabila ASEAN tidak dapat bergantung pada kekuatan bersama, akan muncul kekuatan baru yang mempengaruhi dan mendominasi ASEAN di masa-masa mendatang; (3) latihan gabungan militer yang hanya bersifat bilateral agar lebih ditingkatkan untuk memperkuat rasa percaya diri ASEAN (*Antara*, 20-7-1990).

IV. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

A. PERTEMUAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOGNYA (PMC)

Post Ministerial Conference atau PMC berlangsung di Jakarta tanggal 27-29 Juli 1990 untuk membahas: (1)

kerjasama ekonomi Asia-Pasifik; (2) masalah Kamboja yang berkaitan dengan perubahan sikap AS; (3) masalah Putaran Uruguay (*Pelita*, 27-7-1990).

Dalam jamuan makan siang yang diselenggarakan *Indonesia Business Council* dan *Canada Business Association* di Jakarta tanggal 26 Juli 1990, Menlu Kanada Joe Clark mengatakan bahwa: (1) ASEAN harus meningkatkan dialog dengan negara-negara lain yang tidak termasuk dalam mitra dialognya, terutama dengan negara-negara yang mempunyai potensi di bidang keamanan dan kemakmuran di kawasan ini; (2) Kanada akan mendorong ASEAN untuk mengembangkan dialog di kawasan ini demi kemajuan ASEAN dan seluruh kawasan Asia-Pasifik; (3) ada tiga tahapan dialog dalam ASEAN yakni: (a) dialog tahunan para menlu ASEAN; (b) dialog para menlu ASEAN dengan mitra wicaranya; (c) dialog ASEAN dengan negara-negara yang tidak termasuk mitra wicaranya; (4) meskipun pertentangan ideologi sudah tidak menjadi sumber ketegangan antara Timur dan Barat, tetapi di kawasan Asia-Pasifik berbagai ideologi tetap hidup dan bersaing serta menjadi ancaman bagi keamanan regional bahkan global; (5) peredaan ketegangan secara otomatis tidak mengakhiri konflik regional dan negara-negara besar biasanya ikut berperan dalam konflik regional yang dapat merugikan kawasan; (6) perhatian Kanada di Pasifik bukan hanya dalam hal perdagangan dan investasi saja, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya (*Suara Pembaruan*, 27-7-1990).

Sedangkan Menlu Australia, Gareth Evans mengatakan pada pers di Jakarta tanggal 26 Juli 1990 bahwa: (1) meskipun masih banyak masalah yang harus diatasi di Timor Timur, namun usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sangat membesarkan hati Australia; (2) Australia akan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam membangun dan meningkatkan kondisi hidup masyarakat Timor Timur, karena hal itu merupakan cara terbaik bagi negaranya untuk ikut membantu rakyat di propinsi itu; (3) Timor Timur membutuhkan bantuan untuk meningkatkan hasil pertanian, peternakan dan penambahan suplai air di pedesaan; (4) Australia akan menambah program bantuan bilateral jangka pendek dan jangka panjang bagi pembangunan di Timor Timur sebesar US\$1,5 juta atau sekitar Rp2,1 milyar (*Kompas*, 27-7-1990).

Ketua Komite Tetap ASEAN, Ali Alatas mengatakan pada pembukaan sidang itu bahwa: (1) disparitas dan ketimpangan yang sangat tajam telah memperluas ketidakpastian ekonomi dunia serta mengakibatkan hu-

bungan antara negara maju dan negara berkembang semakin menyedihkan; (2) ASEAN prihatin terhadap dampak bertambahnya beban utang luar negeri negara-negara berkembang, yang diperburuk oleh fluktuasi kurs dan mengecilnya arus finansial untuk pembangunan; (3) pengaktifan kembali Dialog Utara-Selatan semakin diperlukan guna menanggapi berbagai masalah global dengan dasar saling ketergantungan antara negara yang satu dengan lainnya; (4) investasi dan perdagangan dari Barat kemungkinan akan beralih ke negara-negara Eropa Timur, setelah negara-negara sosialis tersebut mengubah sistem ekonomi mereka dari perencanaan ke arah ekonomi pasar; (5) upaya pencarian penyelesaian politik di Kamboja semakin mengendur, dan faksi-faksi yang bersengketa masih belum mampu membangun kemauan politik untuk mencapai suatu kompromi bahkan memperkeras sikap mereka masing-masing; (6) karena proses perundingan berada dalam tahap rawan, hendaknya pihak-pihak yang terlibat dapat menahan diri sehingga proses penyelesaian Kamboja tidak berlarut-larut (*Pelita*, 28-7-1990).

Sedangkan Menlu AS James Baker III mengatakan bahwa: (1) perubahan kebijaksanaan AS dalam masalah Kamboja adalah untuk mencegah berkuasanya kembali Khmer Merah; (2) kursi Kamboja di PBB adalah milik pemerintah yang dipilih rakyat Kamboja secara bebas, yaitu orang-orang Kamboja yang terikat untuk mengadakan pemilihan umum yang adil dan bebas dalam konteks suatu penyelesaian yang mencakup gencatan senjata serta penghentian kekerasan terhadap penduduk sipil; (3) jika disepakati mengenai tujuan penentuan nasib sendiri bangsa Kamboja, maka diperlukan dorongan kepada upaya kelima anggota tetap DK PBB untuk mendesak terbentuknya SNC dan penyelenggaraan pemilu yang diadakan PBB; (4) untuk mencapai penentuan nasib sendiri di Kamboja dan menghindarkan kebangkitan kembali militer Khmer Merah akan lebih baik jika dilakukan kerjasama karena peluangnya lebih besar; (5) AS sangat gembira karena kebijakan barunya sangat dekat dengan posisi bersama ASEAN seperti yang tercantum dalam pernyataan bersama para Menlu ASEAN tentang Kamboja tanggal 23 Juli 1990; (6) AS dan ASEAN mempunyai tujuan yang sama, tetapi hanya terdapat sedikit perbedaan tentang pendekatan yang ditempuh untuk mencapai tujuan (*Kompas*, 28-7-1990).

Menlu Selandia Baru Mike K. Moore mengatakan bahwa: (1) kini saatnya untuk membuat Cina dan Vietnam menyadari bahwa kesabaran masyarakat dunia

tentang Kamboja sudah mulai habis; (2) jika Cina dan Vietnam tidak ingin ditinggalkan oleh kekuatan dunia, maka mereka harus melaksanakan kewajibannya; (3) perubahan politik dan ekonomi yang sedang melanda dunia tidak mempengaruhi keadaan di Kamboja, meskipun banyak pihak telah berupaya membantu menyelesaikan konflik itu termasuk para pemimpin ASEAN; (4) Selandia Baru mendukung sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB (*Pelita*, 28-7-1990).

Sementara itu Menlu Australia, Gareth Evans mengatakan bahwa situasi penyelesaian Kamboja kini telah beralih dari banyak jalan pada tahun lalu menjadi satu jalan pada tahun ini. Sedangkan usaha untuk menyeberangi jalan itu adalah dengan pembentukan Dewan Nasional Tertinggi (SNC).

Sedangkan Menlu Jepang Taro Nakayama mengatakan bahwa hal yang terpenting bagi proses perdamaian di Kamboja saat ini adalah pembentukan SNC. Sebab dengan pembentukan SNC itu dapat dijadikan forum dialog bagi faksi-faksi Kamboja mengenai masalah-masalah penting yang harus diatasi bersama, misalnya struktur pemerintahan sementara, masalah yang berkaitan dengan kekuasaan militer di Kamboja dan sebagainya sehingga dapat tercapai perdamaian.

Di lain pihak Komisioner Masyarakat Eropa untuk hubungan Utara-Selatan Abel Matules mengatakan bahwa: (1) kecenderungan baru di bidang politik dan ekonomi di Eropa tidak akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi negara-negara di luar Eropa; (2) ASEAN dan negara-negara berkembang dapat memetik keuntungan dari akibat meluasnya kesempatan pasar di Eropa Timur; (3) ME sudah mengusulkan kepada semua anggotanya untuk menaikkan bantuan pembangunan kepada Asia dan Amerika Latin sebesar 82% dalam periode 1991-1995 (*Pelita*, 28-7-1990).

Sementara itu dalam sidang tanggal 28 Juli 1990, Menlu Filipina Raul Manglapus yang mewakili ASEAN mengatakan bahwa: (1) ASEAN meminta agar Jepang memperhatikan akses pasar produk-produk ASEAN ke pasar Jepang; (2) ASEAN mengharapkan agar Jepang cepat menangani ketidakseimbangan struktural dalam perdagangan kedua pihak dan masalah perdagangan lainnya dengan pertimbangan yang cermat dan serius.

Di lain pihak Menlu Jepang Taro Nakayama mengatakan bahwa: (1) kawasan ASEAN akan terus merupakan prioritas nomor satu bagi kerjasama ekonomi Jepang; (2) niat Jepang untuk meluaskan dukungan se-

pantasnya ke Eropa Timur untuk mendorong perubahan tidak akan mengurangi perhatian Jepang ke Asia khususnya ASEAN; (3) kerjasama dengan ASEAN penting untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi di kawasan Asia-Pasifik; (4) Jepang berniat untuk bekerjasama dengan ASEAN guna mencari penyelesaian secara dini seperti konflik Kamboja dan berbagai faktor destabilator; (5) pada saat kritis seperti sekarang ini memperkuat hubungan dan persahabatan serta kerjasama antara Jepang dengan ASEAN menjadi lebih penting.

Sedangkan Menlu RI Ali Alatas yang memimpin dialog ASEAN-Selandia Baru mengatakan bahwa: (1) ASEAN meminta agar jumlah mahasiswa ASEAN yang belajar di negara itu bertambah terutama untuk kursus-kursus terbatas; (2) ASEAN mengharapkan agar hambatan-hambatan perdagangan dapat diselesaikan demi mempermudah produk-produk ASEAN masuk ke Pasar Selandia Baru; (3) ASEAN mengharapkan agar pengusaha swasta Selandia Baru menanam modalnya terutama investasi dalam *ASEAN Industrial Joint Venture Scheme*; (4) pertimbangan Selandia Baru mencabut izin masuk bebas bagi salah satu negara ASEAN dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan perdagangan dan menimbulkan dampak negatif lainnya dalam hubungan kedua negara, karena itu tidak perlu dilaksanakan.

Sedangkan Menlu Selandia Baru Mike K. Moore mengatakan bahwa: (1) untuk jangka lima tahun sampai periode 1991-1992 negaranya telah menyediakan US\$12 juta dengan fokus pada berbagai proyek yang berkaitan dengan berbagai lembaga dan proyek promosi perdagangan serta investasi; (2) Selandia Baru sudah memperoleh cara lain untuk membiayai mahasiswa ASEAN di Fakultas Perdagangan Universitas Victoria dengan cara membebaskan dana program ASEAN untuk kemungkinan proyek baru; (3) ekspor ASEAN ke Selandia Baru pada tahun 1989 meningkat 60% dan merupakan jumlah tertinggi dibanding dengan mitra dagang negara lainnya; (4) Selandia Baru akan mengurangi tarif masuk bagi barang negara-negara ASEAN sebesar 10% pada tahun 1996; (5) ASEAN agar mematuhi kesepakatan GATT seperti yang dilakukan negaranya; (6) Selandia Baru tetap akan memberikan bantuan bagi pengembangan sumber daya manusia dan alih teknologi khususnya dalam pengelolaan lingkungan (*Suara Pembaruan*, 30-7-1990).

Ketika menerima kunjungan kehormatan para Menlu ASEAN dan mitra dialognya di Istana Merdeka

Jakarta tanggal 28 Juli 1990, Presiden Soeharto mengatakan bahwa: (1) ASEAN dan mitra dialognya telah bersama-sama mencoba mengerahkan upaya untuk menyelesaikan konflik Kamboja secara menyeluruh, namun pada dasarnya penyelesaian itu terpulung pada rakyat Kamboja sendiri; (2) sumber permasalahan pengungsi adalah konflik Kamboja; (3) baik masalah Kamboja maupun pengungsi bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan posisi ASEAN dan mitra dialognya, tetapi justru untuk saling mengkoordinasikan gerak dan langkah; (4) ASEAN menganggap penting forum dialog semacam ini, karena bukan hanya bermanfaat bagi ASEAN saja tetapi juga bagi mitra dialognya; (5) perbedaan pendapat, pandangan dan persepsi dalam forum dialog adalah normal; (6) selama masih dapat berdialog, bertukar pikiran dan saling menjelaskan guna mencapai tujuan bersama yang lebih mendalam, hal ini akan tetap membawa kebersamaan guna menyumbangkan saham untuk mencapai tujuan bersama; (7) prinsip Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD '45 yakni ikut menciptakan dunia yang damai, bebas dan dilandasi keadilan sosial yang sekaligus juga merupakan tujuan bersama (*Suara Pembaruan*, 29-7-1990).

Sementara itu dalam pertemuan ASEAN-AS, Menlu AS James Baker mengatakan bahwa: (1) secara *Structural Impediment Initiative* (SII) AS-Jepang sangat penting, karena dapat terbukti secara integral bukan hanya untuk kemakmuran negaranya dan Jepang, tetapi juga bagi pertumbuhan kawasan secara keseluruhan; (2) AS percaya APEC dan ASEAN akan saling melengkapi baik di bidang telekomunikasi dan sumber daya manusia maupun di bidang promosi perdagangan, karena semua itu dapat membantu keterbatasan struktural guna mendorong pertumbuhan; (3) AS dan ASEAN sebaiknya meninjau ulang mekanisme konsultasi mereka sebagai tambahan Pertemuan Tahunan ASEAN-AS sekarang ini, karena hal ini sangat berguna dalam meningkatkan saling pengertian dan kerjasama; (4) ASEAN agar meningkatkan berbagai upaya untuk menangani bahaya narkoba yang saat ini makin meningkat; (5) volume perdagangan ASEAN-AS melebihi US\$30 juta per tahun, karena itu perlu dibentuk suatu mekanisme untuk mengatasi dan mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dagang (*Suara Pembaruan*, 30-7-1990).

B. HUBUNGAN ASEAN-JEPANG

Dalam seminar dengan judul "The Japan-US Relations in the Asia-Pacific Context" yang diselenggarakan

oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, tanggal 19 Juli 1990, Presiden Institut Masalah Internasional Jepang, Nobuo Matsunaga, mengatakan bahwa: (1) untuk menghadapi tantangan di masa mendatang akibat berbagai perubahan, dialog antara ASEAN, AS dan Jepang perlu terus dipertahankan; (2) negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dituntut kesiapan untuk melakukan penyesuaian dan menanggapi tuntutan-tuntutan baru akibat perubahan yang sudah dan akan terjadi; (3) Jepang dan ASEAN agar mendukung usaha AS untuk memenuhi komitmennya kepada Asia-Pasifik, dan memanfaatkan pertumbuhan dan dinamika ekonomi Asia-Pasifik; (4) Jepang telah bersedia untuk ikut membiayai pasukan AS yang ditempatkan di wilayah Jepang dan akan terus mempertahankan keamanan yang saling menguntungkan dalam kerjasama dengan AS; (5) perubahan yang terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur dapat menciptakan suatu tatanan global yang lebih konstruktif dan membawa kemakmuran umat manusia; (6) Jepang telah siap untuk memikul tanggung jawab atas kepemimpinan dunia; (7) AS tidak dapat meninggalkan atau mendelegasikan tanggung jawabnya dalam bidang keamanan dan politik, sedangkan Jepang dan sekutu AS lainnya hanya dapat melengkapi atau memperkuatnya; (8) Jepang siap untuk memberikan dukungan ekonomi bagi perkembangan dunia dan berperan aktif dalam rencana pembentukan suatu forum konsultasi dan kerjasama ekonomi di kawasan Pasifik; (9) ada tiga faktor yang akan menentukan akibat perubahan-perubahan internasional terutama yang terjadi di Eropa terhadap kawasan Asia-Pasifik, yaitu: (a) bagaimana tanggapan AS terhadap perubahan-perubahan tersebut; (b) bagaimana Uni Soviet menemukan perannya di Asia-Pasifik; (c) bagaimana arah yang akan diambil RRC (*Suara Karya*, 21-7-1990).

C. HUBUNGAN ASEAN-UNI SOVIET

Wakil Menlu Uni Soviet, Igor Rogachev, mengatakan di Kuala Lumpur tanggal 8 Juni 1990 bahwa Uni Soviet: (1) ingin memperbarui dialog tahunannya dengan negara-negara ASEAN mengenai masalah politik dan ekonomi, karena negara-negara ASEAN selalu berhubungan dengan partner-partner dagang negara-negara maju; (2) ingin menjadi anggota forum kerjasama ekonomi Asia-Pasifik (APEC); (3) mengusulkan perundingan multilateral dengan AS dan negara-negara besar di Asia untuk mengurangi ketegangan dan pembangunan senjata di kawasan Asia-Pasifik; (4) telah menarik armada kapal induknya dan akan menarik 7

dari 9 kapalnya dari pangkalan AL di Teluk Cam Ranh, Vietnam (*Merdeka*, 9-6-1990).

D. HUBUNGAN ASEAN - ASIA-PASIFIK

- *Pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ke-2*

Pertemuan kedua Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) berlangsung di Singapura tanggal 30-31 Juli 1990, dihadiri oleh 23 menteri yang mewakili 12 negara ASEAN, AS, Kanada, Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang dan Australia untuk membahas proyek-proyek kerjasama di bidang data investasi dan perdagangan, peningkatan perdagangan, perluasan alih teknologi dan investasi, pengembangan sumber daya manusia, kerjasama energi, kerjasama sumber daya kelautan dan kerjasama telekomunikasi, masalah keanggotaan APEC, tinjauan ekonomi internasional dan regional serta pembebasan dagang global.

PM Singapura, Lee Kuan Yew mengatakan pada pembukaan sidang bahwa: (1) ASEAN mendukung APEC dengan jaminan bahwa APEC tidak akan menghapuskan identitas ASEAN; (2) tujuan ASEAN dan APEC yaitu untuk memajukan upaya pembebasan perdagangan dan peningkatan standar hidup masyarakat; (3) pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik rata-rata mencapai 4,2% per tahun sedangkan pertumbuhan ekonomi industri baru (NIE) 7,8%; (4) pertumbuhan perdagangan APEC selama tahun 1980-1988 mencapai 6,7% per tahun. Sementara pertumbuhan perdagangan dunia hanya mencapai 4,6% per tahun. Berarti pertumbuhan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik hampir dua kali lipat pertumbuhan negara-negara OECD; (5) pada tahun 1980 perdagangan antara negara-negara APEC meningkat sebesar 50% sedangkan pada tahun 1990 sebesar 55%; (6) pada tahun 1980 pertukaran perdagangan hanya berupa bahan-bahan mentah dan energi untuk pabrik-pabrik tetapi sekarang pertukaran perdagangan berupa barang-barang yang sudah diproses dan barang-barang pabrik; (7) pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya standar hidup masyarakat di kawasan Asia-Pasifik merupakan hasil kebijakan yang berorientasi ekspor dengan dasar pasar bebas; (8) pertemuan APEC kedua telah memberikan kesempatan mengenai cara kerja APEC di masa depan dan APEC dapat menjadi sebuah forum yang mewadahi pertukaran pandangan dan membahas masalah ekonomi yang menjadi kepentingan bersama; (9) APEC perlu memusatkan perhatian kepada perubahan pola-pola perdagangan yang timbul

akibat perkembangan ekonomi dan teknologi; (10) di bidang perdagangan negara APEC yang mencatat sepertiga dari seluruh perdagangan dunia berkepentingan menuntaskan pembicaraan dagang Babak Uruguay yang akan berakhir pada bulan Desember 1990 (Antara, 30-7-1990); (11) APEC hanya dapat berjalan bila ada keamanan dan stabilitas di dunia; (12) APEC akan memberikan sumbangan yang berarti bagi tercapainya dunia yang stabil dan lebih baik (*Suara Pembaruan*, 30-7-1990).

Menlu AS, James Baker III, mengatakan di Singapura tanggal 30 Juli 1990 bahwa: (1) AS mengusulkan agar masalah transportasi dimasukkan dalam program APEC; (2) AS menginginkan agar APEC memberikan komitmen yang kuat bagi keberhasilan perundingan perdagangan multilateral Babak Uruguay dan pembahasan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik secara global; (3) tugas APEC dalam mengurangi hambatan pertumbuhan akan menjadi katalis bagi perluasan dan kemakmuran kawasan Asia-Pasifik dan ekonomi dunia; (4) AS akan tetap mempertahankan kemitraannya dengan negara di kawasan Asia-Pasifik dan AS menganggap ASEAN sebagai lembaga politik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dapat melanjutkan tugas bersama dalam APEC; (5) negara-negara industri tetap akan terus memberikan landasan yang kuat bagi perluasan negara berkembang, pada saat pertumbuhan perdagangan dunia masih menguat (*Antara*, 30-7-1990).

Menlu Jepang, Taro Nakayama, mengatakan di Singapura tanggal 30 Juli 1990 bahwa: (1) Jepang setuju RRC, Taiwan dan Hongkong masuk dalam APEC; (2) APEC akan berperan lebih penting sebagai wadah tukar pengalaman dan pandangan serta dalam melaksanakan proyek kerjasama di berbagai bidang; (3) APEC akan menjadi model kerjasama regional yang terbuka bagi dunia (*Antara*, 30-7-1990).

Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, B.G. Lee Hsien Loong, mengatakan di Singapura tanggal 30 Juli 1990 bahwa: (1) APEC terikat pada prinsip perdagangan bebas dan akan tetap mempertahankan kebijakan dagang liberal; (2) APEC akan membantu keberhasilan perundingan perdagangan multilateral Babak Uruguay yang akan berakhir pada bulan Desember 1990; (3) pertemuan menteri-menteri perdagangan di Vancouver, Kanada, bulan September 1990 mendatang akan memberikan sumbangan bagi berhasilnya perundingan Babak Uruguay (*Antara*, 30-7-1990).

Menlu Malaysia, Abu Hassan Omar, sebagai Ketua Komite Tetap ASEAN mengatakan di Singapura tang-

gal 30 Juli 1990 bahwa: (1) bagi ASEAN masih terlalu dini untuk membahas masalah keanggotaan APEC karena APEC baru berfungsi sebagai forum konsultasi; (2) masalah keanggotaan APEC memerlukan waktu dan pertimbangan yang cukup lama; (3) ASEAN tidak ingin membentuk blok perdagangan karena ASEAN mendukung pasar yang jujur dan bebas (*Antara*, 31-7-1990).

Menteri Perindustrian dan Sumber Primer Brunei Darussalam, Abdul Rahman Taib, mengatakan di Singapura tanggal 30 Juli 1990 bahwa: (1) prinsip ASEAN dalam kerjasama APEC adalah mempertahankan kohesi dan identitas ASEAN serta kerjasama regional agar tidak menimbulkan pembentukan blok perdagangan; (2) APEC seharusnya memusatkan perhatian pada masalah investasi, pembebasan dagang, alih teknologi dan pengembangan sumber daya manusia; (3) APEC seharusnya berfungsi sebagai alat mencapai suatu tujuan guna mengurangi ketegangan ekonomi dan perdagangan (*Antara*, 31-7-1990).

Menlu Kanada, Joe Clark, mengatakan di Singapura tanggal 30 Juli 1990 bahwa: (1) ia setuju RRC, Taiwan dan Hongkong masuk dalam APEC; (2) pusat kegiatan ekonomi global kini beralih ke Pasifik, dan hal ini menguntungkan Kanada sebagai bangsa pedagang (*Antara*, 31-7-1990).

Menlu Ali Alatas, mengatakan di Singapura tanggal 31 Juli 1990 bahwa: (1) dalam persidangan ASEAN memberikan sikap tegas terhadap negara-negara maju; (2) ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama yang intinya mengecam sikap negara-negara maju yang tidak mematuhi prinsip-prinsip perdagangan yang jujur dan terbuka; (3) ASEAN berharap negara-negara maju dapat berperan lebih banyak misalnya dalam hal pembukaan akses pasar dan perdagangan; (4) ASEAN menganggap forum APEC sebagai forum peninjauan (*Antara*, 31-7-1990).

Menteri Perdagangan, Arifin Siregar, mengatakan di Singapura tanggal 31 Juli 1990 bahwa: (1) jika negara maju terus menuntut untuk minta konsesi sebagai balasan terhadap permintaan negara berkembang maka perundingan pembebasan dagang tidak akan mengalami kemajuan; (2) jika perundingan Babak Uruguay gagal maka negara maju akan bersikap seenaknya terhadap negara berkembang, misalnya ketika tekstil Indonesia di embargo negara-negara maju; (3) negara-negara maju lebih memusatkan pada bidang-bidang perdagangan jasa dan bidang-bidang perdagangan uang tidak banyak melibatkan negara berkembang (*Antara*, 31-7-1990).

Deklarasi Para Menteri APEC mengatakan bahwa: (1) keberhasilan Babak Uruguay 1990 merupakan kesimpulan paling penting dalam agenda internasional; (2) para menteri APEC khawatir apabila dalam perundingan Babak Uruguay 1990 tidak ada kemajuan; (3) bidang-bidang pertanian, tekstil dan bahan jadi, bidang jasa serta setiap kelompok akses pasar sangat mendesak untuk diselesaikan dalam Babak Uruguay 1990; (4) peraturan-peraturan dagang dalam Babak Uruguay harus meningkatkan kompetisi yang jujur dan terbuka. Mereka sepakat tentang pentingnya memperkuat sistem perdagangan antar bangsa; (5) masalah yang penting adalah tentang sistem pemecahan GATT yang lebih efektif; (6) para menteri perdagangan APEC sepakat untuk mengadakan perundingan setelah Babak Uruguay bulan Desember 1990 selesai, guna menilai hasil-hasil perundingan (*Antara*, 31-7-1990).

Sehubungan dengan Babak Uruguay, ASEAN menyatakan bahwa: (1) ASEAN kecewa tentang pertemuan Komite Perundingan Perdagangan bulan April 1990 yang tidak ada kelanjutannya; (2) tidak ada kesesuaian antara negara berkembang dengan negara maju tentang sistem perdagangan bebas, masalah tarif dan non-tarif serta masalah produk-produk tropis; (3) ASEAN mengusulkan tentang pengurangan tarif; (4) ASEAN kecewa atas tindakan AS dan Kanada yang menggantung kuota global di bidang tekstil; (5) tidak ada kemajuan di bidang pertanian; (6) ASEAN kecewa dengan tindakan anti dumping; (7) negara maju agar memimpin upaya perundingan tentang akses pasar (*Antara*, 31-7-1990).

APEC sepakat untuk: (1) peningkatan modal dan penanaman modal asing (PMA) di kawasan Asia-Pasifik; (2) memperbaiki akses ekonomi di kawasan Asia-Pasifik guna mencapai alih teknologi yang produktif; (3) menjembatani disparitas ekonomi di kawasan Asia-Pasifik; (4) mendukung pembentukan Pasar Tunggal Eropa 1992 guna menumbuhkan ekonomi yang berorientasi ke luar dan tidak akan menjadi blok perdagangan yang sempit; (5) pengesahan proyek-proyek sebagai berikut: (a) pengkajian data investasi dan perdagangan; (b) peningkatan perdagangan; (c) perluasan investasi dan alih teknologi; (d) pengembangan sumber daya manusia; (e) kerjasama energi; (f) konservasi sumber daya laut dan telekomunikasi; (6) menjamin keberhasilan Babak Uruguay dalam rangka GATT yang akan selesai pada bulan Desember 1990; (7) pertemuan berikutnya bahwa GATT tetap menjadi tema sentral, setelah Babak Uruguay 1990 selesai (*Antara*, 1-8-1990).

Menlu Ali Alatas, mengatakan pada jumpa pers tanggal 31 Juli 1990 bahwa: (1) apabila perundingan Babak Uruguay 1990 gagal maka akan berakibat negatif bagi negara-negara berkembang; (2) ASEAN perlu melihat hasil positif dari perundingan Babak Uruguay; (3) meskipun ada tekanan dari negara-negara maju terhadap ASEAN, pertemuan APEC berjalan lancar; (4) ASEAN setuju RRC, Taiwan dan Hongkong masuk dalam APEC hanya perlu kesepakatan dari ketiga negara yang bersangkutan dan di antara anggota APEC (*Antara*, 1-8-1990); (5) APEC bukan merupakan forum negosiasi seperti GATT; (6) masalah utama yang harus diselesaikan adalah akses pasar bagi negara-negara ASEAN; (7) APEC bukan blok dan tidak akan menjadi blok (*Kompas*, 1-8-1990).

Direktur Eksekutif CSIS, Hadi Soesastro mengatakan di Jakarta tanggal 31 Juli 1990 bahwa: (1) apabila Babak Uruguay gagal maka negara-negara Asia-Pasifik sebaiknya menyelenggarakan Babak Pasifik; (2) ia memperkirakan bahwa Babak Uruguay tidak akan mencapai sasaran karena pada saat pembentukannya pihak-pihak yang terlibat tidak tahu tentang sistem perdagangan apa yang akan dilakukan; (3) GATT hanya merupakan badan konsultasi yang tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila suatu negara melanggar suatu kesepakatan, maka GATT hanya bisa memberi informasi; (4) apabila Babak Pasifik terbentuk maka harus mempunyai landasan non-diskriminasi. Babak Pasifik bukan untuk membentuk blok perdagangan; (5) forum APEC telah menunjukkan tanda-tanda ke arah kelembagaan, yaitu adanya kesepakatan mengenai pertemuan-pertemuan APEC di masa yang akan datang (*Antara*, 1-8-1990).

V. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA

- MASALAH SIKAP AS TENTANG KAMBOJA

Keputusan AS untuk menarik pengakuan CGDK di PBB yang dikemukakan oleh Menlu AS, James Baker III di Paris tanggal 18 Juli 1990 mengundang beberapa tanggapan, baik yang pro maupun yang kontra.

Pada kesempatan itu, Menlu James Baker III mengatakan bahwa AS: (1) tidak mengakui lagi kursi CGDK di PBB. Perubahan sikap itu untuk mencegah berkuasanya kembali Khmer Merah di Kamboja. Tetapi pemerintahnya tetap melanjutkan dukungannya pada kelompok Sihanouk dan Son Sann; (2) akan membuka

dialog dengan Vietnam mengenai masalah Kamboja (*Kompas*, 19-7-1990).

Penasihat PM Muangthai, Kraisak Choonhavan, mengatakan di Bangkok tanggal 18 Juli 1990 bahwa: (1) pemerintahnya menyambut baik sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB; (2) sikap AS itu merupakan suatu kemajuan yang berarti dan mencerminkan pandangan AS tentang situasi Kamboja saat ini; (3) Muangthai tetap akan mengimbangi peranannya di antara faksi-faksi CGDK dan mempertimbangkan posisi ASEAN terhadap masalah Kamboja; (4) sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB mempunyai pengaruh kuat terhadap posisi ASEAN (*Antara*, 20-7-1990).

Menlu Ali Alatas, mengatakan di Jakarta tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) ia meragukan sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB akan menyelesaikan secara menyeluruh politik di Kamboja; (2) isu tentang sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB akan dibahas dalam Pertemuan Menlu ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting* = AMM) di Jakarta tanggal 24-26 Juli 1990; (3) AMC akan membahas masalah ekonomi, manusia perahu Indocina dan masalah Kamboja; (4) Indonesia dan ASEAN tidak keberatan tentang rencana AS untuk membuka dialog dengan Vietnam dan rezim Hun Sen di Phnom Penh (*Antara*, 20 Juli 1990).

Menlu Vietnam, Nguyen Co Thach, mengatakan di Hanoi tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) Vietnam menyambut baik tawaran AS untuk membuka perundingan langsung tentang masalah Kamboja; (2) Vietnam siap berunding dengan negara-negara yang berkepentingan tentang masalah Kamboja; (3) Vietnam mengharapkan masalah Kamboja diselesaikan secara politis, adil dan masuk akal (*Kompas*, 20-7-1990).

Juru bicara Kemlu Kamboja, Chum Bun Rong, mengatakan di Kamboja tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) Kamboja menyambut baik sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB; (2) keputusan AS tersebut merupakan langkah konstruktif menuju perdamaian di Kamboja (*Kompas*, 20-7-1990).

Juru bicara Kemlu Perancis, Daniel Bernard, mengatakan di Paris tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) perubahan AS tentang CGDK merupakan elemen positif yang akan membantu terciptanya perdamaian di Kamboja; (2) MEE akan membicarakan perubahan sikap AS tentang CGDK di Brussel tanggal 20 Juli 1990 (*Kompas*, 20-7-1990).

Juru bicara pemerintahan Thailand, Suvit Yodmanee, mengatakan di Bangkok tanggal 19 Juli 1990

bahwa: (1) perubahan sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB bukan merupakan suatu kejutan karena sejak dahulu opini negara-negara di dunia tidak setuju Khmer Merah sebagai salah satu faksi dalam CGDK; (2) rincian perubahan sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB belum jelas (*Kompas*, 20-7-1990).

PM Jepang, Toshiki Kaifu, mengatakan di Tokyo tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) Jepang menyambut baik sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB; (2) perubahan sikap AS tersebut tidak akan mempengaruhi posisi Jepang yang tetap mengakui CGDK (*Kompas*, 20-7-1990).

Deputy Menlu Soviet, Igor Rogachev, mengatakan di Paris tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) Soviet menyambut baik tentang perubahan sikap AS tersebut dan keputusan AS untuk berunding dengan Vietnam; (2) stabilitas di Asia Tenggara tidak mungkin tercapai tanpa normalisasi hubungan AS, Vietnam dan Kamboja (*Kompas*, 20-7-1990).

Juru bicara Kemlu Cina, Jin Guihua, mengatakan di Beijing tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) Cina akan mempelajari tentang sikap AS tersebut, di samping menegaskan akan terus memberikan dukungan senjata kepada gerilyawan CGDK sebelum perdamaian tercapai; (2) CGDK harus tetap sebagai wakil resmi Kamboja di PBB; (3) kursi Kamboja di PBB tidak boleh dibiarkan kosong sebelum penyelesaian politik secara menyeluruh tercapai; (4) Cina akan terus mensuplai senjata untuk Khmer Merah; (5) selama Vietnam tidak menarik seluruh pasukannya dari Kamboja, Cina akan terus mendukung rakyat Kamboja dan perlawanannya terhadap invasi kekuatan asing (*Kompas*, 20-7-1990).

Pangeran Sihanouk mengatakan di Phnom Penh tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) ia mengecam sikap AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB; (2) keputusan tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak adil; (3) ia mendesak negara-negara di dunia agar tidak tinggal diam jika PBB mengosongkan kursi Kamboja (*Kompas*, 20-7-1990).

Pemimpin KPNLF, Son Sann, mengatakan di Phnom Penh tanggal 19 Juli 1990 bahwa: (1) keputusan AS yang tidak lagi mengakui CGDK di PBB adalah merupakan hal yang tidak pantas; (2) jika AS membantu Vietnam, hal ini akan memperpanjang peperangan dan memperburuk situasi di Kamboja; (3) dunia internasional harus terus mendukung perang rakyat Kamboja terhadap Vietnam (*Kompas*, 20-7-1990).

Anggota Komisi I DPR, Theo Sambuaga, mengatakan di Jakarta tanggal 21 Juli 1990 bahwa: (1) ASEAN

perlu memanfaatkan momentum perubahan sikap AS terhadap CGDK dan Vietnam dengan mengkaji ulang arah kebijaksanaan ASEAN dalam penyelesaian masalah Kamboja; (2) perubahan AS terhadap kelompok CGDK di PBB tidak merugikan negara-negara ASEAN bahkan memberikan kesempatan bagi ASEAN untuk mendesak kelompok Khmer Merah dan pendukungnya RRC agar bersikap lebih akomodatif terhadap rezim Hun Sen dalam perundingan-perundingan selanjutnya; (3) perubahan sikap AS tersebut memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan peranan ASEAN dalam penyelesaian masalah Kamboja; (4) ASEAN tidak perlu menarik dukungannya terhadap CGDK karena ASEAN memiliki kepentingan dan visi yang berbeda dengan AS; (5) perubahan sikap AS terhadap CGDK dan Vietnam disebabkan karena tekanan politik dalam negeri AS yang menginginkan agar AS lebih bersikap realistis dalam menangani masalah Indocina (*Antara*, 22-7-1990).

Mantan Dubes RI untuk AS, Letjen (Purn.) Hasnan Habib, mengatakan pada wartawan Media Indonesia di Jakarta tanggal 26 Juli 1990 bahwa: (1) perubahan sikap AS tersebut mencerminkan sikap AS semakin realistis terhadap perkembangan di Kamboja dan membuka perspektif baru bagi penyelesaian konflik di Kamboja; (2) dialog dengan Vietnam bagi AS merupakan kunci penyelesaian masalah Kamboja; (3) ASEAN tidak pernah berhasil menyelesaikan konflik Kamboja selama sepuluh tahun terakhir ini (*Media Indonesia*, 27-7-1990).

Dekan FISIP-UI, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, mengatakan pada wartawan Media Indonesia di Jakarta tanggal 26 Juli 1990 bahwa: (1) ada dua pertimbangan yang mendasari keputusan sikap AS terhadap CGDK, yaitu: (a) tekanan politik dalam negeri AS yang menginginkan perubahan kebijaksanaan terhadap konflik di Kamboja; (b) setelah melihat perkembangan di Kamboja, AS mulai menganut politik lepas tangan; (2) bagi AS mendukung CGDK sangat tidak menguntungkan, terutama dari sisi pertimbangan hak asasi manusia; (3) ASEAN mengkhawatirkan perkembangan Khmer Merah yang akan dapat memenangkan perjuangannya sehingga dapat menggulingkan pemerintahan Hun Sen; (4) penyelesaian konflik di Kamboja sangat ditentukan oleh kemauan politik Vietnam dan Cina bukan pada ASEAN; (5) yang mendesak bagi ASEAN adalah segera dikeluarkannya joint appeal kepada RRC dan Vietnam agar memaksa kelompok-kelompok yang mereka dukung melakukan gencatan senjata di Kamboja (*Media Indonesia*, 27-7-1990).

Para Penulis

- **BANDORO, Bantarto,**
Sarjana Hukum jurusan Hukum Internasional Publik, Universitas Indonesia, 1978; MA dalam Hubungan Internasional dari International University of Japan, Graduate School of International Relations, 1986; sejak 1980 menjadi anggota Departemen Hubungan Internasional (HI) CSIS, peneliti dan pengamat masalah Asia Timur, khususnya Jepang dan hubungannya dengan Amerika Serikat.
- **LUHULIMA, C.P.F.,**
Berijazah Sarjana Muda, Fakultas Sastra Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, tahun 1957. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Muenster, Westf dan berhasil meraih gelar Magister Artium (MA) dan Philosophy Doctor (Ph.D.) dalam bidang filsafat. Sejak Juli 1964 menjadi Staf Peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kewilayahan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/Puslitbangpolwil-LIPI (sebelumnya bernama Lembaga Riset dan Kebudayaan Nasional LIPI/LRKN-LIPI). Tahun 1971-1980 menduduki jabatan Sekretaris LRKN-LIPI; kemudian tahun 1980-1984 sebagai Direktur bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Sekretariat Nasional ASEAN. Kini sebagai Ahli Peneliti Utama Puslitbangpolwil-LIPI, pengamat dan peneliti kawasan Euro-Amerika.
- **MANGKUSUWONDO, Suhadi,**
Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1957); Post graduate course, MIT Cambridge, Amerika Serikat (1959); Gelar Ph.D. dari Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat (1967). Jabatan sekarang Guru Besar Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UI; jabatan sebelumnya antara lain, Direktur Jenderal Penelitian dan Pengembangan Departemen Perdagangan (1973-1975) dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

- **SOESASTRO, Hadi,**
Sarjana di bidang Teknik Pesawat Terbang (Dipl. Ing.), Rhenish Westfaelische Technische Hochschule, Aachen, Jerman Barat, 1971 dan pada 1978 memperoleh Ph.D. dari The Rand Graduate Institute for Policy Studies, Santa Monica, Amerika Serikat; kini anggota Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif CSIS; Anggota Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia (1981 sampai sekarang), Dosen FISIP dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- **SUDARSONO, Juwono,**
Sarjana Publisistik, Universitas Indonesia (1965), MA dari Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat (1971) dan Ph.D. dalam Hubungan Internasional, London School of Economics and Political Science, Universitas London (1978). Kini sebagai Guru Besar Ilmu Politik dan Hubungan Internasional serta Dekan FISIP Universitas Indonesia dan pengajar pada Program Pasca Sarjana di Fakultas dan Universitas yang sama; sebelumnya adalah Ketua Departemen Ilmu Politik, FIS-UI (1971-1975) dan staf ahli Lembaga Studi Strategis, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (1972-1975).
- **SUKMA, Rizal,**
Sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung (1989); sejak Juni 1990, Staf Departemen Hubungan Internasional CSIS, mengkaji masalah-masalah RRC dan Asia Timur.

Catatan:

tempel
perangko
di sini

Kepada:

Biro Pemasaran

Centre for Strategic and
International Studies

Jl. Tanah Abang III/23-27

Jakarta 10160

Telepon: 356532-5

daftar bacaan. Pengiriman naskah hendaknya disertai nama lengkap dan alamat penulis yang jelas. Untuk tulisan-tulisan yang dimuat akan disediakan honoraria yang pantas. Naskah-naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan kepada penulis jika hal itu dikehendakinya. Surat menyurat yang berhubungan dengan hal tersebut harap ditujukan ke Redaksi ANALISIS CSIS.

Langganan

Harga pengganti ongkos cetak Rp 3.000,00 per eksemplar; langganan setahun (6 nomor, sudah termasuk ongkos kirim biasa) Rp 15.000,00. Surat menyurat yang berhubungan dengan langganan ditujukan ke Biro Pemasaran, CSIS.

Alamat

Jalan Tanah Abang III/23-27, Jakarta 10160, Telepon 356532, 356533, 356534, 356535.